PEMIKIRAN POLITIK SUNDA



PROF. DR. H. M. BUDIANA, S.IP.,M.SI

PEMIKIRAN POLITIK SUNDA

Prof. Dr. H. M. Budiana, S.IP.,M.Si

Penerbit:
CV. Kimfa Mandiri

PEMIKIRAN POLITIK SUNDA

Penulis :
Prof. Dr. H. M. Budiana, S.IP.,M.Si

Editor :
Ade Priangani
Widya Utama

Layout dan desain cover :
Ade Rahmat, M.AP
Sendy Ty

Penerbit:
CV. Kimfa Mandiri
JL. Raya Ciapus Rt 01 Rw 06 Desa. Ciapus Kec. Banjaran
Kab Bandung 40377
Telp: 022-85945637 - 085314983618 – 081220816826
Website: kimfamandiri.or.id
E-mail: kimfamandiriks@gmail.com

Cetakan pertama Juni 2025

ISBN : 978-634-96108-0-3

Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	**1**
BAB 2	**KONSEP PEMIKIRAN POLITIK** A. Sejarah Pemikiran Politik B. Aliran Pemikiran Politik	5 5 13
BAB 3	**NILAI-NILAI SUNDA DALAM POLITIK** A. Kekuasaan B. Legitimasi Kekuasaan C. Tatanan Politik yang Keadilan D. Kebebasan Individu dan Kebutuhan Kolektif	30 32 37 39 41
BAB 4	**PENGARUH AGAMA DALAM POLITIK SUNDA** A. Pengaruh Agama Dalam Politik B. Sejarah Pengaruh Agama dalam Politik Sunda C. Nilai-Nilai Keagamaan dalam Politik Sunda D. Pengaruh Agama dalam Perilaku Politik Sunda E. Tantangan dan Dinamika Agama dalam Politik Sunda	43 43 49 53 55 55
BAB 5	**BUDAYA POLITIK SUNDA** A. Budaya Politik B. Budaya Politik Sunda C. Budaya Politik “Huma”	57 57 59 67
BAB 6	**SISTEM POLITIK KERAJAAN SUNDA** A. Struktur, Hukum, dan Dinamika Pemerintahan Kerajaan Sunda B. Tantangan dan Runtuhnya Kerajaan Sunda	73 73 75
BAB 7	**MODEL KEPEMIMPINAN SUNDA** A. Dasa Pasanta B. Saptakrida C. Tri Tangtu	81 87 90 91
BAB 8	**DEMOKRASI ALA SUNDA** A. Nilai Demokrasi Dalam Budaya Sunda B. Konsep Aubkrasi C. Tradisi Talitian D. Tradisi Nguyang	95 95 97 98 98
BAB 9	**GREEN POLITIK SUNDA** A. Konsep Politik dalam Sunda Wiwitan B. Konsep Politik Hijau dalam Sunda Wiwitan	99 99 102
BAB 10	**PENATAAN WILAYAH**	106

	A. Struktur dan Makna Papat Kalima Pancer dalam Penataan Wilayah B. Papat Kalima Pancer dalam Tata Wilayah Kerajaan Sunda C. Penerapan Papat Kalima Pancer dalam Masyarakat Modern	109 110 110
BAB 11	**PRINSIP SILAS (KASILIHWANGIAN)** A. Silih Asih B. Silih Asuh C. Silih Asah	112 112 114 115
BAB 12	**FILOSOFI POLITIK DALAM KAULINAN SUNDA** A. Catur dan Politik B. Gapleh dan Politik C. Filosofi Kaulinan Gapleh dalam Politik D. Pelajaran dari Gapleh untuk Politik yang Sehat E. Kaulinan Lainnya	117 117 119 121 122 123
BAB 13	**PEMIKIRAN POLITIK TOKOH-TOKOH SUNDA** A. Dewawarman B. Purnawarman C. Prabu Anom Tarusbawa D. Prabu Sanjaya E. Sri Baduga Maharaja F. Prabu Tajimalela G. Syarif Hudayatullah H. Pangeran Kornel I. Oto Iskandardinata J. Safrudin Prawiranegara K. Sanusi Harjadinata L. Raden Emma Bratakusumah M. Tjetje Hidayat Padmadinata N. Ali Sadikin O. Ahmad Heryawan P. Dedi Mulyadi	125 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 135 137 138 139 140
BAB 14	**PENUTUP**	141
	DAFTAR PUSTAKA	147

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warakhmatullahi Wabarokatuh
Sampurasun!

Setiap peradaban, tentunya memiliki nilai-nilai politik, karena pada hakekatnya sebuah entitas pasti memiliki sejarahnya sendiri, sehingga Sir Robert Seeley, mengatakan *"history without political science has no fruit. political science without history has no root.*"

Masyarakat Sunda pun demikian, memiliki sejarah yang cukup Panjang dalam mengarungi kehidupan politik, mulai dari terbentuknya sistem kerajaan melalui Kerajaan Salakanagara, dilanjutkan dengan Tarumanagara, Sunda, Galuh, Padjadjaran, Sumedang Larang, kesultanan Cirebon, dan kesultanan Banten, hingga kemudian dalam kekuasaan Mataram, dibawah kendali VOC sampai berdirinya Republik Indonesia.

Semua itu merupakan manifestasi dari nilai-nilai, budaya, dan tradisi masyarakat Sunda dalam konteks tata kelola dan kepemimpinan. Pemikiran ini tidak hanya berakar pada warisan budaya yang kaya, tetapi juga berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Jawa Barat. Pemikiran politik Sunda menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Sunda menjunjung tinggi nilai tradisional, mereka juga terbuka terhadap perubahan modern. Keselarasan antara tradisi dan inovasi menjadi salah satu keunggulan dalam dinamika politik Sunda.

Kaitan dengan tatakelola, nilai dasar pemikiran politik Sunda, bersendikan pada Salapan Buyut Lembur adalah konsep dalam budaya Sunda yang merujuk pada sembilan aturan adat atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat desa (lembur). Konsep ini berakar pada tradisi leluhur yang bertujuan untuk menjaga harmoni, keseimbangan, dan kehidupan bermasyarakat yang selaras dengan alam serta nilai-nilai spiritual.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan ridlonya dapat menyelesaikan buku sederhana ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat atas selesainya buku ini, terutama kepada Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si, yang kerapkali memberikan wacana-wacana baru terutama dalam hal politik, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan, kasepuhan Dr. H. Makbul Mansyur, M.Si; Rektor Universitas Pasundan, Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE.,M.Sc para Wakil Rektor, tim dari Lembaga Budaya Sunda

Universitas Pasundan yang mensuport terkait hal ihwal ke Sunda-an serta keluarga di rumah yang dengan telaten menyemangati penulis.

Tentu saja dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk kesempurnaan buku ini. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan mendapatkan Ridlo Allah SWT...Aamiin YRA...

Bandung, Juni 2025
Penulis

H. Muhammad Budiana

PANGBAGEA
KETUA UMUM PENGURUS BESAR PAGUYUBAN PASUNDAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sampurasun !

Setelah mendengar akan diterbitkannya buku yang berjudul PEMIKIRAN POLITIK SUNDA, saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Pasundan merasa bahagia, karena semakin banyak warga Paguyuban Pasundan yang peduli tentang nilai-nilai dan Budaya Sunda.

Paguyuban Pasundan merupakan salah satu organisasi tertua yang sekarang masih ada dan tetap konsisten dengan Jatidirinya untuk merangan kabodoaan dan merangan kokoro. Tentunya perjalanan Paguyuban panjang, yang dimulai ketika Indonesia belum ada, sekaligus ikut membidani lahirnya Negara Indonesia, *kudu terus kadenge sora na, kudu diambeuan ku batur*. Paguyuban Pasundan memiliki tekad untuk mengangkat marwah Sunda, oleh karenanya harus banyak melahirkan karya-karya, baik tertulis maupun monumen-monumen yang menunjukkan eksistensi Ki Sunda.

Semoga lahirnya buku ini dapat memicu dan memacu lahirnya karya-karya lain dari berbagai keilmuan, sehingga nilai-nilai Sunda tetap terlestarikan dan bahkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan Dunia. Banyak nilai budaya Sunda yang dapat dijadikan alternatif dalam mengelola dunia internasional. Misalnya masyarakat Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, yang telah mengenalkan Konsep "leuit" dalam upaya ketahanan pangan; Ungkara *saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa*, mencerminkan efektifitas, efisiensi dan saving; *bibilintik ti leuleutik, babanda ti bubudak* yang mencerminkan kerja keras, dan sebagainya.

Nilai-nilai ke-Sundaan hari ini geus teu napak dina kekecrek, ngan saukur dongeng. Geus mangsana urang Sunda kudu hudang, medar peperenian kearifan lokal Sunda, pikeun jadi pakakas perang seja tandang makalangan di dunya internasional, bahwa Sunda memiliki nilai yang unggul, nilai yang menjadi solusi untuk ngigelan katut ngigelkeun zaman.

Dalam pemahaman saya, tentu saja hal ini memerlukan kesungguhan serta perjuangan untuk meyakinkan masyarakat luas tentang nilai-nilai budaya, tentang ilmu, iman, akhlak dan amal. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan identitas, dan jatidiri yang perlu penguatan.

Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, saya menyambut baik terbitnya buku yang ditulis oleh Prof. Dr. HM. Budiana, S.IP.,M.Si. Buku yang akan memberikan ruang bagi generasi berikut untuk terlibat lebih dalam mengenal kebudayaan, moral spiritual, tentang masyarakat yang memiliki nilai-nilai peradaban dinamis.

Semoga dengan terbitnya buku ini, generasi muda kita akan lebih mampu terlibat secara pro-aktif dalam budayanya sendiri, dengan moral dan pandangan yang lebih terukur.

Sampurasun !

Tatar Pasundan, Juni 2025
Pupuhu Paguyuban Pasundan

Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si

KATA SAMBUTAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Assalamualaikum wr wb
Sampurasun !

Puji serta syukur kita panjatkan ke kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmat-Nya kepada kita semua. Tidak lupa marilah kita haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, selaku junjungan kita.

Masha Allah, hanya kata itu yang bisa saya ucapkan, sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, ketika salah seorang dosen Unpas, Prof. Dr. HM. Budiana S.IP.,M.Si, dapat menuntaskan menyusun buku Pemikiran Politik Sunda. Karena perpustakaan mengenai Sunda, baik itu budaya, sosiologi, antropologi, manajemen, politik, ekonomi, masih belum banyak disentuh. Ironinya, literatur tentang Sunda yang ada pun ditulis oleh bangsa asing, baik itu penjajah maupun mereka yang datang sebagai mitra dagang, dan seolah menjadi bagian dari Sunda.

Saya berkeyakinan bahwa tulisan orang-orang Barat mengenai kesundaan mengacu kepada kepentingan praktis mereka saat itu, dengan demikian, Sunda menjadi objek kesejarahan. Paling tidak, kajian terhadap hal itu akan terbatas pada apa yang dilihat, dialami atau dirasakan pada saat tersebut. Padahal sebagaimana kita pahami, bentukan budaya tidaklah dapat dilihat secara parsialistis atau deskriptif dalam fase yang pendek.

Budaya Sunda kaya akan nilai dan dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi sopan dan santun, serta dikenal sebagai masyarakat yang ramah-tamah, murah senyum, lemah dan lembut, periang, serta sangat hormat kepada orang tua. Dengan filosofi hidup ‘Soméah Hade ka Sémah’ berarti ramah, bersikap baik, menjaga, melayani dan menjamu, serta menyenangkan semua orang. Hal itu yang menjadikan bentuk pengaplikasian masyarakatnya pada setiap perilaku dan tindakan interaksi atau komunikasi, baik di lingkungan setempat maupun luar.

Dengan terbitnya buku ini, besar harapan dapat memenuhi kelangkaan referensi dari Kebudayaan Sunda yang disampaikan kepada seluruh Mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi Pasundan. Seperti diketahui bahwa YPT Pasundan memiliki 4 (empat) unit garapan Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Pasundan dan STIE

Pasundan di kota Bandung, STKIP Pasundan di kota Cimahi, dan STH Pasundan di kota Sukabumi.

Sekali lagi selamat dan terimakasih kepada Prof. Dr. HM. Budiana S.IP., M.Si, yang telah menginisiasi penyusunan buku Pemikiran Politik Sunda ini, dan kedepannya diharapkan diikuti oleh yang lainnya untuk lebih memperkaya referensi tentang kolaborasi antara Keilmuan dengan Budaya Sunda, yang memiliki tujuan untuk penguatan visi misi, Agama Islam dan Budaya Sunda kudu harmonis, nu saur Ketua Umum Paguyuban Pasundan mah nyebatna, kedah diadumaniskeun, lain adugeulis, sabab adugeulis mah kompetisi.

Cag…. Mugia Allah SWT melindungi setiap itikad baik…Aamiin YRA. Sampurasun….

Bandung, Junii 2025
Ketua YPT Pasundan

Dr. H. Makbul Mansyur, M.Si

KATA SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN

Assalamualaikum wrwb
Sampurasun

Puji dan syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan kenikmatan yang telah diberikan. Sebagai Rektor Universitas Pasundan, saya turut berbangga ketika diantara civitas akademika Unpas ada yang berkarya terutama dalam penguatan visi misi. Hal dikarenakan globalisasi secara nyata telah menggeser nilai-nilai budaya lokal. Nilai budaya asing yang berkembang begitu pesat di dalam kehidupan masyarakat, sehingga *local wisdom* (kearifan lokal) di negara-negara berkembang mulai tergerus oleh budaya massa yang begitu kuat mengakar, mengakibatkan nilai-nilai budaya lokal terlupakan, tak terkecuali budaya dan nilai-nilai warisan leluhur Sunda, yang telah menjadi kedirian urang Sunda.

Nilai-nilai kearifan lokal Sunda (Istilah kearifan lokal kerap diserupakan dengan kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genious*), yang beberapa masa sebelumnya menjadi landasan dalam berperilaku seperti: keyakinan, pemahaman atau wawasan, adat kebiasaan atau etika, nilai filsafat yang disisipkan dalam dongeng rakyat, peribahasa, dan sebagainya mulai tergantikan oleh budaya baru yang merupakan efek globalisasi.

Kondsi ini menuntut semua kalangan urang Sunda untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dan semangat jatidiri agar mampu bertahan dalam desakan globalisasi yang semakin deras, apalagi sekarang telah ditemukan sebuah kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang telah membuktikan potensinya dalam mengubah cara kita hidup dan bekerja. Hal ini semakin mempersulit muatan lokal Sunda untuk dijadikan sebagai landasan perilaku masyarakat Sunda. Urang Sunda sudah cul dogdog tinggal igel, jati kasilih ku junti.

Oleh karena itu secara pribadi dan institusi saya menyambut baik “ketak lengkah” yang dilakukan oleh Prof. Dr. HM. Budiana S.IP.,M.Si, untuk mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan Kesundaan dalam bentuk Buku Pemikiran Politik Sunda ini. Harapannya adalah dengan hadirnya referensi-referensi tentang Kesundaan minimal memperlambat punahnya budaya Sunda, dan lebih jauhnya Budaya Sunda bisa tetap eksis sampai dunia ini

berakhir. Karena siapa lagi yang bisa mempertahankan nilai-nilai Sunda, kalau bukan kita sebagai sekeselernya.

Kedepan saya berharap lebih banyak lagi dosen-dosen yang dapat menuangkan gagasan, pemikiran dan hasil penelitian, baik menyangkut kepakarannya masing-masing, maupun yang ada kaitannya dengan visi-misi, untuk ngamumule budaya Sunda dan syiar Islam, seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum Paguyuban Pasundan. Geus meujeuhna urang Sunda tandang makalangan dalam berbagai lini, supaya orang Sunda katara ayana, karasa mangfaatna.

Buku Pemikiran Politik Sunda yang ditulis oleh Prof. Dr. HM. Budiana S.IP., M.Si, dalam pandangan saya sudah cukup refresentatif untuk menggambarkan dinamika politik dilihat dari perspektif budaya Sunda. Sekali lagi selamat kepada penulis yang dengan ketelitian dan semangatnya untuk mendokumentasikan nilai-nilai Budaya Sunda yang berkaitan dengan manajemen, dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk pengkayaan materi di lingkungan ilmu Politik.

Hurip Sunda…….

Bandung, Juni 2025
Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE.,M.Sc

BAB 1 PENDAHULUAN

Pemikiran politik adalah kajian tentang ide, konsep, dan teori yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antar-individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Pemikiran politik dapat mencakup berbagai aspek, seperti ideologi, hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, dan partisipasi politik. Secara historis, pemikiran politik telah berkembang melalui berbagai zaman, mulai dari filsafat politik klasik hingga pemikiran politik modern dan kontemporer.

Pemikiran politik adalah upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang: *Pertama*, Kekuasaan, berkaitan dengan, siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana kekuasaan itu digunakan? *Kedua*, Legitimasi, berkenaan dengan apa dasar sahnya kekuasaan atau pemerintahan? *Ketiga*, Keadilan, seputar bagaimana tatanan politik dapat memastikan keadilan sosial, ekonomi, dan hukum? Serta *Keempat*, Kebebasan dan Kewajiban, tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan individu dengan kebutuhan kolektif masyarakat ?

Dalam konsepsi modern, perjalanan pemikiran politik mengalami perkembangan melalui setidaknya 7 (tujuh) aliran pemikiran yaitu Aliran Liberalisme, Aliran Konservatisme, Aliran Sosialisme, Aliran Komunisme, Aliran Fasisme, Aliran Anarkisme, dan Aliran Demokrasi.

Setiap peradaban, tentunya memiliki nilai-nilai politik, karena pada hakekatnya sebuah entitas pasti memiliki sejarahnya sendiri, sehingga benar apa yang dikatakan Sir Robert Seeley, yang berkaitan dengan hubungan antara politik dan sejarah, beliau mengatakan *"history without political science has no fruit. political science without history has no root.*" Dengan kata lain, sejarah tanpa ilmu politik bagaikan pohon tak berbuah (tidak membuahkan hasil), karena sejarah adalah praktek politik pada masa lalu. Sementara Ilmu politik tanpa sejarah tidak akan berakar, sebab politik didasari oleh aktifitas politik pada masa lalu. Termasuk didalamnya masyarakat Sunda memiliki pengalaman politik dilihat dari sejarahnya.

Demikian juga dengan pemikiran politik Sunda merupakan manifestasi dari nilai-nilai, budaya, dan tradisi masyarakat Sunda dalam konteks tata kelola dan kepemimpinan. Pemikiran ini tidak

hanya berakar pada warisan budaya yang kaya, tetapi juga berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Jawa Barat. Pemikiran politik Sunda menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Sunda menjunjung tinggi nilai tradisional, mereka juga terbuka terhadap perubahan nilai-nilai modern. Keselarasan antara tradisi dan inovasi menjadi salah satu keunggulan dalam dinamika politik Sunda.

Kaitan dengan tatakelola, nilai dasar pemikiran politik Sunda, bersendikan pada Salapan Buyut Lembur merupakan konsep dalam budaya Sunda yang merujuk pada sembilan aturan adat atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat desa (lembur). Konsep ini berakar pada tradisi leluhur yang bertujuan untuk menjaga harmoni, keseimbangan, dan kehidupan bermasyarakat yang selaras dengan alam serta nilai-nilai spiritual.

Secara umum, Salapan Buyut (Sembilan Buyut) dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti: Buyut Tata Krama, menjunjung tinggi sopan santun dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Buyut Gotong Royong, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Buyut Amanah, pemegang teguh kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan. Buyut Kasepuhan, menghormati para tetua dan tokoh adat sebagai penjaga nilai leluhur. Buyut Kabuyutan, menjaga dan melestarikan tempat-tempat sakral atau bersejarah sebagai warisan budaya. Buyut Tatanen, menghargai tanah dan alam dengan cara bertani dan berkebun secara lestari. Buyut Silih Asih, mengedepankan kasih sayang, saling membantu, dan hidup rukun. Buyut Kaelokan, menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat. Dan, Buyut Kepercayaan, menghormati kepercayaan dan ajaran spiritual yang diwariskan leluhur.

Meskipun bisa berbeda-beda tergantung daerah dan interpretasi masing-masing komunitas adat Sunda, inti dari Salapan Buyut Lembur adalah menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas demi kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Sedangkan berkaitan dengan kepemimpinan, dalam masyarakat Sunda ngacu pada naskah kuno Sanghiyang Siksa Kandang Karesian (1518 M) yang mencatat terkait perilaku Prabu Jayadewata/Siliwangi, tentang petunjuk perilaku dan tatakrama menjadi pemingpin di Masyarakat waktu itu. Eta palanggeran teh disebut Rucita Parigeuing : *bisa nitah bisa miwarang, ja sabda arum wawangi, nya mana henteu surah di piwarang. (Nu di sebat parigeuing teh nyaeta bisa marentah bisa miwarang ku caritaan nu pikageunaheun tepi ka teu matak jengkel nu di parentahna)*.

Untuk Melaksanakan parigeuing caranya harus bisa melaksanakan Dasapasanta (Sapuluh Penentram Hati), yaitu: *Guna*, orang yang diperintah harus paham tentang apa yang diperintahkan; *Ramah*, Perintah harus disampaikan dengan wajar dan ramah, sehingga perintah dimaknai oleh yang diperintah sebagai bentuk penghargaan atas kemampuannya; *Hook*. Hookeun (kagum). Perintah dirasakan sebagai bentuk kekaguman terhadap kemampuan orang yang di perintah; *Pesok*. Artinya terpikat hatinya. Jadi perintah harus disampaikan dengan cara yang memikat hati, sehingga orang yang di perintah merasa bangga; *Asih*. Adalah rasa kasih sayang, perintah dirasakan sebagai bentuk kasih sayang, sehingga orang yang di perintah merasa sebagai bagian dari orang yang memerintah yang menyebabkan orang yang diperintah merasa ikut bertanggungjawab; *Karuni/karunya*. Perintah dirasakan seperti wujud kasih sayang serta karunia terhadap kemampuan orang yang diberi perintah; *Mukpruk*. Jelasnya membesarkan hati orang yang di perintah, sehingga mengerjakannya tidak merasa terpaksa; *Ngulas*. Dalam bahasa Indonesia mengulas, jelasnya orang yang memerintah harus memberi ulasan (komentar) dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan; *Nyecep*. Mampu mendinginkan perasaan orang yang di perintah baik dengan lisan (ucapan yang baik) apalagi dengan memberi hadiah; dan, *Ngalaangen*. Menarik simpati bawahan, caranya dengan menjalin silaturahim dengan cara yang wajar (tidak berdasarkan pada kepentingan tertentu), sehingga akan menimbulkan loyalitas.

Dalam naskah naskah Sanghyang Hayu yang merupakan naskah berbahan nipah abad XVI Masehi, dipaparkan lima belas unsur penting yang harus dimiliki pemimpin, yang terangkum ke dalam lima kelompok, sebagaimana dikemukakan Darsa (1998). Budi-guna-pradana (bijak-arif-saleh); Kaya-wak-cita (sehat atau kuat-bersabda-hati); Pratiwi-akasa-antara (bumi-angkasa-antara); Mata-tutuk-talinga (penglihatan-ucapan-pende ngaran); Bayu-sabda-hedap (energi-ucapan/sabda-itikad/kalbu dan pikiran). Semuanya berhubungan satu sama lain yang membangun sikap dan karakter pemimpin ideal).

Berkaitan dengan budaya politik yang bersumber pada mata pencaharian, urang Sunda berpolakan “ngahuma” atau berladang. Dalam sistem pertanian berladang, pola kekerabatan cenderung longgar, sebab mereka pada masa sebelum mengenal pesawahan, hidup berpindah-pindah dari daerah yang satu ke daerah yang lain, mengikuti tingkat kesuburan tanah. Hal ini masih bisa terlihat salah satunya pada masyarakat adat Kampung Ciptagelar di Sukabumi, yang mengalami perpindahan kampung beberapa kali, untuk

menemukan kampung yang baru, yang memberikan kehidupan yang lebih baik.

Pola kehidupan berladang melahirkan budaya politik positif adalah adanya kesetaraan, kesederajatan, kesejajaran antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kampung yang satu dengan yang lainnya, atau kalau dalam kerajaan pada masa itu, adanya kesederajatan antara yang satu dengan yang lainnya (seperti kasus kerajaan kembar ditanah Sunda, ketika kerajaan Tarumanagara terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh). Nilai kesetaraan (equality) didapatkan dari letak geografis "huma" yang cenderung setara, berada pada ketinggian yang sama, kehidupan masyarakat setaraf, kondisi ekonomi cenderung tidak jauh beda.

Kesetaraan ini melahirkan sebuah pondamen sistem demokratis, yang menurut pandangan David Beetham dalam bukunya "Democracy and human rights", ciri sebuah sistem demokrasi adalah adanya "popular control" dan "political equality". Dalam sistem kehidupan masyarakat "huma" sudah memiliki "equality". Maka orang-orang Sunda dengan nilai budaya Sundanya cenderung memiliki kebiasaan yang demokratis. Bahkan lebih dari itu, R. Emma Bratakusumah melihatnya lebih sempurna dari demokrasi, yaitu tercermin dalam budaya "aub" atau kalau Vega Karwanda, menyebutnya "aubkrasi". Sebab kalau kita berbicara tentang demokrasi, lebih dominan memperjuangkan "Hak" baik hak pemerintah maupun hak masyarakat, dalam Aubkrasi terjadi keseimbangan antara "hak" dan "kewajiban".

Contoh tradisi aub di Ciamis adalah ketika seseorang membuat rumah, masyarakat yang lainnya turut aktif membantu sesuai dengan kemampuan dan juga memberikan pinjaman kebutuhan yang diperlukan, dengan umpamanya membantu 100 sak semen, 1.000 bata, genteng dan lain-lain dengan babasan "ngiring aub". Bagi yang memberikan bantuan dianggap sebagai saving, sehingga nanti ketika dia membangun rumah ada tabungan di orang yang membuat rumah sebelumnya. Sedangkan bagi yang sedang membangun rumah teringankan kebutuhannya, namun ada kewajiban orang tersebut untuk menggantinya, ketika orang yang memberikan bantuan akan membangun rumahnya, dengan jumlah yang sama (tidak berhitung harga).

Dalam tradisi pemerintahan dalam nilai budaya Sunda juga mengenal adanya sistem otonomi daerah, pada masa Candrawarman (515-535 M), raja ke-enam dari kerajaan Tarumanagara. Ia ingin mengikat kesetiaan raja-raja daerah dengan cara memberi kepercayaan yang lebih banyak kepada mereka. Pemerintahan di

daerah di serahkan kembali kepada keturunan yang berhak atas dasar kesetiaan mereka kepada Sang Maharaja Tarumanagara. Pada masa pemerintahannya, terdapat 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon.

Semua nilai-nilai tersebut secara lengkapnya akan dibahas dalam 12 bahasan dan dibagi dalam bahasan yang tersusun dalam 14 Bab, dengan tambahan Pendahuluan dan Penutup. Tema Bab, menyesuaikan dengan bahasan dan materi kuliah Pemikiran Politik Sunda yang diajarkan di lingkungan FISIP Unpas.

BAB 2 KONSEPSI PEMIKIRAN POLITIK

Pemikiran Politik merujuk kepada gagasan, teori, dan konsep yang membentuk cara manusia memahami, mengorganisir, dan menjalankan pemerintahan serta kehidupan politik. Pemikiran politik mencakup berbagai ideologi, filsafat, serta pemikiran para tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Pemikiran politik terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, teknologi, dan tantangan global.

A. Sejarah Pemikiran Politik

Secara historis, fokus pemikiran politik telah berada pada tiga masalah yang saling terkait, yaitu masalah pembentukan masyarakat yang terikat oleh tatanan normatif, penetapan legitimasi dan ketentuan penegakan tatanan tersebut, dan rumusan kriteria untuk alokasi sumber daya dan hak. Di Eropa modern awal, pemikiran politik sebagian besar berkaitan dengan sifat dan legitimasi bentuk-bentuk baru tatanan yang mengikat secara normatif dan ketentuan penegakannya.

Perhatian terhadap pembentukan masyarakat politik menjadi perhatian utama dalam pemikiran politik dari Hobbes dan Pufendorf hingga Locke hingga Rousseau. Transformasi intelektual pada akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas memerlukan perubahan dalam pemikiran tentang manusia, tentang masyarakat, dan tentang hakikat tatanan politik. (Wittrock, 2001)

Berakhirnya Perang Dunia I dan tahun-tahun antara perang menandai kemenangan dan krisis pemikiran politik liberal dan munculnya berbagai bentuk pemikiran politik yang melampaui tradisi liberal. Sejarah pemikiran politik menjelang akhir abad kedua puluh telah ditandai oleh berbagai upaya untuk mengonseptualisasi ulang hakikat agensi manusia, baik dalam bentuk rasionalistik-deliberatif maupun dalam bentuk linguistik-interpretatif.

Aliran penelitian pertama telah menghasilkan formulasi hakikat komunitas politik dalam ketentuan kontraktual. Aliran ini juga berupaya menetapkan kriteria normatif untuk alokasi sumber daya yang tepat. Aliran kedua telah menghasilkan berbagai program untuk penulisan sejarah intelektual konseptual dan kontekstual. Aliran ini juga

melibatkan berbagai upaya untuk menempatkan pemikiran politik dalam konteks global yang lebih luas.

Pemikiran tentang hal-hal seperti itu ditemukan dalam bentuk yang diartikulasikan dengan jelas sejak pertengahan milenium pertama SM dan seterusnya di semua peradaban besar Afro-Eurasia. Dengan demikian, hal itu terwujud dalam teks-teks tertulis pada abad keenam oleh Konfusius dan dua abad kemudian oleh Mencius, di Tiongkok dan tulisan-tulisan selama periode yang sama di India, serta pada zaman kenabian agama Yahudi dan selama era filsafat klasik di Yunani. (Wittrock, 2001)

Munculnya tatanan politik seperti kekaisaran di seluruh Afro-Eurasia pada abad-abad terakhir milenium pertama SM juga memunculkan berbagai teks tentang sifat tatanan politik. Hal ini sama berlaku untuk teks-teks tentang kekaisaran Romawi dan Bizantium di wilayah Mediterania hingga teks-teks yang menyoroti fitur-fitur pemerintahan di Parthia dan kemudian juga di Persia Sassania, di India Maurya, dan di Kekaisaran Han di Tiongkok.

Pencatatan pemikiran politik dalam bentuk penulisan sejarah pemikiran tersebut merupakan fenomena yang jauh lebih baru. Fokusnya adalah pada hubungan aturan-aturan di seluruh komunitas dengan bentuk-bentuk penegakan hukum dan upaya untuk mencapai pemahaman tentang konteks historis di mana jenis-jenis hubungan tertentu terjadi.

Munculnya bentuk-bentuk pemikiran sejarah yang diartikulasikan dengan jelas sebagian besar bersamaan dengan munculnya sejarah dan ilmu sosial sebagai bentuk-bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang direformasi atau yang baru didirikan sejak awal abad kesembilan belas dan seterusnya. Untuk memahami fitur-fitur dan karakteristik utama penulisan sejarah pemikiran politik, pertama-tama perlu untuk mengungkap kondisi-kondisi utama pemikiran politik di wilayah tempat kondisi disiplin awal tersebut pertama kali terjadi, yaitu di Eropa.

Sejarah pemikiran politik pada paruh pertama paruh kedua abad kedua puluh dicirikan oleh tiga perkembangan paralel. Pertama, pemikiran politik pada periode ini tidak dapat tidak mencerminkan ketegangan mendalam di dunia dengan dua negara adikuasa dalam keadaan perang dingin. Pada saat yang sama, sebagian besar Dunia Ketiga muncul dari pengalaman masa lalu kolonial dan mencari tempat di dunia baru dengan ketegangan fundamental ini. Salah satu manifestasi dari konteks historis ini adalah tidak adanya sama sekali publikasi dalam tradisi pemikiran politik liberal di negara-negara yang

dikuasai Soviet, tetapi juga relatif tidak adanya pemikiran politik Marxis di banyak universitas di dunia berbahasa Inggris. Konsekuensi tidak langsung lainnya adalah minat yang terus-menerus untuk mengeksplorasi dasar empiris demokrasi liberal. Dalam hal ini, kontribusi oleh para sarjana seperti Robert Dahl dan beberapa rekannya di Universitas Yale, terutama Charles Lindblom, menonjol sebagai contoh. Kedua, tradisi arus utama klasik filsafat politik yang berorientasi historis membuat kemajuan yang signifikan. Isaiah Berlin dan Judith Shklar adalah perwakilan terkemuka dari jenis keilmuan ini, dan karya Charles Taylor dan Norberto Bobbio juga harus disertakan di sini. Ketiga, kontribusi filosofis dan teoritis telah dibuat yang akan membentuk kembali sejarah pemikiran politik akhir abad kedua puluh. Saya akan menyoroti beberapa kontribusi ini dan konsekuensinya dalam hal dua konseptualisasi utama tentang agensi manusia dan masyarakat yang dipahami dalam bagian di atas tentang kebangkitan ilmu sosial pada pergantian abad kedelapan belas.

Dalam tradisi rasionalistik-deliberatif, sebuah tonggak sejarah ditetapkan oleh penerbitan buku Kenneth Arrow (1951) *Social Choice and Individual Values*. Beberapa tahun kemudian, teori ekonomi memasuki ilmu politik secara luas dengan buku Anthony Downs (1957) *An Economic Theory of Democracy*, yang diikuti pada awal 1960-an oleh serangkaian buku yang menerapkan teori permainan dan teori pilihan sosial pada fenomena politik, seperti yang dibuktikan oleh Gabriel Almond (1990:117) peran kelembagaan Pusat Studi Lanjutan dalam Ilmu Perilaku di Stanford adalah peran penting untuk beberapa interaksi yang melibatkan Arrow, Dahl dan yang lainnya. Interaksi ini sangat penting bagi penerbitan buku Downs tetapi juga secara lebih umum bagi terobosan bentuk analisis rasionalistik).

Beberapa dekade kemudian, apa yang dulunya tampak sebagai perhatian yang menarik tetapi agak marjinal dari beberapa ahli teori politik yang terspesialisasi telah berkembang menjadi tradisi luas analisis pilihan rasional dengan pengaruh yang meluas pada teori dan praktik pemikiran politik, khususnya di Amerika Utara. Masyarakat sebagai kolektif komposisional digambarkan bukan hanya sebagai metafora yang mudah dipahami secara analitis, tetapi juga sebagai representasi tatanan masyarakat dan dengan klaim konsekuensial mengenai hakikat tindakan politik yang sah.

Salah satu dorongan berteori dalam tradisi ini adalah untuk menunjukkan keterbatasan, atau bahkan ketidakmungkinan, membatasi kebaikan bersama yang tidak ambigu, baik yang dicapai dengan bantuan fungsi kesejahteraan sosial atau keputusan mayoritas. Dalam konteks inilah *A Theory of Justice* karya John Rawls

(1971) muncul sebagai buku yang inovatif. Mengacu pada bentuk penalaran individualistis dan kontraktual, yang dikritik secara ringkas oleh beberapa sarjana, terutama mungkin Michael Sandel, Rawls mampu memperkenalkan kembali diskusi tentang keadilan dan distribusi serta alokasi yang adil ke dalam inti filsafat politik. Bahkan setelah puluhan tahun didiskusikan dan dikritik, kontribusi Arrow dan Rawls tetap mempertahankan kewibawaannya. Akan tetapi, keduanya menandakan adanya perubahan dengan penalaran historis dan kontekstual, bukan sebaliknya.

Dalam tradisi luas konsepsi interpretatif-linguistik tentang tindakan manusia dan masyarakat sebagai bentuk totalitas yang muncul dalam konteks historis, perkembangan baru yang penting juga terjadi. Dengan demikian, kontribusi para filsuf fenomenologis dan hermeneutik Eropa kontinental pada tahun 1950-an dan 1960-an menyatu dengan pengaruh dari filsafat linguistik Anglo-Saxon dalam tradisi Wittgenstein dan Austin. Tiga bentuk pemikiran semacam itu, khususnya, muncul dan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada cara mempelajari sejarah pemikiran politik.

Pada tahun 1959, Reinhart Koselleck (1959), yang mengacu pada tradisi kajian hermeneutik dan sejarah, menerbitkan sebuah buku tentang kritik dan krisis. Buku ini berfokus pada transformasi mendalam tatanan intelektual dan politik pada pergantian abad kedelapan belas, tetapi juga memuat inti dari program penelitian tentang sejarah konsep-konsep utama masyarakat dan tatanan politik dalam perspektif jangka panjang. Program ini terwujud melalui penerbitan selama beberapa dekade berikutnya dari serangkaian sembilan volume besar yang menelusuri sejarah sejumlah kecil konsep tersebut, terutama di Eropa kontinental.

Kira-kira pada waktu yang sama, Jürgen Habermas menguraikan program penelitian lain, yang mengacu pada tradisi gabungan dari pemikiran Marxis kritis, hermeneutika, dan teori tindak tutur. Pada tahun 1962 Habermas menerbitkan sebuah volume yang memiliki fokus empiris yang sama dengan Koselleck (Habermas, 1989). Jadi, ini merupakan penafsiran ulang atas kemunculan jenis baru ruang publik pada akhir abad kedelapan belas. Program jangka panjang Habermas berikutnya secara konsisten telah menghubungkan tradisi-tradisi yang berbeda ini dan dapat dalam satu pengertian dilihat sebagai bentuk posisi historis tetapi juga generalisasi radikal dari wawasan filosofis filsafat linguistik dan teori tindak tutur.

Tradisi yang belakangan ini juga mengilhami karya utama dua volume karya Quentin Skinner (1978) *The Foundations of Modern Political Thought* (sebuah karya, kebetulan, sebagian besar ditulis di

Institute for Advanced Study di Princeton). Skinner menjadi perwakilan utama dari sebuah aliran baru, yang sering diidentikkan dengan universitasnya – dan universitas lama John Pocock – yaitu Cambridge. Aliran ini melibatkan penetapan standar baru dan jauh lebih ketat untuk penulisan sejarah pemikiran politik, khususnya dalam tuntutannya agar konteks linguistik dan intelektual dari penulisan aktual karya-karya besar secara hati-hati dibawa ke garis depan analisis. Setelah beberapa dekade berdiskusi, tidak diragukan lagi bahwa sejarah intelektual telah mengalami kemajuan dalam periode ini, yang diilhami oleh karya-karya Skinner dan beberapa rekannya, yang masih belum sepenuhnya dieksplorasi. Pada saat yang sama, jelas juga bahwa karya-karya ini masih menyisakan ruang untuk penyelidikan yang lebih luas ke dalam hubungan antara perubahan kelembagaan dan intelektual jangka panjang.

Terakhir, kaitan antara pemikiran politik dan agensi politik menonjol dalam kajian mekanisme inklusi dan eksklusi serta pemberian dan penolakan hak-hak bagi manusia. Kajian gender jelas telah membawa kebangkitan penulisan sejarah pemikiran politik dengan kontribusi perintis oleh Carole Pateman dan Seyla Benhabib, hanya untuk menyebutkan dua cendekiawan paling terkemuka di akhir abad kedua puluh.

Kajian yang berorientasi pada sejarah dalam beberapa tahun terakhir tampaknya membuka kemungkinan untuk menempatkan pemikiran politik dalam konteks yang jauh lebih luas daripada yang selama ini menjadi kebiasaan. Tidak kalah pentingnya, para cendekiawan yang menulis di negara-negara di luar konteks Atlantik Utara dan Eropa Barat tampaknya kini akan membantu mewujudkan upaya yang lebih global untuk memikirkan kembali sejarah pemikiran politik. Hal itu juga, hampir tak terelakkan, akan berkontribusi pada transendensi beberapa keterbatasan paling parah dari pemikiran politik kontemporer, khususnya yang berikut ini:

Pertama, Ketidakmampuan relatif pemikiran politik dalam tradisi rasionalistik untuk melampaui teori keagenan yang jelas-jelas miskin jika dibandingkan dengan penelitian sejarah yang tersedia tetapi juga jika dibandingkan dengan tuntutan, pemikiran sosial dan politik itu sendiri tidak dapat tidak membuat suatu teori keagenan. (Joas, 1996, 2000)

Kedua, Ketidakmampuan relatif dari apa yang disebut kritikus komunitarian dari tradisi ini untuk memasok kisah sejarah berkelanjutan tentang komunitas pilihan mereka dan untuk melepaskan diri dari kecenderungan masuk ke dalam pembenaran

melingkar tentang masyarakat-masyarakat itu sendiri di mana mereka kebetulan berada atau diidentifikasikan dengannya.

Ketiga, Ketidakmampuan relatif penelitian dalam tradisi sejarah konseptual dan kontekstualisme linguistik untuk berkontribusi pada pemahaman tentang pembentukan kelembagaan tatanan politik dalam perspektif jangka panjang dan juga ekstra-Eropa.

Agar mampu melampaui batasan-batasan ini, tampaknya pemikiran politik harus menjadi jauh lebih siap untuk terlibat dalam studi-studi tentang proses-proses jangka panjang transformasi intelektual dan kelembagaan. Ini kemungkinan besar akan memerlukan upaya-upaya untuk menyegarkan ilmu sosial historis dari suatu tipe yang menjadi ciri khas ilmu sosial klasik, terutama Weber (Schluchter, 1996). Ini kemudian juga akan merangsang ilmu sosial yang peka terhadap budaya dan kontekstual dari suatu tipe yang telah diadvokasikan dengan sangat ambisius dan konsisten oleh para sarjana di berbagai ilmu sosial dan sejarah dan dengan SN Eisenstadt (1995) sebagai salah satu wakilnya yang paling menonjol. Sejarah pemikiran politik dalam tiga dekade terakhir abad kedua puluh melibatkan kemajuan-kemajuan yang mengesankan.

Namun, pada pergantian milenium, kebutuhan akan program-program penelitian yang berorientasi historis dan komparatif yang mampu melampaui batasan-batasan pemikiran politik kontemporer juga menonjol sebagai sesuatu yang mungkin lebih mendesak daripada kapan pun sejak munculnya ilmu sosial itu sendiri pada akhir abad kedelapan belas.

Secara umum, pemikiran politik di Eropa modern awal merupakan cara untuk memahami hakikat pemerintahan dalam komunitas manusia dan memahami kondisi argumentasi dan penegakan normatif dalam komunitas tersebut. Kebutuhan akan pemahaman baru tentang jenis fenomena ini sendiri terkait langsung dengan kemunduran bertahap dan akhirnya kematian dua bentuk kelembagaan paling menonjol di Eropa abad pertengahan.

Pertama, dunia budaya Kristen Barat, yang dilambangkan pertama oleh Gereja Kristen yang mencakup semuanya dan kedua oleh mitranya yang sekuler, yaitu tatanan politik Kekaisaran Romawi Suci yang luas namun sulit dipahami. Namun, pada abad kedua belas dan ketiga belas, pemerintahan republik kota, khususnya di bagian utara Italia, telah muncul sebagai bentuk tatanan politik baru. Awalnya, pemerintahan ini sering kali dimodelkan pada komunitas perdagangan dan diciptakan dari rasa perlunya dukungan dan perlindungan bersama di wilayah yang rentan terhadap serangan dan dengan sedikit

atau tanpa perlindungan yang diberikan oleh para penguasa Kekaisaran nominal.

Demikian pula, monarki nasional yang baru muncul mulai menegaskan otoritas mereka terhadap paus dan kaisar. Dalam proses sekuler ini, raja Prancis memainkan peran perintis. Secara khusus, ia telah menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat posisi dan basis keuangannya sendiri, lebih awal daripada kebanyakan raja dan penguasa lainnya, misalnya, dengan menyita tanah dan barang milik ordo Templar. Contoh ini diikuti oleh raja-raja di seluruh Eropa dalam menyita tanah dan kekayaan biara dan ordo keagamaan di abad-abad berikutnya.

Dalam pengertian ini, Reformasi dan Kontrareformasi berarti bahwa di negara-negara Protestan dan Katolik, monarki nasional, yang biasanya bersifat komposit (Elliott, 1992), diciptakan atau direformasi. Ini terjadi atas dasar cita-cita dominan sebelumnya tentang gereja, kekaisaran, dan republik kota, tetapi dalam bentuk yang mensintesis bagian-bagian yang sebelumnya telah dipisahkan. Lebih jauh lagi, monarki nasional dan komposit yang baru hampir selalu melibatkan upaya dari pihak penguasa untuk mengambil alih tanah dan sumber daya yang sebelumnya telah dikendalikan oleh gereja atau ordo keagamaan. Dengan demikian mereka juga dapat mengamankan basis fiskal untuk bentuk-bentuk baru pemerintahan politik, meskipun sering kali dengan harga yang mengerikan dari perang saudara agama yang berkepanjangan dan pembersihan.

Dalam kondisi ini, pertanyaan politik yang paling utama adalah memahami hakikat dan legitimasi tatanan komunal yang mengikat secara normatif dan menguraikan berbagai cara yang sah untuk menegakkan dan menegakkan tatanan tersebut. Banyak pemikir politik klasik modern awal, dari Machiavelli hingga Jean Bodin, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Akan tetapi, mereka tidak banyak bicara tentang dua rangkaian pertanyaan lain yang dibahas di atas dan yang kemudian menjadi penting dalam pemikiran politik selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang konstitusi komunitas manusia dan prinsip-prinsip yang mendasari keputusan tentang alokasi sumber daya atau pemberian atau penahanan hak.

Semua ini berubah dengan runtuhnya tatanan politik dan budaya lama di Eropa pada pertengahan abad ke-17. Di Tiongkok, bahkan dalam masa transisi yang sulit dari Dinasti Ming ke Dinasti Ching pada waktu yang hampir bersamaan, tatanan linguistik dan politik umum tetap dipertahankan. Di Jepang, periode panjang peperangan dan kekacauan internal berakhir dengan terbentuknya salah satu bentuk pemerintahan absolut yang paling efektif, yaitu

Keshogunan Tokugawa. Di seluruh dunia Islam, tiga kekaisaran paralel, yaitu Ottoman, Safavi, dan Mughal, merupakan entitas politik yang stabil.

Namun, di Eropa, sistem negara baru terbentuk dan diumumkan dalam perjanjian damai Westphalia tahun 1648, yang didasarkan pada pengakuan eksplisit atas keberagaman agama dan keunggulan monarki. Sistem ini juga didasarkan pada pengakuan diam-diam bahwa pemerintahan kekaisaran yang mencakup semuanya tidak lagi mungkin sebagai cita-cita politik yang layak dan bahwa keberagaman agama tidak dapat diatasi.

B. Aliran Pemikiran Politik

1. Aliran Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi politik, pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. (Ian McLean and Alistair McMillan, 2009; John Dunn, 1993 dan Kanazawa 2010) Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini, tetapi umumnya mereka mendukung hak-hak individu (termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia), demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama dan ekonomi pasar. (Adams, Sean; Morioka, Noreen; Stone, Terry Lee, 2006; Kumar, Rohit Vishal; Joshi, Radhika, 2006 dan Leydier, Gilles and Martin, Alexia (2013)

Liberalisme menjadi salah satu gerakan utama di Zaman Pencerahan dan menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonom Barat. Liberalisme berusaha untuk menggantikan norma-norma hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Para liberal juga mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli kerajaan dan hambatan perdagangan lainnya. Ini dimaksudkan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan marketisasi. Filsuf John Locke sering dianggap sebagai pendiri liberalisme, sebuah tradisi yang didasarkan kontrak sosial, dengan alasan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk hidup, atas kebebasan dan properti dan pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak ini. Jika tradisi liberal Inggris menekankan perluasan demokrasi, liberalisme Prancis menekankan penolakan otoritarianisme dan terkait dengan pembangunan bangsa. (John Locke)

Para pemimpin dalam Revolusi Agung Inggris tahun 1688, Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Perancis tahun 1789

menggunakan filosofi liberal untuk menggulingkan kedaulatan kerajaan yang absolut dengan senjata. Liberalisme mulai menyebar dengan cepat terutama setelah Revolusi Perancis. Pada abad ke-19, banyak pemerintahan liberal didirikan di sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika Selatan. Ini bersamaan dengan mapannya republikanisme di Amerika Serikat. Di Inggris era Victoria, liberalisme digunakan untuk mengkritik institusi politik yang mapan, dengan merujuk pada ilmu pengetahuan dan akal budi atas nama rakyat. (Zafirovski, 2007 dan Daniel, 2017)

Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, liberalisme di Kekaisaran Ottoman dan Timur Tengah mempengaruhi periode reformasi seperti Tanzimat dan Al-Nahda serta munculnya konstitusionalisme, nasionalisme, dan sekularisme. Sebelum 1920, lawan ideologi utama liberalisme adalah komunisme, konservatisme dan sosialisme, tetapi liberalisme kemudian menghadapi tantangan ideologis utama dari fasisme dan Marxisme-Leninisme sebagai lawan baru. Selama abad ke-20, ide-ide liberal menyebar lebih jauh, terutama di Eropa Barat, ketika demokrasi liberal tampil sebagai pemenang dalam kedua perang dunia. (Conway, 2014)

Di Eropa dan Amerika Utara, pembentukan liberalisme sosial (sering disebut liberalisme sederhana di Amerika Serikat) menjadi elemen penting dalam perluasan negara kesejahteraan. Hari ini, partai-partai liberal banyak memegang kekuasaan dan pengaruh di seluruh dunia. Elemen fundamental masyarakat kontemporer memiliki akar liberal. Gelombang awal liberalisme mempopulerkan individualisme ekonomi sambil memperluas pemerintahan konstitusional dan otoritas parlementer. Kaum liberal mencari dan menetapkan tatanan konstitusional yang menghargai kebebasan individu yang penting, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat; kebebasan beragama, pengadilan yang independen, pengadilan publik oleh juri; dan penghapusan hak-hak istimewa aristokrat. (Schlesinger Jr, 1956)

Gelombang pemikiran dan perjuangan liberal modern belakangan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperluas hak-hak sipil. Kaum liberal banyak mendukung kesetaraan gender dan kesetaraan ras dalam upaya mereka untuk mempromosikan hak-hak sipil. Gerakan hak-hak sipil global di abad ke-20 bermaksud untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tujuan lain yang sering dipromosikan oleh kaum liberal termasuk hak pilih universal dan akses universal ke pendidikan.

Kata-kata seperti liberal, liberty, libertarian, dan libertine semuanya mempunyai akar sejarah ke bahasa Latin liber, yang berarti "bebas". Salah satu contoh pertama yang tercatat dari penggunaan

kata liberal terjadi pada tahun 1375, ketika digunakan untuk menggambarkan seni liberal dalam konteks pendidikan yang diinginkan untuk orang yang merdeka. Hubungan awal kata itu dengan pendidikan klasik universitas abad pertengahan membuka jalan bagi munculnya denotasi dan konotasi yang berbeda. Liberal dapat merujuk pada "bebas dalam menganugerahkan" sejak tahun 1387, "dibuat tanpa tugas" pada tahun 1433, "diizinkan secara bebas" pada tahun 1530 dan "bebas dari pengekangan"—seringkali sebagai komentar yang merendahkan—pada abad ke-16 dan ke-17. Di Inggris abad ke-16, liberal bisa memiliki atribut positif atau negatif dalam mengacu pada kemurahan hati atau kecerobohan seseorang. Dengan munculnya Abad Pencerahan, kata liberal memperoleh makna yang lebih positif yang didefinisikan sebagai "bebas dari prasangka yang sempit" pada tahun 1781 dan "bebas dari kefanatikan" pada tahun 1823.

Pada tahun 1815, penggunaan pertama kata "liberalisme" muncul dalam bahasa Inggris. Di Spanyol, kaum liberal, kelompok pertama yang menggunakan label liberal dalam konteks politik, berjuang selama beberapa dekade untuk melakukan implementasi Konstitusi 1812. Dari tahun 1820 hingga 1823 selama Trienio Liberal, Raja Ferdinand VII dipaksa oleh kaum liberal untuk bersumpah untuk menegakkan Konstitusi. Pada pertengahan abad ke-19, kata liberal digunakan sebagai istilah politis untuk partai dan gerakan di seluruh dunia. (Kirchner, 1988)

Seiring berjalannya waktu, arti kata liberalisme mulai menjadi berbeda di berbagai belahan dunia. Menurut Encyclopædia Britannica: "Di Amerika Serikat, liberalisme diasosiasikan dengan kebijakan negara kesejahteraan dari program New Deal dari administrasi Demokrat Pres. Franklin D. Roosevelt, sedangkan di Eropa lebih sering dikaitkan dengan komitmen pemerintahan yang terbatas dan kebijakan ekonomi laissez-faire". Akibatnya, di Amerika Serikat ide-ide individualisme dan ekonomi laissez-faire yang sebelumnya dikaitkan dengan liberalisme klasik menjadi dasar bagi munculnya aliran pemikiran libertarian dan merupakan bagian penting dari konservatisme Amerika. (Rothbard, 2006)

Di Eropa dan Amerika Latin, kata liberalisme berarti bentuk moderat dari liberalisme klasik, tidak seperti Amerika Utara. Istilah ini mencakup liberalisme konservatif kanan-tengah (liberalisme kanan) dan liberalisme sosial kiri-tengah (liberalisme kiri). Tidak seperti Eropa dan Amerika Latin, kata liberalisme di Amerika Utara hampir secara eksklusif merujuk pada liberalisme sosial (liberalisme kiri). Partai Kanada yang dominan adalah Partai Liberal dan Partai Demokrat biasanya dianggap liberal di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kaum

liberal konservatif biasanya disebut konservatif dalam arti luas. (Puddington, 2006)

Liberalisme—*baik sebagai arus politik maupun tradisi intelektual*—sebagian besar merupakan fenomena modern yang bermula di abad ke-17, meskipun beberapa gagasan filosofis liberal telah mempunyai pendahulu di zaman klasik dan di Kekaisaran Tiongkok. Kaisar Romawi Marcus Aurelius memuji, "gagasan tentang pemerintahan yang diatur dengan memperhatikan persamaan hak dan kebebasan berbicara yang sama, dan gagasan tentang pemerintahan yang menghormati hampir semua kebebasan dari yang diperintah".

Para sarjana mengakui sejumlah prinsip yang umum bagi kaum liberal kontemporer dalam karya-karya beberapa Sofis dan dalam Orasi Pemakaman oleh Pericles. Filsafat liberal melambangkan tradisi intelektual yang luas yang telah meneliti dan mempopulerkan beberapa prinsip yang paling penting dan kontroversial di dunia modern. Hasil ilmiah dan akademisnya yang luar biasa dianggap mempunyai "kekayaan dan keragaman", tetapi keragaman itu sering diartikan bahwa liberalisme datang dalam formulasi yang berbeda dan menghadirkan tantangan bagi siapa pun untuk mencari definisi yang tepat. (Young 2002)

Liberalisme Eropa Kontinental terbagi antara moderat dan progresif, dengan moderat cenderung ke elitisme dan progresif mendukung universalisasi institusi fundamental seperti hak pilih universal, pendidikan universal dan perluasan hak milik. Seiring berjalannya waktu, kaum moderat menggantikan kaum progresif sebagai penjaga utama liberalisme Eropa kontinental. (Kirchner, 1988)

2. Aliran Konservatisme

Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, conservāre, melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, the status quo ante. Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai “bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan.” Roger Scruton menyebutnya sebagai “pelestarian ekologi sosial” dan “politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin, keberadaan

sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial." (White, 1950)

Meskipun konservatisme adalah suatu pemikiran politik, sejak awal, ia mengandung banyak alur yang kemudian dapat diberi label konservatif, baru pada Masa Penalaran, dan khususnya reaksi terhadap peristiwa-peristiwa di sekitar Revolusi Prancis pada 1789, konservatisme mulai muncul sebagai suatu sikap atau alur pemikiran yang khas. Banyak orang yang mengusulkan bahwa bangkitnya kecenderungan konservatif sudah terjadi lebih awal, pada masa-masa awal Reformasi, khususnya dalam karya-karya teolog Anglikan yang berpengaruh, Richard Hooker – yang menekankan pengurangan dalam politik demi menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan menuju keharmonisan sosial dan kebaikan bersama. Namun baru ketika polemic Edmund Burke muncul - Reflections on the Revolution in France - konservatisme memperoleh penyaluran pandangan-pandangannya yang paling berpengaruh. Edmund Burke (1729-1797)

Negarawan Inggris-Irlandia Edmund Burke, yang dengan gigih mengajukan argumen menentang Revolusi Prancis, juga bersimpati dengan sebagian dari tujuan-tujuan Revolusi Amerika. Tradisi konservatif klasik ini sering kali menekankan bahwa konservatisme tidak mempunyai ideologi, dalam pengertian program utopis, dengan suatu bentuk rancangan umum. Burke mengembangkan gagasan-gagasan ini sebagai reaksi terhadap gagasan 'tercerahkan' tentang suatu masyarakat yang dipimpin oleh nalar yang abstrak. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ini, ia mengantisipasi kritik terhadap modernisme, sebuah istilah yang pertama-tama digunakan pada akhir abad ke-19 oleh tokoh konservatif keagamaan Belanda Abraham Kuyper. Burke merasa terganggu oleh Pencerahan, dan sebaliknya menganjurkan nilai tradisi.

Sebagian orang, kata Burke, tidak cukup mempunyai nalar dibandingkan orang lain, dan karena itu sebagian dari mereka akan menciptakan pemerintahan yang lebih buruk daripada yang lainnya bila mereka benar-benar mengandalkan nalar. Bagi Burke, rumusan yang semestinya tentang pemerintahan tidak diperoleh dari abstraksi seperti "Nalar," melainkan dari perkembangan negara sesuai dengan apa yang dihargai zaman dan lembaga-lembaga penting masyarakat lainnya seperti keluarga dan Gereja.

Meskipun secara nominal Konservatif, Disraeli bersimpati dengan beberapa tuntutan dari kaum Chartis dan membela aliansi antara kaum bangsawan yang bertanah dengan kelas pekerjaan dalam menghadapi kekuatan kelas menengah yang meningkat. Ia membantu

pembentukan kelompok Inggris Muda pada 1842 untuk mempromosikan pandangan bahwa yang kaya harus menggunakan kekuasaan mereka untuk melindungi yang miskin dari eksploitasi oleh kelas menengah. Perubahan Partai Konservatif menjadi suatu organisasi massa modern dipercepat oleh konsep tentang "Demokrasi Tory" yang dihubungkan dengan Lord Randolph Churchill.

Sebuah koalisi Liberal-Konservatif pada masa Perang Dunia I berbarengan dengan bangkitnya Partai Buruh, mempercepat runtuhnya kaum Liberal pada 1920-an. Setelah Perang Dunia II, Partai Konservatif membuat konsesi-konsesi bagi kebijakan-kebijakan sosialis kaum Kiri. Kompromi ini adalah suatu langkah pragmatis untuk memperoleh kembali kekuasaan, tetapi juga sebagai akibat dari sukses-sukses awal dari perencanaan terpusat dan kepemilikan negara yang menciptakan suatu consensus lintas-partai. Hal ini dikenal sebagai 'Butskellisme', setelah kebijakan-kebijakan Keynesian yang hampir identik dari Rab Butler atas nama kaum Konservatif, dan Hugh Gaitskell untuk Partai Buruh.

Namun demikian, pada 1980-an, di bawah pimpinan Margaret Thatcher, dan pengaruh Sir Keith Joseph, Partai ini kembali ke gagasan-gagasan ekonomi liberal klasik, dan swastanisasi dari banyak perusahaan negara pun diberlakukan. Untuk pembahasan lebih terinci, lihat Sejarah Partai Konservatif.

Warisan Thatcher bersifat campuran. Sebagian komentator menyatakan bahwa ia menghancurkan konsensus tradisional dan filosofi Partai, dan, dengan melakukan hal itu, menicptakan suatu situasi di mana masyarakat tidak benar-benar tahu nilai-nilai apa yang dipegang oleh Partai. Kini Partai Konservatif sibuk mencoba mencari jati dirinya kembali.

Di bagian-bagian lain dari Eropa, konservatisme arus utama sering kali diwakili oleh partai-partai Kristen Demokrat. Mereka membentuk faksi besar Partai Rakyat Eropa di Parlemen Eropa. Asal usul partai-partai ini umumnya adalah partai-partai Katolik dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan ajaran sosial Katolik sering kali menjadi inspirasi awal mereka. Setelah bertahun-tahun, konservatisme pelan-pelan menjadi inspirasi ideologis utama mereka, dan mereka umumnya menjadi kurang Katolik. CDU, partai saudaranya di Bavaria Persatuan Sosial Kristen (CSU), dan Seruan Demokrat Kristen (CDA) di Belanda adalah partai-partai Protestan-Katolik.

Di negara-negara Nordik, konservatisme diwakili dalam partai-partai konservatif liberal seperti Partai Moderat di Swedia dan Partai Rakyat Konservatif di Denmark. Secara domestik, partai-partai ini umumnya mendukung kebijakan-kebijakan yang berorientasi pasar,

dan biasanya memperoleh dukungan dari komunitas bisnis serta kaum profesional kerah putih. Secara internasional, mereka umumnya mendukung Uni Eropa dan pertahanan yang kuat. Pandangan-pandangan mereka tentang masalah-masalah sosial cenderung lebih liberal daripada, misalnya, Partai Republik Amerika Serikat. Konservatisme sosial di negara-negara Nordik sering kali ditemukan dalam partai-partai Kristen Demokrat mereka. Di beberapa negara Nordik, partai-partai populis sayap kanan telah memperoleh dukungan sejak 1970-an. Politik mereka telah dipusatkan pada pemotongan pajak, pengurangan imigrasi, dan undang-undang yang lebih keras dan kebijakan-kebijakan ketertiban.

Pada umumnya, orang dapat mengklaim bahwa kaum konservatif Eropa cenderung lebih moderat dalam berbagai isu sosial dan ekonomi, daripada konservatif Amerika. Mereka cenderung cukup bersahabat dengan tujuan-tujuan negara kesejahteraan, meskipun mereka juga prihatin dengan lingkungan bisnis yang sehat. Namun demikian, beberapa kelompok cenderung lebih mendukung agenda-agenda libertarian atau laissez-faire yang lebih konservaitf, khususnya di bawah pengaruh Thatcherisme. Kelompok-kelompok konservatif Eropa sering memandang diri mereka sebagai pengawal-pengawal kebijaksanaan, moderasi, pengalaman historis yang sudah teruji, dibandingkan dengan radikalisme dan percobaan sosial. Persetujuan dari budaya tinggi dan lembaga-lembaga politik yang mapan seperti monarki ditemukan dalam konservatisme Eropa. Kelompok-kelompok konservatif arus utama sering kali adalah pendukung-pendukung gigih Uni Eropa. Namun demikian, kaum tradisional juga dapat menemukan pula unsur-unsur nasionalisme di banyak negara.

Di Tiongkok konservatisme didasarkan pada ajaran-ajaran Kong Hu Cu. Kong Hu Cu yang hidup pada masa kekacauan dan peperangan antara berbagai kerajaan, banyak menulis tentang pentingnya keluarga, kestabilan sosial, dan ketaatan terhadap kekuasaan yang adil. Gagasan-gagasannya terus menyebar di masyarakat Tiongkok. Konservatisme Tiongkok yang tradisional yang diwarnai oleh pemikiran Kong Hu Cu telah muncul kembali pada tahun-tahun belakangan ini, meskipun selama lebih dari setengah abad ditekan oleh pemerintahan Marxis-Leninis yang otoriter.

Setelah kematian Mao pada 1976, tiga faksi berebutan untuk menggantikannya: kaum Maois garis keras, yang ingin melanjutkan mobilisasi revolusioner; kaum restorasionis, yang menginginkan Tiongkok kembali ke model komunisme Soviet; dan para pembaharu, yang dipimpin oleh Deng Xiaoping, yang berharap untuk mengurangi

peranan ideology dalam pemerintahan dan merombak ekonomi Tiongkok.

Nilai-nilai Tiongkok yang tradisional telah muncul dengan cukup kuat, meskipun lama ditekan oleh rezim komunis yang revolusioner. Saat ini, Partai Komunis Tiongkok dikelola oleh para teknokrat, yang mengusahakan stabilitas dan kemajuan ekonomi, sementara menindas kebebasan berbicara dan agama. Partai dilihat oleh sebagian orang sebagai penerima Mandat Surgawi, sebuah gagasan Tiongkok tradisional. Partai Komunis menjinakkan dirinya sendiri dan tidak lagi secara konsisten menganjurkan teori Marxis yang revolusioner, dan sebaliknya berpegang pada fleksibilitas ideologist teologi yang konsisten dengan ucapan Deng Xiaoping, yakni mencari kebenaran di antara fakta.

Cinta tanah air dan kebanggaan nasional telah muncul kembali seperti halnya pula tradisionalisme. Nasionalisme Tiongkok cenderung mengagung-agungkan negara Tiongkok yang sangat tersentralisasi dan kuat. Pemerintah berusaha untuk memenangkan dan mempertahankan kesetiaan warga negaranya serta orang-orang Tiongkok yang baru-baru ini pindah ke luar negeri. Sebuah buku laris baru-baru ini China Can Say No mengungkapkan sebuah sentiment yang mendukung sebuah cara Tiongkok yang unik yang, dengan terus terang, tidak perlu melibatkan norma-norma Amerika, seperti individualisme dan liberalisme Barat. Selain itu, nasionalisme Tiongkok masih mungkin akan berkembang, karena generasi para pemimpin Tiongkok akan bertumbuh dalam lingkungan yang dipenuh dengan semangat nasionalisme.

Sejak 1990-an, telah muncul gerakan neo-konservatif di Tiongkok (tidak ada kaitannya dengan gerakan neo-konservatif di AS).

3. Aliran Sosialisme

Sosialisme (serapan dari bahasa Belanda: socialisme) adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial atas ekuitas. (O'Hara, 2003) Ada banyak varian sosialisme dan tidak ada definisi tunggal yang merangkum semuanya, (Lamb & Docherty 2006) dengan kepemilikan sosial menjadi elemen umum yang dimiliki berbagai variannya. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme. (Arnold, 1994) Menitikberatkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan peran

negara dalam kesejahteraan rakyat, dengan tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Friedrich Engels.

Sistem sosialis dibagi menjadi dua, dalam bentuk nonpasar dan pasar. Sosialisme nonpasar melibatkan penggantian pasar faktor dan uang dengan kriteria teknis berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam bentuk barang, dan dengan demikian menghasilkan mekanisme ekonomi yang berfungsi sesuai dengan hukum ekonomi yang berbeda dari kapitalisme. Sosialisme nonpasar bertujuan untuk menghindari ketidakefisienan dan krisis yang secara tradisional diasosiasikan dengan akumulasi kapital dan sistem profit. (Prychito, 2002)

Sebaliknya, sosialisme pasar mempertahankan penggunaan harga moneter, pasar faktor; dan dalam beberapa kasus, motif profit, sehubungan dengan operasi perusahaan yang dimiliki secara sosial dan alokasi barang modal di antara mereka. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan ini akan dikelola secara langsung oleh tenaga kerja dari masing-masing perusahaan, atau diberikan ke masyarakat luas dalam bentuk dividen sosial. Perdebatan kalkulasi sosialis memperhatikan kelayakan dan metode alokasi sumber daya bagi sistem sosialis. (Marangos, 2004)

Politik sosialis berorientasi baik internasionalis dan nasionalis; diorganisir melalui partai politik dan menentang politik partai; di satu waktu tumpang tindih dengan serikat pekerja, pada waktu lain independen dan kritis terhadap serikat; serta ada di negara terindustrialisasi dan berkembang. Berasal dari gerakan sosialis, demokrasi sosial telah merangkul ekonomi campuran dengan pasar yang mencakup intervensi negara yang substantif dalam bentuk redistribusi pendapatan, regulasi, dan negara kesejahteraan. Demokrasi ekonomi mengusulkan semacam sosialisme pasar di mana terdapat kontrol yang lebih terdesentralisasi atas perusahaan, mata uang, investasi, dan sumber daya alam. (Newman, 2005)

Gerakan politik sosialis mencakup serangkaian filsafat politik yang berasal dari gerakan revolusioner pertengahan hingga akhir abad ke-18, dan karena adanya kepedulian terhadap masalah sosial yang terkait dengan kapitalisme. Pada akhir abad ke-19, setelah karya Karl Marx dan kolaboratornya Friedrich Engels, sosialisme telah menjadi oposisi terhadap kapitalisme dan menganjurkan sistem pascakapitalis yang didasarkan pada suatu bentuk kepemilikan sosial atas alat produksi. (Gasper, 2005).

Pada 1920-an, demokrasi sosial dan komunisme menjadi dua kecenderungan politik dominan di gerakan sosialis internasional. Pada masa tersebut sosialisme muncul sebagai "gerakan sekuler paling berpengaruh pada abad ke-20 di seluruh dunia. Sosialisme adalah

ideologi politik (atau pandangan dunia), gerakan politik yang luas dan terpecah-pecah"[33] dan ketika kebangkitan Uni Soviet sebagai negara sosialis nominal pertama di dunia menyebabkan menyebarnya asosisasi sosialisme dengan model ekonomi Soviet, beberapa ekonom dan intelektual berpendapat bahwa dalam praktinya model tersebut berfungsi sebagai bentuk kapitalisme negara, administrasi tidak terencana atau ekonomi komando. (Ellman, 2007)

Partai dan gagasan sosialis tetap menjadi kekuatan politik dengan berbagai tingkat kekuatan dan pengaruh di semua benua, serta memimpin pemerintahan nasional di banyak negara di dunia. Saat ini, beberapa sosialis juga mengadopsi prinsip dari gerakan sosial lain, seperti lingkungan, feminisme dan progresivisme. (Sheldon, 2001)

Pemikiran sosialis awal mengambil pengaruh dari beragam filsafat seperti republikanisme sipil, rasionalisme Pencerahan, romantisisme, bentuk-bentuk materialisme, Kekristenan (baik Katolik dan Protestan), hukum alam, hukum alam dan teori hak-hak kodrati, utilitarianisme, dan ekonomi politik liberal. Dasar filsafat lain bagi banyak sosialisme awal adalah munculnya positivisme selama Pencerahan Eropa. Positivisme berpendapat bahwa baik dunia alam dan sosial dapat dipahami melalui pengetahuan ilmiah dan dianalisis menggunakan metode ilmiah. Pandangan inti ini mempengaruhi ilmuan sosial awal seperti Peter Kropotkin sampai teknokrat seperti Henri de Saint-Simon. (Vincent, 2010)

Kaum sosialis memadang kreativitas sebagai aspek esensial dari sifat manusia dan mendefinisikan kebebasan sebagai keadaan di mana individu dapat mengekspresikan kreativitas mereka tanpa hambatan baik dari kelangkaan materi atau institusi sosial yang koersif. (Russell, 1932) Konsep sosialis atas individualitas dengan demikian terkait dengan konsep ekspresi kreatif individu. Karl Marx percaya bahwa perluasan tenaga produktif dan teknologi adalah dasar bagi perluasan kebebasan manusia; dan bahwa sosialisme sebagai sistem yang konsisten dengan pengembangan teknologi modern, dapat memungkinkan berkembangnya "individualitas bebas" melalui pengurangan progresif waktu kerja yang diperlukan. Pengurangan waktu kerja yang diperlukan sampai minimal akan memberikan individu kesempatan untuk mengejar pengembangan kepribadian dan kreativitas mereka yang sebenarnya. (Marx, 1857-1861)

4. Aliran Komunisme

Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan

bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara, merupakan bentuk radikal dari sosialisme yang menolak kepemilikan pribadi dan mendukung sistem ekonomi tanpa kelas. Tokohnya Karl Marx, dan Vladimir Lenin. (Engels, 1847)

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Komunis Internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunisme internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme–Leninisme". Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran partai komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, tetapi pengorganisiran buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. (Marx, dan Engels, 2002-2006)

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Pada prinsipnya semua adalah direpresentirkan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Prinsip komunisme adalah: *Pertama*, Materialisme Historis: Komunisme berlandaskan pada analisis materialisme historis, yang melihat sejarah sebagai hasil dari perkembangan ekonomi dan konflik kelas. Marx berpendapat bahwa seluruh sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas antara mereka yang memiliki alat produksi dan mereka yang tidak. Kritik Terhadap Kapitalisme: Kapitalisme dianggap tidak adil karena menciptakan ketimpangan ekonomi yang besar antara kelas borjuis (pemilik modal) dan kelas proletar (buruh). Marx dan Engels mengemukakan bahwa kapitalisme pada akhirnya akan mencapai titik kehancuran karena eksploitasi dan ketegangan kelas yang tidak berkesudahan. (Maerani, 2016)

Kedua, Dialektika Kelas: Dalam filsafat komunisme, ada pandangan bahwa setiap sistem sosial-ekonomi akan melahirkan

kontradiksi internal yang kemudian akan memunculkan sistem yang baru melalui revolusi. Di sini, kapitalisme diyakini akan digantikan oleh sosialisme, yang pada akhirnya berkembang menjadi komunisme. (Rosdiyanti dan Abustam, 2020)

Ketiga, Kepemilikan Kolektif: Komunisme menuntut kepemilikan kolektif atas alat produksi (tanah, pabrik, dan sumber daya alam) untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dengan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat produksi, Marx meyakini bahwa eksploitasi buruh akan terhenti, dan distribusi kekayaan akan lebih merata. (Rosdiyanti dan Abustam, 2020)

Keempat, Masyarakat Tanpa Negara dan Tanpa Kelas: Visi akhir dari komunisme adalah terciptanya masyarakat tanpa kelas di mana negara tidak lagi dibutuhkan karena tidak ada lagi pertentangan kelas. Dalam masyarakat komunis ideal, negara akan lenyap dengan sendirinya karena fungsi pengendalian yang dijalankan negara tidak lagi diperlukan. (Rosdiyanti dan Abustam, 2020)

5. Aliran Fasisme

Fasisme adalah ideologi politik dan gerakan sayap kanan ekstrem, otoritarianisme, dan ultranasionalistik, yang ditandai dengan kepemimpinan bak diktator, otokrasi yang terpusat, militerisme, pemberangusan paksa terhadap oposisi, kepercayaan terhadap adanya hierarki sosial, penghilangan hak-hak individu atas nama kebaikan negara dan ras, serta penyeragaman dan pengontrolan luar biasa terhadap masyarakat dan ekonomi. (Turner, 1975) Ideologi otoriter yang menekankan nasionalisme ekstrem dan kekuasaan mutlak pemerintah. Tokohnya Antara lain Benito Mussolini dan Adolf Hitler.

Fasisme mulanya mencuat di Eropa awal abad ke-20. Gerakan fasis pertama muncul di Italia pada masa Perang Dunia I, sebelum menyebar ke negara Eropa lainnya, khususnya Jerman. Fasisme juga memiliki pendukungnya di luar Eropa. Berbeda dengan anarkisme, demokrasi, pluralisme, liberalisme, sosialisme, and Marxisme, fasisme berada dalam sayap kanan-jauh dalam spektrum politik kiri-kanan tradisional. (Griffin, 1995)

Kelompok fasis memandang Perang Dunia I sebagai sebuah revolusi yang membawa perubahan masif bagi cara berperang, masyarakat, negara, dan teknologi. Kemunculan perang total dan mobilisasi massal masyarakat menghapuskan perbedaan antara warga dan pejuang perang. Kewarganegaraan militer muncul di mana seluruh warga negara terlibat dengan militer dalam cara tertentu. Perang mengakibatkan bangkitnya negara adidaya yang mampu

menggerakkan jutaan orang-orang untuk mengabdi di garis depan pertempuran dan menyediakan logistik untuk mendukung mereka, disertai dengan otoritas tak terhingga untuk mengintervensi kehidupan warganya. (Blamires, 2006)

Dalam pola pikir fasis, musuh berada di mana-mana, baik di medan perang maupun dalam bangsa sendiri sebagai elemen yang tidak sesuai dengan ideologi fasis, sehingga keberadaan pemimpin dan militer adikuasa sangat penting, serta hak-hak individu dihilangkan demi untuk mencapai tujuan menghancurkan musuh, yang biasanya dikonstruksikan dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain. (Duille, 2016)

Fasisme menolak pandangan bahwa kekerasan sepenuhnya buruk dan memandang imperialisme, kekerasan politik, dan perang sebagai cara untuk membangkitkan kembali suatu negara. Fasis seringkali mendorong berdirinya negara satu partai yang totalitarian, dan ekonomi dirigiste, dengan tujuan utama untuk mencapai autarki (swasembada ekonomi nasional) melalui kebijakan ekonomi proteksionis dan intervensionis. Otoritarianisme dan nasionalisme yang ekstrem dalam fasisme seringkali bermanifestasi menjadi kepercayaan terhadap adanya kesucian ras atau ras unggul, yang biasanya berbumbu rasisme atau diskriminasi terhadap sekelompok "Kaum" atau "Orang lain" yang dianggap jahat, seperti Yahudi. Gagasan semacam ini telah memotivasi rezim fasis untuk melakukan genosida, pembantaian, pembunuhan massal, pemandulan paksa, dan deportasi paksa. (Kallis (2011); Paxton (1998); Lancaster (2011).

Sejak akhir Perang Dunia II pada 1945, sedikit partai yang telah mendeskripsikan diri mereka sendiri sebagai fasis; istilah ini lebih sering digunakan sebagai ejekan oleh oposisi politik. Deskripsi neo-fasisme atau pasca-fasis terkadang dipakai untuk menggambarkan partai modern dengan ideologi yang mirip atau berakar dari gerakan fasis abad ke-20. Beberapa kelompok oposisi menggunakan label anti-fasis atau antifa untuk menegaskan sikap mereka. (Bogel-Burroughs, Nicholas; Garcia, Sandra E, 2020)

Fasisme didirikan oleh sindikalis nasional Italia dalam Perang Dunia I yang menggabungkan pandangan politik sayap kiri dan sayap kanan, tetapi condong ke kanan di awal 1920-an. Para sarjana umumnya menganggap fasisme berada di paling kanan. Fasisme meninggikan kekerasan, perang, dan militerisme sebagai upaya memberikan perubahan positif dalam masyarakat, dalam memberikan renovasi spiritual, pendidikan, menanamkan sebuah keinginan untuk mendominasi dalam karakter orang, dan menciptakan persaudaraan nasional melalui dinas militer. Fasis kekerasan melihat perang sebagai

tindakan yang menciptakan regenerasi semangat, nasionalisme dan vitalitas.

Fasisme adalah antikomunisme, antidemokratis, antiindividualis, antiliberal, antiparlemen, antikonservatif, antiborjuis, antiproletar, dan anti-kapitalis. Dalam banyak kasus, Fasisme menolak konsep-konsep egalitarianisme, materialisme, dan rasionalisme yang mendukung tindakan, disiplin, hierarki, semangat, dan keinginan. Dalam ilmu ekonomi, fasis menentang liberalisme (sebagai gerakan borjuis) dan Marxisme (sebagai sebuah gerakan proletar) untuk menjadi ekonomi berbasis kelas eksklusif gerakan Fasis ini. Ideologi mereka seperti yang dilakukan oleh gerakan ekonomi trans-kelas yang mempromosikan penyelesaian konflik kelas ekonomi untuk mengamankan solidaritas nasional. Mereka mendukung sistem ekonomi nasional yang terintegrasi dan diatur multi-kelas.

Fasisme biasanya digambarkan sebagai ideologi yang ditempatkan pada spektrum politik konvensional kiri-kanan. Ada sebuah konsensus ilmiah bahwa fasisme dipengaruhi oleh baik kiri dan kanan, konservatif dan antikonservatif, nasional dan supranasional, rasional dan antirasional. Sejumlah sejarawan telah menganggap fasisme baik sebagai doktrin sentris revolusioner, sebagai sebuah doktrin yang mencampurkan antara filsafat kiri dan kanan, atau sebagai kedua hal tersebut.

Ada faksi dalam Fasisme Italia pada kedua sisi kiri dan kanan. Akomodasi hak politik menjadi Fasisme di awal 1920-an menyebabkan terciptanya sejumlah faksi internal dalam gerakan Fasis Italia. "Kiri Fasis" termasuk Angelo Oliviero Olivetti, Sergio Panunzio, dan Edmondo Rossoni, yang berkomitmen untuk memajukan sindikalisme nasional sebagai pengganti liberalisme parlemen dalam rangka untuk memodernisasi ekonomi dan memajukan kepentingan pekerja dan masyarakat umum. Yang "Kanan Fasis" termasuk anggota paramiliter fasis "Squadristi" dan mantan anggota Asosiasi Nasionalis Italia (ANI) Squadristi ingin mendirikan fasisme sebagai sebuah kediktatoran lengkap, sedangkan mantan anggota ANI, termasuk Alfredo Rocco, mencari negara korporatis otoriter untuk menggantikan negara liberal di Italia, sementara tetap mempertahankan elite yang ada. Ada juga faksi-faksi lebih kecil di dalam gerakan Fasis Italia, seperti "Fasis ulama" yang berusaha untuk mengalihkan fasisme Italia dari anti-Katolik untuk menerima Katolik. Ada juga "Fasis monarki" yang berusaha untuk menggunakan fasisme untuk membuat sebuah monarki absolut di bawah Raja Victor Emmanuel III dari Italia.

Sejumlah gerakan fasis menggambarkan diri mereka sebagai "kekuatan ketiga" di luar spektrum politik tradisional Mussolini

dipromosikan. Ambiguitas tentang posisi fasisme dalam rangka untuk mengerahkan banyak orang itu mungkin, mengatakan fasis dapat "bangsawan atau demokrat, revolusioner dan reaksioner, kaum proletar dan antiproletarian, pasifis dan antipasifis". Mussolini menyatakan sistem ekonomi Fasisme Italia yang korporatisme dapat diidentifikasi sebagai kapitalisme negara atau sosialisme negara, yang dalam kedua kasus terlibat" birokratisasi dari kegiatan ekonomi bangsa "dijelaskan. Fasisme Mussolini dalam bahasa apapun ia menemukan berguna. Pemimpin Falangis Spanyol José Antonio Primo de Rivera adalah kritis dari kedua politik sayap kiri dan sayap kanan, sekali mengatakan bahwa "pada dasarnya Hak berdiri untuk memelihara struktur ekonomi, meskipun salah satu yang tidak adil, sedangkan Waktu singkatan dari upaya untuk menumbangkan bahwa struktur ekonomi, meskipun subversi daripadanya akan memerlukan penghancuran banyak hal yang bermanfaat".

6. Aliran Anarkisme

Anarkisme adalah filsafat politik yang menyatakan bahwa kelas pemerintahan (Walt dan Schmidt, 2009), dan negara bersifat tidak diinginkan, tidak penting, dan berbahaya (Malatesta, 2012) dan (Slevin, 2003); dalam definisi lain, anarkisme melawan otoritas dan organisasi hierarkis dalam perilaku hubungan antarmanusia, seperti dikemukakan oleh (Ward, 1966) dan Brown, 2002). Inti pemikirannya adalah menolak semua bentuk pemerintahan dan mendukung kebebasan individu secara mutlak. Tokoh: Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin.

Pendukung anarkisme, yang disebut anarkis, mendukung masyarakat tanpa negara yang didasarkan pada perhimpunan sukarela non-hierarkis. Akan tetapi, berbagai aliran pemikiran anarkis dapat berbeda-beda secara mendasar, mulai dari individualisme ekstrem hingga kolektivisme penuh. (Slevin, 2003). Biasanya, berbagai aliran ini dibagi menjadi kategori dualistik, seperti anarkisme sosial atau anarkisme individualis; juga termasuk anarkisme hijau dan anarkisme pascakiri. (Kropotkin, 2002)

Anarkisme adalah sebuah ideologi sayap kiri jauh. (Brooks, 1994) dan (Kahn, 2000). Kebanyakan filsafat ekonomi dan hukum anarkis berdasar pada interpretasi-interpretasi anti-otoritarian, antinegara, dan libertarian terhadap sistem politik sayap kiri radikal dan sosialis seperti antara lain komunisme, kolektivisme, pasar bebas, individualisme, mutualisme, partisipisme dan sindikalisme, termasuk juga filsafat-filsafat sosialis libertarian lainnya. Pada titik tertentu, "aliran-aliran pemikiran kolektivis, komunis, dan liberal dan individual

yang menjadi hulu inspirasi kaum anarkis mulai menciptakan tegangan dan pemisahan antara aliran-aliran anarkis yang berbeda."(Mark Bevir (ed), 2010)

Antropolog David Graeber mencatat bahwa sementara kebanyakan aliran-aliran pemikiran Marxis selalu memiliki pencetus (seperti Leninisme, Trotskyisme dan Maoisme), aliran-aliran pemikiran anarkisme "hampir selalu muncul dari sejenis prinsip atau praktik organisasional". Sebagai contoh, ia mengedepankan anarkosindikalisme, anarkisme individualis, serta platformisme. (Graeber and Grubaci, 2008)

Dekade-dekade akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan zaman kejayaan dalam sejarah anarkis (Levy, 2004). Dalam era klasik ini, yang secara kasar dapat didefinisikan menjadi dekade 1840-an (Levy, 2019) atau 1860-an (Cornell, 2016) hingga 1939 (Levy, 2004), anarkisme memainkan peranan penting dalam perjuangan kelas pekerja, di sisi Marxisme di Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia, serta Australia (Levy, 2004) dan (Moya, 2015). Modernisme, migrasi massal, rel kereta api dan akses percetakan, semua perkembangan teknologi ini membantu kaum anarkis mengembangkan gerakan mereka. (Moya, 2015)

7. Aliran Demokrasi

Demokrasi, adalah suatu pemerintahan yang mana rakyat ikut serta memerintah (modergen), secara langsung yang terdapat pada masyarakat- masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun tidak langsung (representatif), yang terdapat dalam negara-negara modern. Dengan demikian, demokrasi itu pada hakikatnya menunjukkan pada cara atau sistem serta yang mana sistem itu dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berlandaskan partisipasi rakyat, kebebasan politik, dan supremasi hukum. Tokoh: Montesquieu, Alexis de Tocqueville.

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik. Di era modern ini, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik yang menjamin kebebasan, kesetaraan dan kesejahteraan rakyat. Lebih dari setengah negara di dunia saat ini menerapkan sistem demokrasi.

Selain pengertian demokrasi secara umum, banyak ahli dan tokoh yang juga memberikan pandangan mereka tentang makna demokrasi. Berikut adalah beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli: Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln berpendapat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lincoln menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. (Abraham Lincoln). Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik. (Aristoteles)

Menurut Dahl, demokrasi ditandai dengan adanya partisipasi efektif, persamaan hak pilih, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa. Dahl menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. (Robert A. Dahl) Kelsen mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Ia berpendapat bahwa dalam demokrasi, keputusan diambil oleh mayoritas namun tetap melindungi hak-hak minoritas. (Hans Kelsen)

Menurut Schumpeter, demokrasi adalah sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Schumpeter menekankan peran penting pemilihan umum yang kompetitif dalam sistem demokrasi. (Joseph Schumpeter) Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pemerintah secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. (Sidney Hook) Affan Gaffar mengartikan demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif menekankan ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Sementara demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis. (Affan Gaffar)

Dari berbagai pengertian demokrasi menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi pada intinya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan dan hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih.

Dalam sejarahnya, konsep demokrasi pertama kali dipraktikkan di negara kota (polis) Athena pada abad ke-5 SM. Saat itu, seluruh warga Athena berkumpul untuk membahas dan memutuskan masalah

politik. Namun demokrasi langsung ini hanya melibatkan warga laki-laki dewasa, tidak termasuk perempuan, budak, dan pendatang. Seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi terus berkembang dan mengalami transformasi. Pada abad pertengahan, gagasan demokrasi sempat redup di bawah dominasi sistem monarki dan feodal.

Namun, pada era Pencerahan di abad ke-18, pemikiran tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kedaulatan rakyat mulai berkembang kembali. Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis menjadi momen penting dalam perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Pada abad ke-20, demokrasi semakin menyebar ke seluruh dunia, terutama pasca Perang Dunia II. Saat ini, lebih dari setengah penduduk dunia hidup di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Konsepsi pemikiran politik merupakan kerangka pemikiran atau gagasan yang menjadi dasar dalam memahami, menafsirkan, dan menjalankan kekuasaan pemerintah serta hubungan antar negara dan hubungan antar warga negara. Konsepsi pemikiran politik tidak hanya penting dalam memahami teori tetapi harus membentuk perilaku dan kesadaran warga negara. Konsepsi pemikiran politik juga merupakan hal penting bukan saja untuk para politisi namun merupakan hal yang sangat penting bagi warga negara, karena sebagai warga negara harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan, menyikapi ketidak adilan dalam kehidupan serta mampu berpartisifasi dalam kehidupan politik.

Dari paparan yang disajikan diatas kunci dari konsep pemikiran politik paling tidak berbicara tentang: *Kekuasaan*, bagaimana bisa mempengaruhi warga negara dengan cara yang baik dan benar. *Kedaulatan*, bagaimana mempraktekan suatu kedaulatan dengan berbasis keadilan, karena kedaulatan merupakan kewenanagan tertinggi dalam mengatur suatu komunitas dalam suatu wilayah. Mengapa demikian sebab disamping kedaulatan perlu juga adanya *Legitimasi*, yang merupakan penerimaan masyarakat terhadap otoritas dari yang memerintah.

BAB 3 NILAI-NILAI BUDAYA SUNDA DALAM POLITIK

Budaya Sunda memiliki seperangkat nilai yang diwariskan secara turun temurun serta memiliki peran penting dalam membentuk perilaku social termasuk di dalam dunia politik. Nilai ini bukan hanya mempengaruhi cara masyrakat Sunda berpartisipasi dalam politik saja tetapi juga membentuk etika kepemimpinan serta tata kelola kepemerintahan atau Governance. Kiranya kajian ilmu politik nilai-nilai budaya lokal seperti halnya budaya sunda dapat dikatagorikan dalam budaya politik yang mencakup nilai-nilai dalam pola sikap, norma-norma, dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku politik baik individu maupun kelompok. Terkait dengan hal tersebut, memahami bagaimana nilai-nilai budaya Sunda diterapkan dalam aktivitas politik merupakan hal yang cukup penting dalam rangka melihat bagaimana politik lokal beradaptasi dalam sistem demokrasi kekinian.

Sunda memiliki sejumlah budaya yang khas seperti: Kesopanan (handap asor), rendah hati terhadap sesama; Penghormatan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih kecil (*hormat ka nu luhur, nyaah kanu leutik*); dan Membantu orang lain yang membutuhkan dan yang dalam kesusahan (*nulung kanu butuh, nalang ka nu susah*). Hal ini paling tidak pemimpin yang baik harus hadir untuk membantu masyarakat terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Dalam kaitan politik pling tidak implementasi kebijakan publiknya harus berpihak kepada kelompok yang miskin dan kaum marginal.

Secara umum, masyarakat Jawa Barat dan Banten atau Tatar Sunda, sering dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya religius. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo *“silih asih, silih asuh, silih asah”* (saling mengasihi, saling mempertajam diri, saling memelihara dan melindungi). Prinsip ini menekankan akan pentingnya pendidikan, kasih sayang serta perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Dalam implementasinya tentu saja pemimpin harus mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban politik, menyayangi rakyat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta melindungi rakyat dari ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

Pada dasarnya manusia sunda sebagai pribadi sadar akan keberadaannya di tengah masyarakat, yang harus mampu berinteraksi

dengan cara berguru pada masyarakat, agar mampu berperilaku baik dan berperangai baik pula. Pandangan hidup manusia sunda dalam hubungan dengan lingkungan masyarakatnya tertuang dalam *serat ceuli ulah barang denge, mo ma nu sieup didenge, mata ulah barang deuleu, me mo nu sieup di deuleu, kulit ulah dipake gulang gasehan ku panas ku tiis, letah ulah salah nu ngarasakeun, irung ulah salah ambeu, sungut ulah barang carek, leungeun ulah barang cokot, suku ulah barang tincak, payu ulah dipake keter* (pelepasan jangan dibuat gemeteran), *baga ulah dipake kancoleh* (kelamin jangan dibuat untuk berzinah).

Pandangan hidup manusia dengan alam tergambar dalam serat *lamun urang pulang ka dayeuh, ulah ngising dipinggir jalan, disisi imah di tungtung caangna, bisi kaambeu ku menak ku gusti. Sunguni tungtu nu rongah-rongah, bisi kusumbah kapadekeun...ngisingmah tujuh lengkah ti jalan, boa mu nemu picarekeun sakalih, ja urang nyaho di ulah pamali* (bila kita datang ke kota, jangan buang hajat sembarangan, disamping rumah, ditempat yang terang, takut kalau2 tercium oleh pejabat dan raja. Timbuni dan tutuplah bagian yang berlubang itu, agar tidak kena serapah akhirnya...buang hajat harus tujuh langkah dari sisi jalan, buang air kecil harus tiga langkah agar tidak mendapat marah dari semuanya, karena kita tahu pada larangan dan pantangan).

Kehidupan sebagian besar orang Sunda adalah bertani, disamping itu juga menangkap ikan dan berdagang. Karena jumlah tanah yang terbatas, maka cukup banyak yang menjadi buruh tani. Hidup penduduknya cukup santai, dan karena itu cukup tersedia waktu untuk berkesenian. Tanah Sunda termasuk yang cukup subur di Indonesia, sehingga Koes Plus mengatakan “Tongkat kayu pun bisa jadi tanaman.”

Secara umum yang disebut orang Sunda itu adalah mereka yang sehari-hari mempergunakan bahasa Sunda dan menjadi pendukung kebudayaan Sunda. Orang Sunda dikenal ramah, periang, optimistis, sopan, dan cenderung menjalani keseharian yang sederhana. Bangsa Portugis juga mencatat dalam *Suma Oriental*, bahwa orang Sunda memiliki sifat yang pemberani dan jujur. Baik dari adat yang sekarang masih ada, maupun dari naskah-naskah kuno, masyarakat Sunda memperlihatkan kehidupan yang cukup demokratik.

Sepanjang sejarahnya, ternyata bahwa masyarakat Sunda selamanya merupakan masyarakat terbuka yang mudah sekali menerima pengaruh dari luar, tetapi juga kemudian menyerap pengaruh itu sedemikian rupa sehingga menjadi miliknya sendiri. Sejak agama Islam berkembang di Jawa Barat pada sekitar abad ke-15, di

kenal pula Lembaga Pesantren, yang bukan hanya mendalami Islam juga menjadi pusat kehidupan kebudayaan. Ketika kabupaten-kabupaten sudah menjadi alat pemerintah jajahan, maka pesantren bertindak sebagai pusat penggemblengan anti-Belanda. Seperti banyak terjadi di Banten dan Cirebon pada abad ke-18 dan ke-19. Agama Islam merupakan agama yang sejak peng-Islaman Banten dan Cirebon menjadi agama yang di peluk oleh orang Sunda. Pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Sunda sangat besar. Hukum adat yang berlaku di tanah Sunda, sangat mencerminkan pengaruh Islam.

Wujud kebudayaan sunda menurut Hasan Mustapa, mengandung nilai-nilai moral budaya akan sangat beragam. Bentuk ide dan gagasan etnik Sunda yang memuat kandungan nilai-nilai moral antara lain berupa peninggalan tertulis seperti kitab dan prasasti, uga jeung paribasa serta karya kesusastraan (dongeng jeung sasakala, carita pantun, mantra sisindiran, pupujian, sawer, pupuh, wawacan, guguritan, roman dll). Wujud kebudayaan sunda dalam bentuk aktivitas atau tindakan terpola dapat terlihat dari cara berkehidupan yang khas seperti bercocok tanam, pola kehidupan keseharian, kesenian (suara, gerak/tari) seperti karawitan, padalangan atau tarian-tarian lokal dan lain-lain. Sedangkan bentuk kebudayaan Sunda dalam wujud karya fisik etnik Sunda dapat terlihat pada bentuk candi, tugu, rumah dan lat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan pemikiran politik, paling tidak akan membahas 4 (empat) hal, *Pertama*, Kekuasaan, berkaitan dengan, siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana kekuasaan itu digunakannya. *Kedua*, Legitimasi, berkenaan dengan apa dasar sahnya kekuasaan atau pemerintahannya. *Ketiga*, Keadilan, seputar bagaimana tatanan politik dapat memastikan keadilan sosial, ekonomi, dan hukumnya. Serta *Keempat*, Kebebasan dan Kewajiban, tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan individu dengan kebutuhan kolektif masyarakat.

A. Kekuasaan

Berkaitan dengan kekuasaan, paling tidak ada tiga hal yaitu pertama siapa pemilik kekuasaan, cara mendapatkannya dan bagaimana diguna kannya. Berkaitan dengan nilai-nilai Sunda yang menyangkut tentang pemilik kekuasaan atau sumber kekuasaan, terdapat 4 (empat) sumber berdasarkan masa atau pengaruhnya. Pada masa kerajaan Sunda, asal kekuasaan dari keturunan (kekuasaan diwariskan). Pada masa Pra-pengaruh Mataram,

kekuasaan berasal dari kabuyutan (Mandala), yang keramat, adikodrati. Pada masa Pengaruh Mataram, kekuasaan berupa pulung (wahyu) atau nurbuat/cahaya nurbuat. Sementara pada masa Islamisasi (pengaruh Islam), kekuasaan berasal dari keturunan atau silsilah tokoh besar, tokoh agama dan pemberian pusaka/gelar.

Sementara untuk mendapatkan atau syaratnya adalah : Pada masa kerajaan Sunda, syaratnya adalah putra dewata atau putra mahkota. Pada masa Pra-pengaruh Mataram untuk mendapatkannya dengan penguasaan kabuyutan, bertapa di kabuyutan. Pada masa Pengaruh Mataram untuk mendapatkan kekuasaan (tertitisi pulung), dengan melakukan Shalat, Munajat, dan pendekatan Diri kepada Allah SWT. Sementara pada Masa Islamisasi (pengaruh Islam), untuk mendapatkannya Pendirian Kerajaan (Kesultanan Cirebon) dan Hubungan darah, pertalian saudara, kesinambungan kekuasaan.

Sedangkan bagaimana kekuasaan itu digunakan, bisa kita lihat dalam praktek kepemimpinan dan istilah-istilah yang digunakan dalam praktek kepemimpinan atau pengaturan kekuasan. Pada masa kerajaan Sunda, kekuasaan digunakan oleh Raja untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Beberapa contoh keberhasilan raja-raja Sunda dalam mengatur kerajaannya adalah :

Dewawarman, raja pertama dari kerajaan Salakanagara, yang telah berhasil meletakan dasar sistem kerajaan di Nusantara, yang pada awalnya hanya berupa pedukuhan-pedukuhan. Dengan berubahnya pedukuhan menjadi kerajaan, maka kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih tertib dan lebih sejahtera.

Purnawarman (395-434), raja ketiga dari kerajaan Tarumanagara, untuk kesejahteraan rakyat, beliau melakukan pemeliharaan aliran sungai. Tahun 410 M ia memperbaiki alur kali Gangga di Cirebon, memperbaiki alur Kali Cupu di Kerajaan Cupunagara, kali Gomanti serta kali Candrabaga, sehingga ladang-ladang petani menjadi subur, dan tidak lagi mengalami kekeringan ketika kemarau tiba. Raja yang bergelar *Wyagra Tarumanagara* (Maung Tarumanagara), dan namanya ditulis dalam prasasti paling lama memerintah (Prasasti Ciaruteun), juga mendirikan kota Sundapura, membuat pelabuhan angkatan perang, sehingga Tarumanagara setelah di pimpin Purnawarman, angkatan perangnya besar serta lengkap persenjataannya.

Candrawarman (515-535 M), raja ke-6 dari kerajaan Tarumanagara, mengikat kesetiaan raja-raja daerah dengan cara memberi kepercayaan yang lebih banyak kepada mereka. Pemerintahan di daerah di serahkan kembali kepada keturunan yang

berhak atas dasar kesetiaan mereka kepada Sang Maharaja Tarumanagara.

Prabu Anom Tarusbawa (669 M), raja pertama dari kerajaan Sunda, setelah Tarumanagara terpecah menjadi kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Sumbangan yang sangat besar bagi pemikiran politik Sunda adalah munculnya konsepsi Tri Tangtu di Buana. Ketika Tarusbawa dalam setiap mengambil keputusan politik senantiasa meminta pandangan para Rama 9tokoh masyarakat) dan para Resi (para ahli agama). Sehingga dalam pandangan Jacob Sumardjo, Trias Politika Sunda itu adalah pembagian kekuasaan kepada tiga lembaga, yang di Sunda telah lebih dahulu diterapkan sebelum konsep Trias Politica dikumandangkan oleh John Locke dan Montesque, yatu Prabu/Ratu (eksekutif), Rama (Legislatif) dan Resi (Yudikatif).

Sri Baduga Maharaja (Raden Pamanah Rasa atau Jayadewata) yang kemudian dikenal sebagai Prabu Siliwangi, dikenal sebagai Raja yang sangat mengayomi masyarakat serta adil dalam memperlakukan masyarakat. Adilnya Prabu Siliwangi, bukan hanya dalam memanej masyarakat, namun juga mengelola keluarganya, karena dalam beberapa literasi, beliau memiliki 48 orang istri (bahkan dalam Babad Padjajaran yang di tulis Pangeran Kornel, istri Prabu Siliwangi adalah 150 lebih satu). Kontribusi Prabu Siliwangi dalam hal kepemimpinan yaitu munculnya konsep Dasa Pasanta. Kapamingpinan tersebut mengacu kepada naskah kuno Sanghiyang Siksa Kandang Karesian (1518 M) nu di nyutat perilaku Prabu Jayadewata/Siliwangi, ngeunaan tuduh laku tatakrama pikeun jadi pamingpin di masyarakat jaman harita. Eta palanggeran teh disebut Parigeuing a Parigeuing : bisa nitah bisa miwarang, ja sabda arum wawangi, nya mana henteu surah di piwarang. (Nu di sebat parigeuing teh nyaeta bisa marentah bisa miwarang ku caritaan nu pikageunaheun tepi ka teu matak jengkel nu di parentahna). Untuk Melaksanakan parigeuing caranya harus bisa melaksanakan Dasapasanta (Sapuluh Penentram Hati), yaitu: *Guna, Ramah, Hook, Pesok, Asih, Karuni/karunya, Mukpruk, Ngulas, Nyecep, dan Ngala angen.*

Pada masa Sunda berada dalam pengaruh Mataram, ada beberapa tokoh yang telah berhasil menerapkan pemerintahan yang baik, bahkan membela kepentingan masyarakat dari penjajahan. Salah seorang diantaranya adalah *Raden Adipati Surianagara* (1761-1765) atawa Pangeran Kusumah Dinata, anu katelah Pangeran Kornel, bupati Sumedang zaman Belanda. Salaku bupati, Pangeran Kornel katelah bupati nu wijak tur adil, dina mangsa anjeuna janten bupati, kaayaan rahayat Sumedang makmur tur sajehtera. Pangeran Kornel oge katelah bupati nu parigel, jujur, handap asor sarta tetela mampuh

ngangkat darajat urang Sumedang, hal ieu dibuktikeun ku pangakuan Nicolaas Engelhard, waktos harita anjeuna marios kebon kopi di saantero Priangan, anjeuna kantos sindang ka Sumedang. Ngeunaan Sumedang anjeuna nyerat yen Sumedang ti saprak di parentah ku Tumenggung Surianagara langkung maju, daerah nu asalna leuweung ayeuna janten sawarga, sanggemna. Anjeuna nyanggeumkeun yen Tumenggung Surianagara mangrupikeun bupati nu parigel, jujur tur adil. Anjeuna sanes jelema beunghar, tapi teu kokoro manggih mulud, mangpang meungpeung ngumpulkeun kakayaan ngagunakeun jabatan bupatina. Anjeuna hirup basajan sarta nalingakeun rahayatna nu aya di pilemburan. Beliau juga membela rakyat Sumedang, ketika banyak masyarakat Sumedang menjadi korban kebijakan Belanda membangun jalan dari Anyer ke Panarukan, dan harus menembus gunung cadas di daerah Sumedang, dengan menyambut salaman Deandels dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang gagang keris, siaga jika ada negosiasi yang tidak lancer beliau akan menghunuskan kerisnya ke Deandels. Maka kemudian jalan tersebut saat ini dinamakan Cadas Pangeran, dan beliau juga digelari Colonel oleh Belanda, yang sekarang berubah bunyi menjadi Kornel.

Pada masa Islamisasi (pengaruh Islam), muncul seorang tokoh yang bernama *Haji Hasan Mustapa*. Dalam pandangan beliau, seorang Pemimpin itu harus Nyantri-Nyunda-Nyakola. Dinyarana kuring santri, Sapedah bisa ngajina, Dinyarana alim kahot, Pedah getol ngawurukna, Dinyarana bijaksana, Sapedah mulus rahayu, Puguh sagala turunan. Persyaratan yang intinya diacukan kepada tiga hal (nyantri, nyakola, nyunda). Pemimpinan itu harus memiliki kecerdasan spiritual yang disimbolisasikan dengan nomenklatur nyantri. Spiritualitas menjadi harga mati sebagai benteng terakhir agar seorang pemimpin sadar betul bahwa kepemimpinan adalah amanah yang musti dipertanggungjawabkan. Nyakola tidak identik dengan gelar akademik, tidak musti dimaknai dengan strata jenjang-jenjang perkuliahan. Memiliki nalar yang memadai agar apa yang dikatakan dan menjadi bagian dari pengambilan kebijakan benar-benar sebanding lurus dengan hajat publik. Nyunda tidak dimaknai secara reduktif sekadar referensi etnis geografis yang merujuk pada wilayah Pasundan, namun nyunda adalah diksi dengan makna seperangkat nilai-nilai kesundaan yang harus dimiliki oleh para pemimpin dan calon pemimpin. Nilai-nilai itu hakikatnya adalah kearifan lokal inklusif perennial yang juga dimiliki oleh kultur lain.

Disamping itu, terdapat beberapa *babasan* (peribahasa), *ungkara* (ungkapan yang bernilai filosofi), *paramalenyep* (filsafat) yang

berkembang di masyarakat Sunda berkaitan dengan kekuasaan, seperti dibawah ini.

Nilai Sunda Dalam Kekuasaan

KONSEP KEKUASAAN	NILAI SUNDA	*PENJELASAN*
	Nyaur kudu di ukur, nyabda kudu diunggah.	*Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab seseorang harus mempertimbangkan segala sesuatunya (baik dan buruknya) sebelum dilaksanakan.*
	Ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan.	*Orang yang disiplin tidak bisa diintimidasi oleh pihak lain.*
	Nangtung di kariungan ngadeg dikarageman.	*Bisa bersama sama dengan orang orang yang pintar agar supaya terbawa menjadi pintar, maksudnya harus merupakan suatu kesatuan dari pengarahan dalam menajerial.*
	Ulah Ngeupeul ngahuapan maneh	*Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau kelompoknya.* *jangan mementingkan diri sendiri, tapi harus mengedepankan dahulu kepentingan masyarakat.*
	Kudu Ngawula Ka Wayahna.	*Apa yang seseorang kerjakan itulah yang ia dapatkan atau apa yang dia tanam itulah yang dia tuai, penggajian seorang pegawai sesuai dengan apa yang ia kerjakan atau sesuai dengan jabatannya.*
	Kudu bisa lolondokan Kabula Kabale	*Harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.* *bersatunya bermacam macam komunitas, beragam orang dalam satu kesatuan.*
	Nete taraje nincak hambalan. Ngukur kakujur nimbang kaawak. Mangpengkeun kuya kaleuwi. Nilik babari ngeusi.	*Dalam menata segala sesuatu harus berdasarkan hirarki atau menjalankannya tahap demi tahap sesuai dengan tingkatan nya. Mampu memposisikan diri tidak melakukan perilaku yang di buat buat seolah olah merasa setara dengan orang yang lebih tinggi. Menempatkan seorang personil*

		dalam suatu kedudukan yang sesuai dengan kemampuan dan kualitas dirinya. Ditujukan kepada seseorang bila mengerjakan sesuatu tidak sembarangan tetapi melalui tahapan tahapannya.
	Ari diarah supana kudu dipiara catangna.	*Memiliki pemikiran yang terpola/tertib dengan menjalankan kebijakan berupa pemeliharaan barang atau pegawai sekiranya barang dan pegawai tersebut menghasilkan kemaslahatan atau keuntungan bagi masyarakat, dengan kata lain sekiranya barang tersebut bermanfaat tidak melupakan pemeliharaan barang tersebut atau sekiranya seorang pegawai memiliki kebermanfaatan buat masyarakat tidak melupakn konpensasinya buat orang tersebut.*
	Huap hiji diduakeun. Landung kandungan laer aisan.	*Orang yang bisa berlaku adil dan jujur dengan prilaku yang selalu efisien sehingga mampu memenuhi kebutuhan orang-orang atau bisa memenuhi kebutuhan keseharian organisasinya. Ditujukan kepada seseorang yang memiliki sikap bijaksana jujur dan adil.*
	Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak. **Paheuyeuk heuyeuk leungeun, papuntang puntang panangan.**	*Bekerja sama dan selalu bersama sama yang menjadikan tebentuknya komitmen atau merupakan suatu kasih sayang yang disertai saling menjaga dan saling menhormati dalam suatu kesatuan. Kita harus terus bersama sama dan saling menjaga serta saling membela dalam keadaan susah maupun senang.*

B. Legitimasi Kekuasaan

Legitimasi kekuasaan adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral seorang pemimpin atau penguasa untuk memerintah, membuat keputusan, dan mengimplementasikannya. Dengan kata lain, legitimasi menunjukkan seberapa besar masyarakat bersedia untuk menerima dan mematuhi kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin atau penguasa.

Berkenaan dengan legitimasi kekuasaan Sunda, kita bisa melihat dalam praktek yang dilakukan pada masa kerajaan Salakanagara dan

Tarumanagara, dua kerajaan tertua yang dikenal terletak di daerah Jawa Barat. Kerajaan Salakanagara sudah berdiri sejak tahun 130 Masehi, didirikan oleh Dewawarman, setelah beliau mendapatkan warisan untuk mengelola sebuah pedukuhan dan kemudian merubahnya menjadi sistem kerajaan, dengan nama kerajaan Salakanagara, dari mertuanya Aki Tirem yang menjadi panghulu kampung sebelumnya, dan berlangsung selama 8 (delapan) raja. Raja Terakhir Prabu Darmawirya Dewawarman, yang bergelar Dewawarman VIII (340-363) menyerahkan kekuasaan kepada menantunya Jayasingawarman (365-382 Masehi), yang kemudian mengganti nama kerajaan menjadi kerajaan Tarumanagara.

Sementara kerajaan Tarumanagara, menurut naskah Pustaka Pararatwan i Bhumi Jawadwipa, diketahui bahwa kerajaan itu berdiri selama kurang lebih 3 abad (abad ke-4 samai abad ke-7) dan telah berlangsung sekitar 12 kali pergantian raja. Masa puncak kejayaan Tarumanagara terjadi pada masa Raja Purnawarman (394-434). Raja Tarumanagara yang terakhir yaitu Linggawarman mempunyai menantu bernama Tarusbawa. Tarusbawa inilah yang kemudian dikenal sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Sunda yang berkuasa selama kurang lebih 54 tahun (669-723) (Ajip Rosidi dkk., 2000: 649). Namun kerajaan ini menjadi terbelah dua dengan kerajaan Galuh yang didirikan oleh Wreti Kendayun, berpusat di Karang Kamulyan.

Dua kerajaan yang terpisah ini, kemudian dipersatukan oleh Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, yang kemudian lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, menjadi kerajaan Padjdjaran pada tahun 1482 M. Terdapat 6 (enam) raja yang berkuasa di Padjadjaran, yaitu : Sri Baduga Maharaja/Jayadewata (1482-1521 M); Surawisesa (Ratu Sanghyang) (1521-1535 M); Ratu Dewatabuana (1535-1543 M); Ratu Sakti (1543-1551 M); Nilakendra (1551-1567 M), dan Ragamulya Suryakencana (1567-1579 M)

Kerajaan Sunda Padjadjaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan gabungan Banten dan Cirebon yang sedang meluaskan pengaruh Islam. Adanya Kerajaan Salakanagara, Tarumanagara dan Kerajaan Sunda (Galuh, Padjadjaran dan Sumedang Larang) membuktikan bahwa sejak awal masehi masyarakat Sunda mengenal tradisi kekuasaan dan tradisi politik yang cukup stabil dan panjang. Karenanya dapat dikatakan bahwa bila tradisi kekuasaan itu diukur oleh adanya kerajaan Sunda, maka pengalaman politik Sunda telah berlangsung sekitar 14 abad atau lebih.

Sejak kekuasaan kerajaan Sunda ditamatkan oleh pengaruh Islam (abad ke-17), sejarah politik Sunda relatif tidak memiliki kelanjutannya.

Dominasi kerajaan Sunda digantikan kerajaan Islam Cirebon dan Banten. Pasca kemerdekan, warisan faham dan nilai-nilai kekuasaan Sunda tidak menemukan refleksinya dalam sejarah negara modern Indonesia. 20 tahun masa Orde Lama dan 32 tahun Orde Baru, seperti disinyalir oleh Benedict Anderson (1990) dan Fachry Ali (1986), merupakan refleksi dan manifestasi dari faham kekuasaan Jawa. Kebudayaan Sunda nyaris tidak mewariskan nilai-nilai kekuasaan dalam politik Indonesia modern.

Disamping itu, terdapat beberapa babasan, ungkara, paramalenyep yang berkembang di masyarakat Sunda berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, seperti dibawah ini.

Nilai Sunda Dalam Legitimasi Kekuasaan

KONSEP LEGITIMASI KEKUASAAN	NILAI SUNDA	*PENJELASAN*
Kekuasaan	Indung hukum bapa dari gama.	*Dalam melakukan atau melaksanakan sesuatu hal tetap harus bepegang kepada aturan-aturan agama dan aturan negara.*
	Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang kanagara mupakat kabalarea.	*Harus selalu menjujung tinggi hukum dan taat kepada aturan-aturan negara serta bisa bermufakat dengan masyarakat.*
	Kudu ngukur kakujur nimbang ka awak.	*Harus mampu memposisikan diri dalam suatu aktivitas atau organisasi tidak boleh menunjukan perilaku yang dibuatbuat (pencitraan) seolah-olah ingin kedudukannya setarap dengan yang lebih tinggi.*
	Herang caina beunang laukna.	*Berhasil dengan apa yang ingin dicapai tetapi tanpa menyakiti atau merugikan pihak lain.*
	Lamun keyeng tangtu pareng.	*Harus terus mengerahkan kemampuan lahir batin semaksimal mungkin tanpa putus harapan sehinga apa yang diharapkan bisa terlaksana.*

C. Tatanan Politik yang Keadilan

Tatanan politik yang berkeadilan mengacu pada sistem politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, memastikan bahwa semua

orang diperlakukan secara adil, memiliki kesempatan yang sama, dan memiliki hak-hak yang dilindungi. Keadilan dalam konteks politik mencakup keadilan distributif (distribusi sumber daya), keadilan prosedural (proses yang adil), dan keadilan sosial (mengurangi ketidaksetaraan).

Salah satu kekuatan terbesar budaya Sunda adalah tatali paranti (tradisi yang mengikat). Tradisi ini mengajarkan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur, bahkan ketika menghadapi perubahan zaman. Dalam konteks politik, tatali paranti dapat menjadi landasan untuk menciptakan politik yang berkeadaban, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Sebagai entitas budaya, Sunda memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada politik kebangsaan. Dalam budaya Sunda, ada konsep ngajadi bangsa anu adil jeung arif (mewujudkan bangsa yang adil dan bijaksana). Konsep ini selaras dengan kebutuhan politik Indonesia hari ini yang kerap terjebak dalam konflik kepentingan dan polarisasi.

Namun, kontribusi ini hanya mungkin terwujud jika urang Sunda mampu memanfaatkan nilai-nilai budaya mereka sebagai strategi politik, bukan sekadar filosofi. Misalnya, prinsip “caina herang, laukna beunang” (airnya jernih, ikannya tertangkap) dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan politik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.

Disamping itu, terdapat beberapa babasan, ungkara, paramalenyep yang berkembang di masyarakat Sunda berkaitan dengan tatanan politik yang adil, seperti dibawah ini.

Nilai Sunda Dalam Tatanan Politik Yang Adil

KONSEP TATANAN POLITIK YANG BERKEADILAN	NILAI SUNDA	*PENJELASAN*
Keadilan dan Kejujuran	**Huap hiji diduakeun.** **Landung kandungan laer aisan.**	*Orang yang bisa berlaku adil dan jujur dengan prilaku yang selalu efisien sehingga mampuh memenuhi kebutuhan orang orang atau bisa memenuhi kebutuhan keseharian organisasinya. Ditujukan kepada seseorang yang memiliki sikap bijaksana jujur dan adil.*
	Ari diarah supana kudu dipiara	*Memiliki pemikiran yang terpola/tertib dengan menjalankan kebijakan berupa pemeliharaan barang atau pegawai*

	catangna.	*sekiranya barang dan pegawai tersebut menghasilkan kemaslahatan atau keuntungan bagi organisasi,dengan kata lain sekiranya barang tersebut bermanfaat tidak melupakan pemeliharaan barang tersebut atau sekiranya seorang pegawai memiliki kebermanfaatan buat organisasi tidak melupakn konpensasinya buat orang tersebut.*
	Taraje nanggeuh dulang tinande. Ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan.	*Menunjukkan kepada seseorang yang selalu siap menjalankan perintah dan selalu siap menjalankan kewajibannya dalam suatu pekerjaan. Orang yang disiplin tidak bisa diintimidasi oleh pihak lain.*
	Jadi pamingpin sing adil, tong cueut kanu hideung ponténg kanu konéng.	*Jadi pemimpin harus adil jangan memihak pada golongan atau kelompok tertentu*
	Munding dicekel tambangna, jelema dicekel caritannana. Kudu tijin kana jangji ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang.	*Jika berbicara harus jujur dan kalau berjanji harus bisa dipegang dan jangan berkhianat*
	Kudu ngukur ka kujur, nimbang ka awak.	*Harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan*
	Kudu hade gogog hade tagog.	*Harus baik budi bahasa dan tingkah laku*
	Tina peurih jadi peurah.	*Usaha keras akan membuahkan hasil yang baik*

D. Kebebasan Individu dan Kebutuhan Kolektif

Disamping itu, terdapat beberapa babasan, ungkara, paramalenyep yang berkembang di masyarakat Sunda berkaitan dengan Kebebasan Individu dan Kebutuhan Kolektif, seperti dibawah ini.

1. Nilai Sunda Dalam Kebebasan Individu

KEBEBASAN INDIVIDU	NILAI SUNDA	*PENJELASAN*
	Manusa mah hirup ku akalna.	*Manusia hidup dengan mengandalkan kecerdasannya.*
	Kudu ngukur ka kujur, nimbang ka awak.	*Kita perlu mampu beradaptasi dengan situasi di mana kita berada.*
	Luhur budi handap asor, someah hade ka semah.	*Kita perlu memiliki perilaku yang baik, rendah hati, dan menghormati sesama.*
	Kabagjaan teh sanes ku seerna harta, kabajaan teh ayana dina hate nu teu weleh ngucap sukur.	*Kebahagiaan tidak tergantung pada banyaknya materi tetapi kebahagiaan bersumber dari hati yang selalu bersyukur.*
	Jelemamah kumaha amal-amalan sabab melak bonténg bakal jadi bonténg melak cabé bakal jadi cabé.	***Manusia akan memanen dari apa yang dia perbuat. Jika berbuat baik akan menuai kebaikan, jika berbuat buruk akan menuai keburukan)***

2. Nilai Sunda Dalam Kebutuhan Kolektif

KEBUTUHAN KOLEKTIF	NILAI SUNDA	*PENJELASAN*
	Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok.	*Tidak mengapa menjalani kehidupan yang sulit, selama kita tetap bisa bersama dengan keluarga yang kita cintai.*
	Bisa ka bula ka balé hartina bisa campur jeung jelema ti rupa-rupa golongan, bisa kaditu kadieu atawa bisa gawé kasar jeung gawé lemes.	*Bisa bergaul dengan orang dari berbagai golongan, bisa masuk ke sana ke mari, atau bisa bekerja apapun.*
	Cukang tara néangan nu ngising hartina nu butuh nu kudu datang nyampeurkeun.	*Yang butuh yang harus menghampiri.*
	Nepak cai malar cérét	*Membicarakan keburukan orang lain supaya nama baiknya jauh dan terkenal keburukannya.*
	Kudu akur jeung dulur hadé jeung baraya.	*Harus rukun dengan saudara*

	Jadi pamingpin sing adil, tong cueut kanu hideung ponténg kanu konéng.	*Jadi pemimpin harus adil jangan memihak pada golongan atau kelompok tertentu*
	Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak.	*Selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan*

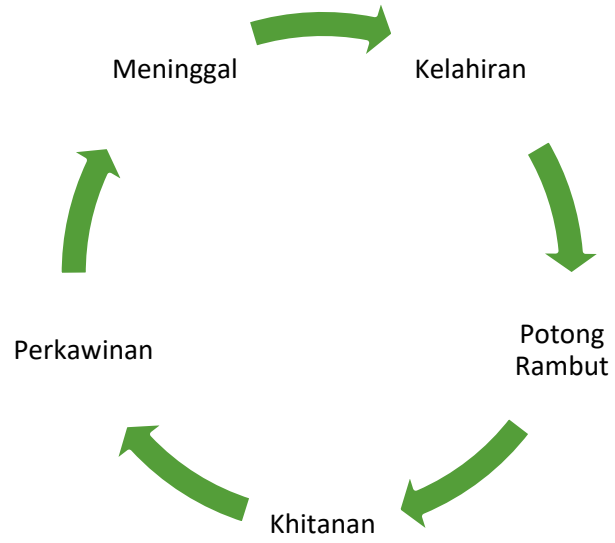
Dari uraian tentang nilai-nilai politik Sunda yang tertulis diatas paling tidak bisa digambarkan bahwa nilai-nilai Sunda dalam politik menekankan prinsip kebersamaan, kejujuran, keberanian, kepedulian dan integritas. Andai kata nilai-nilai tersebut bisa di implementasikan dalam tata kelola pemerintahan/Governance, dimungkinkan akan tercipta sistem politik yang adil, harmonis, serta berpihak pada kepentingna rakyat. Apabila dikaji dalam kondisi kekinian hal ini sejalan dengan nilai-nilai dari konsep Good Governance, dimana pemimpin harus transparan, akuntabel, partisifatif, serta berorientasi pada kepentingan Masyarakat. Bila hal ini diterapkan dalam perpolitikan Indonesia dimungkinkan politik di Indonesia bisa lebih beretika, berbudaya serta tercerminnya kearifan lokal. Namun tantangan politik modern menuntut adaptasi terhadap realitas politik yang semakin dinamis. Oleh karena hal tersebut, diperlukan upaya untuk meng-adumaniskan atau mengharmonisasikan nilai-nilai budaya Sunda dengan strategi politik modern, agar nilai-nilai budaya tersebut relevan serta lestari dalam membangun sistem politik yang lebih berintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB 4 PENGARUH AGAMA DALAM POLITIK SUNDA

A. Pengaruh Agama Dalam Politik Sunda

Agama yang dianut oleh suatu komunitas masyarakat sudah barang tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakatnya termasuk aspek politik didalamnya. Terkait dengan hal tersebut tentu saja agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hal sistem politik dan kepemimpinan dimasyarakatnya. Sejak masa Kerajaan sampai era modern dewasa ini, nilai-nilai keagamaan telah bersatu dengan budaya Sunda (siga gula jeung peueutna) dan menjadi pedoman dalam pemerintahan serta interakasi politik. Pengaruh ini tidak hanya tercermin dalam norma-norma sosial saja, tetapi nampak juga dalam praktek demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi masyrakat dalam praktek perpolitikan.

Sebagian besar masyarakat Sunda beragama Islam. Kehidupan keagamaan dalam masyarakat Sunda tampak di dalam upacara-upacara selamatan yang berhubungan dengan tahap-tahap lingkaran hidup seseorang, mulai dari: Upacara salametan yang sering dilaksanakan merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan YME atas segala karunianya.



Lingkaran Hidup Manusia

Agama Islam mudah diterima oleh orang Sunda karena karakter agama Islam tidak jauh berbeda dengan karakter budaya Sunda yang ada pada waktu itu. Sedikitnya ada dua hal yang menyebabkan agama Islam mudah di peluk oleh orang Sunda. *Pertama*, Ajaran Islam itu sendiri yang sederhana dan mudah diterima oleh kebudayaan Sunda yang juga sederhana. Ajaran tentang Aqidah, ibadah terutama akhlak dari agama Islam sangat sesuai dengan jiwa orang Sunda yang dinamis dan feminis. *Kedua*, kebudayaan asal yang menjadi "bungkus" agama Islam adalah kebudayaan Timur yang tidak asing bagi orang Sunda.

Dalam pandangan Ganjar Kurnia (2004), bisa diterimanya Islam dengan baik di tatar Sunda karena di antara keduanya, yakni Islam dan Sunda, mempunyai persamaan paradigmatik. *Pertama*, Islam memandang dan memahami dunia sebagai ungkapan azas-azas mutlak dan terekam dalam wahyu Allah. *Kedua*, kebudayaan Sunda lama meletakkan nilai-nilai mutlak yang kemudian diwujudkan dalam adat beserta berbagai upacaranya.

Haji Hasan Mustapa (sastrawan Sunda): urang Sunda mah geus Islam samemeh Islam. Hal ini dapat dibuktikan hampir seluruh kehidupan orang Sunda mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Ajaran dan hukum dalam masyarakat Sunda pun disosialisasikan melalui beragam matra kehidupan, seperti seni dan budaya, sebagaimana dapat dilihat pada lelakon pewayangan (wayang golek), lagu-lagu, pantun dan banyolan-banyolan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik sebagai individu dan keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, manusia Sunda harus melaksanakan apa yang wajib dan yang sunah secara berkesinambungan dan simultan sebagaimana terungkap dalam peribahasa fardu kalaku sunat kalampah (yang fardu terlaksana, yang sunah demikian pula).

Pengaruh Arab Islam pun nampak sekali dalam bahasa Sunda, seperti jisim abdi (saya) untuk menyebut diri sendiri yang sepenuhnya diambil dari bahasa Arab. Jism yang berati badan, dan 'abd yang berarti hamba.

Sementara dalam celotehan sederhana namun menyirat kebenaran milik Haji Endang Saefudin Anshori "Islam teh Sunda, Sunda teh Islam" disini kita bisa dengan jelas melihat bahwa Islam memang telah melekat pada masyarakat Sunda secara keseluruhan walaupun tidak menutup kemungkinan orang Sunda juga banyak yang memeluk agama lain, tapi dari segi perilaku orang sunda itu sendiri yang terkenal ramah, murah senyum dan sangat menghargai tamu

membuktikan nilai Islami itu memang ada dan tidak mengenal agama lagi.

Agama Islam dipeluk oleh masyarakat Sunda (Padjajaran) pada abad ke 15. Diawali dengan adanya pernikahan yang kedua antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang putri dari Ki Gedeng Tapa, Syahbandar Cirebon yang juga merupakan santri dari Syekh Kuro (Syekh Hasanuddin) di Karawang. Dari perkawinannya dengan Subang Larang, Prabu Siliwangi (Pamanah Rasa) dikaruniai 3 orang putra, yaitu Pangeran Walangsungsang, Nyai Lara Santang dan Raja Sangara.

Syekh Kuro (Syekh Hasanuddin), memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di tatar Sunda, persahabatannya dengan Ki Gedeng Tapa yang menyebabkan putrinya Subang Larang untuk masantren di Karawang. Hubungan antara Prabu Siliwangi dengan Ki Gedeng Tapa dikarenakan memiliki warisan yang sama dari pendahulu Ki Gedeng Tapa yaitu Ki Gedeng Sindangkasih. Istri pertama dari Prabu Siliwangi adalah Nyi Ambet Kasih, putri dari Ki Gedeng Sindangkasih dan memiliki pengaruh di Padjajaran, sedangkan Ki Gedeng Tapa memperoleh kekuasaan sebagai Syahbandar setelah Ki Gedeng Sindangkasih wafat. Untuk merekatkan hubungan ini, Prabu Siliwangi menikahi Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Tapa.

Subang Larang tidak membina langsung anak-anaknya, namun menitipkannya pada guru-guru agama yang dianggap mampu mendidik putranya. Pangeran Walangsungsang diijinkan untuk berguru ke Syeikh Datuk Kahfi di Gunung Amperan Jati (Cirebon), disini beliau mendapat gelar Samadulloh. Lalu juga berguru yang kedua ke Guru Sanghyang Naga di gunung Cilangkap dan Nagagini di gunung Cangak. Beliau digelari Kamadulloh dan Raden Kuncung.

Akulturasi dan asimilasi antara budaya lokal (Sunda) dengan ajaran Islam telah membentuk warna dan ciri khas pada keberagamaan masyarakat Sunda. Betapa Islam sangat berpengaruh pada tradisi dan budaya Sunda. Karena, sejak pengalaman sejarahnya yang paling awal, masyarakat Sunda senantiasa menempatkan nilai-nilai agama (Islam) pada posisi yang sangat sentral dalam hampir seluruh aspek kehidupannya.

Oleh karena itu, ungkapan "kacida anehna lamun urang Sunda henteu ngagem agama Islam" (alangkah anehnya kalau ada orang Sunda tidak memeluk Islam), dapat dipahami. Meskipun orang Sunda bisa bertoleransi terhadap pluralitas, tetapi dalam keluarga harus tetap berada dalam satu keimanan, yakni iman Islam.

Keberadaan Islam di Tatar Sunda kerap diibaratkan seperti *gula jeung peueutna* (gula dengan manisnya–sesuatu yang tak dapat

dipisahkan). Karena, dalam kenyataannya Islam di Tatar Sunda seiring sejalan dengan *local genius* masyarakat Sunda itu sendiri. Islam lebih mudah berinteraksi dengan sistem dan nilai yang berlaku pada saat itu. Di sinilah titik pertemuan antara Islam dengan kebudayaan Sunda dapat lebih dimaknai.

Islam sebagai *Rahmatal lil Alamin* memang sangat terasa dalam penerapan masyarakat sunda, nilai kesundaan islami seperti *Ulah keok memeh dipacok* mengajarkan pada kita untuk terus ikhtiar, *Tiis ceuli Herang Panon* mengajarkan untuk hidup dalam kerukunan, lalu peribahasa *ulah nyaliksik ka buuk leutik* yang berarti kita tidak boleh memeras rakyat kecil dan masih banyak lagi istilah-istilah masyarakat sunda yang tersirat nilai islami didalamnya.

Ada banyak sekali peribahasa-peribahasa dalam bahasa sunda yang syarat akan nilai tauhidnya, seperti peribahasa *Diri sasampiran awak sampaian* yang artinya segala sesuatu hanya milik Allah, dan lucunya masyarakat Sunda sering juga bersyukur dalam berbagai situasi dengan celotehan khas orang sunda seperti *"Untung tibang geubis teu dugi ka maot"* yang artinya beruntung cuma jatuh tidak sampai meninggal.

Bagi budaya Sunda, bersentuhan dengan budaya asing bukanlah hal yang baru. Jika dilihat jauh ke belakang, *karuhun* (nenek moyang) Sunda telah membuktikan kreativitasnya dalam menghadapi berbagai macam pengaruh dan "tamu" yang datang dari luar, baik itu dari India (Hindu, Budha), Jawa (Mataram), dan Arab (Islam). Dan hasilnya menunjukkan, bahwa jiwa Sunda memiliki kemampuan untuk membuat sintetis yang harmonis. Sunda, bahkan selalu berani berhadap-hadapan dengan jiwa, agama, kepercayaan, dan alam pikiran yang bagaimanapun adanya.

Dalam proses 'perjumpaan' tersebut, Sunda tidak pernah (sepenuhnya) hanyut oleh "suara" tamu. Sebaliknya, ia dapat dengan dinamis dan harmonis membuat apa yang mempengaruhinya itu menjadi khazanah kekayaan budayanya sendiri. Contoh, dalam kosa kata yang awalnya berasal dari "luar", kini sudah sedemikian "*merenah*" bagai bagian integral Sunda. Nama Maman yang khas Sunda itu pun kabarnya berasal dari bahasa Arab, *Iman*. Minah dari kata *mu'minah*.

Cerita Lutung Kasarung, misalnya, dinilai mirip dengan ajaran suluk dalam Islam yang mencita-citakan insan kamil. Legenda Lutung Kasarung disebutkan mirip dengan kisah Isra Miraj Nabi Muhammad saw. dan kisah Nabi Adam as yang "terusir" dari surga karena melakukan hal yang dilarang. Peribahasa silih asah, silih asih, silih asuh juga dinilai mirip dengan pesan dan perintah Allah SWT untuk

saling menyayangi, mengingatkan, dan melindungi antarsesama manusia.

Perkawinan antara adat Sunda dan Islam menggiring akibat tidak saja mencairnya batas-batas eksklusif keduanya, tapi selanjutnya mengonstruksi budaya Sunda itu sendiri. Dalam konteks politik, perkawinan keduanya turut mematangkan budaya politik lokal Sunda. Tidaklah mengherankan jika simbol Sunda dengan Islam dianggap bakal lebih mewarnai orientasi dan perilaku politik orang Sunda dalam menghadapi setiap mementum politik. Masalahnya, dalam pemilu presiden (pilpres) kali ini tak seorang pun capres/cawapres berlatar belakang Sunda sebagai etnis mayoritas di Jabar.

Orang sunda yang terkenal dengan lemah lembutnya dan luwes sering dibanding-bandingkan dengan orang jawa yang memiliki tabiat temperamental, sebenarnya ada kekurangan serta kelebihan dari ciri khas karakteristik orang sunda tersebut, mereka cenderung mengalah apabila menghadapi persaingan namun terkadang juga akan tersulut emosi apabila mengalami penindasan.

Pada masa reformasi sampai sekarang, nilai-nilai Islam bukan hanya diadopsi Dalam norma-norma dalam masyarakat saja tapi juga telah merebah pada pemerintahan, banyak sekali peratuaran yang menunjang terealisasinya dakwah islam dikalangan masyarakat, salah satunya yang baru-baru ini terealisasikan adalah pembangunan Masjid Al-Jabbar, Bandung yang akan menjadi salah satu icon dikota Bandung. Ekspresi keberagaman yang paling kuat ini terasa dari program Peraturan Daerah (Perda), salah satunya yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya. Wasidi Wastomo, dalam kampanyenya sebagai calon bupati merupakan satu-satunya calon yang menyerukan akan memberlakukan syariat Islam dalam pemerintahannya dan setelah terpilih sebagai Bupati Cianjur untuk periode 2001-2006, Wasidi berhasil menepati janjinya dengan merealisasikan program Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah), kemudian dalam SK. Bupati Cianjur No. 34/2001, wasidi membentuk Lembaga Pengkajian Pengembangan Islam yang terdiri dari dari para tokoh-tokoh aktifis Islam dan kyai yang bertujuan untuk merumuskan cara merealisasikan syariat Islam dalam pemerintahan Kabupaten Cianjur. Bukan hanya sampai sana, Wasidi juga kembali mengeluarkan SK No. 451/277/ Asda-1/2001 yang berisikan mengenai petunjuk menjadi anggota Gerbang Marhalah mencangkup:

a. Membiasakan shalat berjamaah.
b. Membudidayakan mengeluarkan zakat/ infak.
c. Meningkatkan kegiatan pengajian di unit kerja.

d. Menciptakan lingkungan islami dan kepada aparatur pemerintah hendak memeberikan suri tauladan yang baik.

Mengenai aspek Islam dalam kebudayaan Sunda, Yat Rospia Brata memberikan penafsiran pada ayat Al-Qur'an pernyataan bahwa orang Sunda sudah Islam sebelum Islam datang, ini bisa kita cermati dari kehidupan, nilai dan norma yang terjadi didalam kehidupan orang Sunda, ini juga direalisasikan dalam kebudayaan Sunda seperti Wayang Golek.

Ajaran Islam yang sering didakwahkan melalui perwayangan sering kali menceritakan agama Islam dan kenegaraan yang berkesinambungan dan kebersamaan yang mencerminkan ketaatan kepada Allah SWT, Raulullah dan Ulil Amri. Kebudayaan Sunda yang sirat akan pendakwahan Agama Islam yaitu banyaknya Syair-syair berbahasa Sunda yang menyirat tentang nilai ketauhidan, syair-syair itu sering diperdengarkan ketika para santri menunggu waktu magrib tiba.

Penjelasan diatas dapat memberikan gambaran pada kita bahwa adat Sunda memang telah selaras dengan ajaran Islam. Banyak sekali adat Sunda yang patut diapresiasi, suasana keberagaman masyarakat Sunda memang terasa sangat kental. Begitupun sebelum Islam datang, mereka seakan telah Islam sebelum Islam datang. Namun perlu diingat, tak seluruhnya Sunda telah tersentuh agama Islam, ada sebuah suku yang sangat menutup diri dari dunia luar dan perubahan, mereka cenderum mempertahankan tradisi leluhur dan hidup sederhana daripada harus mengikuti zaman untuk ikut berubah. Meraka adalah Suku Baduy yang menetap dipedalaman Banten. Tapi ada juga orang Baduy yang ikut juga memmeluk agama Islam. Mereka yang memeluk agama Islam cenderung lebih maju dari orang Baduy luar dan orang Baduy dalam yang tidak memeluk agama Islam, karena mereka masih mampu membaca dan menulis. Untuk dapat memahami Islam mereka sadar bahwa mereka harus memiliki kemampuan membaca dan menulis, untuk itulah sekarang banyak Baduy Muslim yang lebih maju dari Baduy lainnya.

Sensus penduduk pada tahun 2018 menyatakan bahwa 97% orang yang hidup di Jawa Barat adalah beragama Islam. Fenomena tersebut sebagai gambaran dari nilai-nilai Islam dan kekuatan pendidikan yang bernuansa agamis, dalam hal ini orang Sunda seakan memiliki potensi yang yang tidak dimiliki oleh suku lain.

Mencermati pengaruh budaya Islam di Tatar Sunda seakan tidak akan ada habisnya, kedua budaya itu seperti berkaitan satu sama

lain dan saling melengkapi. Budaya Sunda yang memiliki corak khas tersendiri dan begitupun dengan Islam yang juga memiliki sorak tersendiri seakan memberikan wajah baru dalam dunia kebudayaan. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang kredibel, ia bisa menyesuaikan dengan tempat diaman ia diyakini dengan tetap berpegang teguh pada agama dan ajaran Islam yang hak dan benar. Hal ini juga terjadi dengan seluruh daerah yang dikuasai oleh Islam, seperti Eropa yang juga memiliki corak Islamnya tersendiri, lalu Cina dan India, mereka menyesuaikan antara ajaran Islam dengan kebudayaan lokal yang telah menjadi tradisi dan norna yang berlaku di masyarakat setempat.

Dalam penyebaran Islam di Indonesia, para wali bukan hanya dari orang-orang yang memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam seperti Walisongo saja, masih banyak orang yang juga ikut andil dalam penyebarannya, para pedagang dari Arab, Gujarat dan China cukup mendominasi. Banyak dari kalangan para murid yang diasuh oleh para walipun turut serta Dalam penyebaran agama Islam. Dengan banyak faktor yang melatar belakangi mudahnya agama Islam berkembang seperti selarasnya adat dan tradisi setempat dengan ajaran Islam dan factor keterbukaan masyarakat terhadap ajaran yang dibawa oleh para penyebar agama Islam.

Agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk politik Sunda, baik dalam hal kepemimpinan, etika politik, maupun partisipasi masyarakat. Islam, sebagai agama mayoritas di tanah Sunda, telah memperkuat nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat. Namun, tantangan seperti politisasi agama, fanatisme, dan penyalahgunaan kekuasaan harus diantisipasi agar politik Sunda tetap mencerminkan harmoni, integritas, dan kesejahteraan bagi semua. Dengan menjaga keseimbangan antara agama dan demokrasi, politik Sunda dapat terus berkembang sebagai model politik yang beretika, adil, dan inklusif.

Sejak masa kerajaan hingga era modern, nilai-nilai keagamaan telah menyatu dengan budaya Sunda dan menjadi pedoman dalam pemerintahan serta interaksi politik. Pengaruh ini tidak hanya tercermin dalam norma sosial, tetapi juga dalam praktik demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat dalam politik.

B. Sejarah Pengaruh Agama dalam Politik Sunda

Tatar Sunda dari bihari sampai dengan kamari memiliki masyarakat berjiwa ramah toleran disertai keterbukaan, maka tidak heran dari sisi agama masyarakat tatar Sunda memiki ragam agama. Melihat hal tersebut tentu saja agama, terutama agama Hindu, Budha

serta Islam di samping ageman lokal Sunda, memiliki pengaruh dalam segala aspek kehidupan tatar sunda dari bihari sampai dengan kiwari, termasuk berpengaruh dalam tataran politik.

1. Masa Kerajaan Hindu-Buddha (Pra-Islam)

Pada masa Kerajaan Sunda dan Pajajaran, politik dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Raja dianggap sebagai titisan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Konsep "Ratu Adil" atau pemimpin yang bijaksana dan melindungi rakyat sudah dikenal sejak masa ini dan menjadi dasar legitimasi politik.

Kehidupan politik Kerajaan Sunda pada masa Hindu-Buddha, khususnya Kerajaan Sunda Pajajaran, menganut sistem pemerintahan feodal. Raja sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi, didukung oleh para pejabat seperti Mangkubumi (perdana menteri), Mantri (menteri), Wado (pemimpin prajurit), dan Syahbandar (kepala pelabuhan). Raja juga memiliki Putra Mahkota sebagai calon penerus takhta, dan pemerintahan berpindah-pindah dari Galuh, Kawali, dan Pakuan.

Pada masa Kerajaan Pajajaran, tidak terlepas dari kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan Pajajaran yang merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya. Kerajaan ini menganut sistem pemerintahan feodal. Pemimpin mereka adalah prabu atau raja. Selama masa berdirinya Pajajaran, kerajaan ini dipimpin oleh 6 raja, di antaranya adalah: Sri Baduga Maharaja/Prabu Siliwangi (1482-1521); Surawisesa (1521–1535); Ratu Dewata (1535–1543); Ratu Sakti (1543–1551), dan Ratu Nilakendra (1551–1567). Mereka berlima adalah para raja yang menduduki Kerajaan Pajajaran di daerah Pakuan. Pada masa pemerintah Ratu Nilakendra, Pajajaran yang berpusat di Pakuan diserang oleh Sultan Hasanuddin dan anaknya, Maulana Yusuf. Akhirnya, Pajajaran memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Pandeglang. Raja Pajajaran di daerah Pandeglang adalah Raga Mulya (1567–1579) atau Prabu Surya Kencana.

Masa keemasan Kerajaan Pajajaran adalah saat pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Pembangunan pada masa ini menyangkut seluruh aspek kehidupan. Diantaranya adalah: Telaga Besar bernama Maharena Wijaya; Jalan menuju Ibu kota Pakuan dan Wanagiri; Kesatriaan atau asrama prajurit, dan Pamingtonan atau tempat pertunjukan, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran runtuh karena diserang oleh Kesultanan Banten.

Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan pindahnya Palangka Sriman Sriwacana ke Keraton Surosowan di Banten. Ini merupakan tradisi politik agar Pakuan Pajajaran tidak menobatkan raja baru.

2. Islamisasi dan Perubahan Sistem Politik

Islam mulai berkembang di tanah Sunda pada abad ke-16, khususnya melalui Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Konsep kepemimpinan dalam Islam mengubah pandangan masyarakat Sunda terhadap politik, dari kepemimpinan berbasis ketuhanan raja menjadi kepemimpinan berbasis musyawarah dan keadilan. Raja atau sultan tidak lagi dianggap sebagai titisan dewa, tetapi sebagai khalifah yang harus menjalankan amanah Tuhan dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Islamisasi di tanah Sunda membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, terutama dengan masuknya pengaruh Kesultanan Banten. Orang-orang Sunda yang tidak menerima dakwah Islam kemudian dikenal sebagai orang Baduy, yang mempertahankan kepercayaan lama. Sementara itu, Islamisasi juga menyebabkan perubahan dalam struktur sosial-politik, yang tercermin dalam naskah Amanat Galunggung dan adaptasi terhadap tekanan kolonialisme.

Dalam catatan sejarah, Islam datang ke Tatar Sunda seiring dengan datangnya Islam ke Tanah Jawa pada umumnya. Sama seperti di wilayah Jawa yang lain, puncak keberhasilan dakwah Islam adalah pada masa Wali Songo. Di Tatar Sunda, anggota Wali Songo yang menjadi penyebar Islam tersohor, bahkan sampai berhasil mendirikan kerajaan Islam di Cirebon dan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namun demikian, Sunan Gunung Jati bukan orang pertama yang membawa Islam.

Dalam sumber-sumber lokal-tradisional dipercayai bahwa orang yang pertama kali memeluk dan menyebarkan Islam di Tatar Sunda adalah Bratalegawa. Bratalegawa adalah putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau Sang Bunisora, penguasa Kerajaan Galuh. Ia memilih hidupnya sebagai saudagar besar. Karena posisinya itu, ia tebiasa berlayar ke Sumatera, Cina, India, Srilangka, Iran, sampai ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang Muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan ini, Bratalegawa memeluk Islam, kemudian menunaikan ibadah haji dan mendapat julukan Haji Baharudin. Sebagai orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kerajaannya, ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa. Ia kemudian menetap di Ciberon Girang yang saat itu berada di bawah kekuasaan Galuh.

Bila cerita ini menjadi patokan, dapat disimpulkan bahwa Islam pertama kali dibawa ke Tatar Sunda oleh pedagang dan pada tahap awal belum banyak pendukungnya karena masih terlampau kuatnya pengaruh Hindu. Sementara kala waktunya, bila dikaitkan dengan penguasa Kerajaan Galuh Sang Bunisora yang berkuasa selama 14 tahun dari tahun 1357 hingga 1371 M, maka dapat kita ketahui bahwa peristiwa Bratalegawa atau Haji Purwa di atas terjadi sekitar abad ke-14.

Ada pula naskah tradisional lain yang menyebutkan cerita tentang Syekh Nurjati dari Persia. Ia adalah ulama yang datang pada sekitar abad ke-14 bersama 12 orang muridnya untuk menyebarkan Islam di daerah jawa Barat. Atas izin penguasa pelabuhan tempat ia mendarat, ia diperbolehkan menetap di Muarajati (dekat Cirebon) dan mendirikan pesantren di sana. Kisah *ini* terdapat dalam naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari.*

Dalam *Babad Cirebon,* kisah perintis penyebaran Islam hampir mirip dengan cerita Bratalegawa. Hanya saja, tokohnya kali ini adalah Pangeran Walang Sungsang yang dikenal juga dengan nama Ki Samadullah, Ki Cakrabumi, atau Syekh Abdul Iman. Ia adalah anak penguasa Pajajaran Prabu Siliwangi dari istrinya Nyai Subang Larang. Hanya saja, ceritanya kemudian bercampur dengan mitos bertemunya Walangsungsang dengan nabi Muhammad Saw., padahal secara historis terjadi perbedaan zaman yang cukup jauh. Di daerang Priangan tokoh anak Prabu Siliwangi yang dipercaya menyebarkan Islam di Tanah Sunda adalah Kean Santang, dengan cerita yang hampir sama.

Ada lagi kisah tentang ulama yang datang dari Campa (sekitar Vietnam) bernama Syekh Quro. Ia singgah di Karawang bersama-sama dengan kapal Laksamana Cheng Ho. Sementara Cheng Ho melanjutkan misinya, Syekh Quro memilih tinggal di Karawang dan menikah dengan Ratna Sondari putra penguasa Karawang. Ia diizinkan untuk mendirikan pesantren hingga ia dapat menyebarluaskan ajaran Islam secara lebih leluasa.

Sumber-sumber tradisional ini, sekalipun dalam perspektif sejarawan Barat dianggap sebagai sumber yang tidak otoritatif, namun untuk tidak dipercayai secara keseluruhan pun bukan perkara yang tepat. Oleh sebab itu, sebagai informasi permulaan apa yang ditulis dalam sumber-sumber tradisional di atas patut dipertimbangkan.

Bila sumber-sumber ini kita pegang, dapat disimpulkan bahwa Islam telah datang ke Tatar Sunda sejak abad ke-12 atau ke-13. Akan tetapi, sebagaimana umumnya pengembangan agama secara damai, tersebarnya Islam untuk sampai menjadi anutan mayoritas

membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, bila pada abad ke-16, Kerajaan Sunda runtuh, bukan berarti bahwa Islam yang menghancurkannya. Kehancuran Kerajaan Sunda adalah karena kekuatannya secara politik semakin merosot sehingga mudah untuk dihancurkan. Hanya saja, saat itu yang berhadap-hadapan dengan Kerajaan Sunda adalah Kerajaan Banten sehingga banyak yang secara simplisistik menyebutkan bahwa hancurnya simbol "kasundaan" adalah ketika Islam datang. Artinya, peristiwa politik antara Banten dengan Pajajaran harus dilihat dalam konteks perebutan supremasi politik yang tidak selalu harus berkaitan dengan masalah keyakinan, terutama dalam konteks Islamisasi di Tatar Sunda.

3. Peran Ulama dalam Politik Sunda

Ulama memiliki peran besar dalam politik Sunda, baik sebagai pemimpin spiritual maupun sebagai penggerak perlawanan terhadap kolonialisme. Tokoh-tokoh seperti K.H. Zainal Mustafa, K.H. Ahmad Sanusi, dan K.H. Abdul Halim menjadi contoh bagaimana agama dan politik saling terkait dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran ulama dalam politik Sunda sangatlah kompleks dan beragam. Ulama Sunda, sebagai tokoh agama dan pemimpin masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Mereka berperan sebagai penyampai pesan moral, pemberi nasihat, dan juga sebagai pemangku kepentingan dalam berbagai kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat Sunda.

Peran Ulama dalam Politik Sunda: *Pertama*, Penyampai Pesan Moral dan Pembentukan Nilai. Ulama Sunda memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Mereka menyampaikan ajaran agama Islam yang menekankan keadilan, persatuan, dan toleransi, yang kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berpolitik.

Kedua, Pemberi Nasihat dan Penegak Hukum. Ulama Sunda seringkali memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh politik dan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Mereka juga memiliki peran dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan keadilan.

Ketiga, Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Publik. Ulama Sunda seringkali terlibat langsung dalam berbagai kebijakan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mereka berperan sebagai pemangku kepentingan yang memberikan masukan dan memastikan

bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keempat, Peran dalam Pemilihan Umum. Ulama Sunda juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan umum. Mereka dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat terkait calon yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai agama dan keadilan.

Kelima, Penyelesaian Konflik. Ulama Sunda juga berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, baik konflik antar individu maupun konflik yang lebih luas. Mereka menggunakan pendekatan damai dan berdasar pada ajaran agama untuk mencari solusi yang terbaik.

C. Nilai-Nilai Keagamaan dalam Politik Sunda

Nilai-nilai keagamaan, terutama Islam, sangat melekat dalam politik Sunda. Frasa "Sunda teh Islam" menunjukkan bahwa Islam dan budaya Sunda bersinergi, dengan nilai-nilai keagamaan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Agama tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan dan tata kelola politik di masyarakat Sunda.

Mayoritas orang Sunda beragama Islam, dan nilai-nilai keagamaan Islam menjadi bagian integral dari budaya Sunda. Sebagai alternatif, sebagian kecil masyarakat Sunda menganut Sunda Wiwitan, sebuah paham keagamaan lokal yang menekankan keTuhan yang Maha Esa. Konsep "Islam teh Sunda" mencerminkan bahwa Islam dapat diadaptasi dalam kehidupan masyarakat Sunda tanpa kehilangan nilai-nilai lokal, dan sebaliknya, budaya Sunda dapat memperkaya pemahaman tentang Islam, seperti dalam praktik keagamaan dan interaksi social.

Beberapa nilai keagamaan yang mempengaruhi politik Sunda adalah:

a. **Sabilulungan (Gotong Royong dalam Kebaikan).** Sejalan dengan prinsip Islam tentang ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan). Dalam politik, nilai ini mendorong kerja sama antara pemimpin dan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama.
b. **Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)**. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam budaya Sunda, konsep ini tercermin dalam ungkapan "Hade ku omong, jujur ku lampah" (Kebaikan diukur dari ucapan dan tindakan).
c. **Adil jeung Bener (Keadilan dan Kebenaran).** Konsep al-adl (keadilan) dalam Islam menekankan bahwa pemimpin harus berlaku adil tanpa membeda-bedakan rakyatnya. Politik Sunda

mengajarkan “Wani ngarojong nu leres, wani ngalawan nu henteu bener” (Berani membela yang benar, berani melawan yang salah).

d. **Someah ka Semah (Keramahan dan Keterbukaan dalam Berpolitik).** Sejalan dengan Islam yang mengajarkan *akhlaq karimah* (akhlak yang baik) dalam kepemimpinan. Pemimpin Sunda cenderung mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan damai dalam menyelesaikan konflik politik.
e. **Musyawarah Mufakat (Syura dalam Islam).** Islam menekankan pentingnya syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan politik. Dalam politik Sunda, prinsip rembug desa (diskusi bersama) mencerminkan demokrasi partisipatif yang menghargai aspirasi rakyat.
f. **Nyaah ka Lemah Cai (Cinta Tanah Air dan Nasionalisme).** Islam mengajarkan konsep hubb al-wathan (cinta tanah air) sebagai bagian dari iman. Dalam politik Sunda, nilai ini mendorong pemimpin untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dan menghindari politik yang merugikan negara.

D. Pengaruh Agama dalam Perilaku Politik Masyarakat Sunda

Agama juga membentuk perilaku politik masyarakat Sunda, terutama dalam pemilihan pemimpin, partisipasi politik, dan cara menghadapi konflik. Pengaruh agama, khususnya Islam, terhadap perilaku politik masyarakat Sunda sangat signifikan. Budaya politik Sunda yang religius, yang seringkali dipengaruhi oleh ajaran Islam, dapat memengaruhi cara masyarakat Sunda memilih pemimpin dan menentukan pilihan politik mereka. Mayoritas masyarakat Sunda memeluk Islam, dan nilai-nilai agama ini telah menjadi bagian integral dari budaya politik mereka. Nilai-nilai keagamaan seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat menjadi landasan dalam perilaku politik masyarakat Sunda. Agama juga memberikan pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan ekonomi. Beberapa pengaruhnya antara lain:

a. **Preferensi terhadap Pemimpin yang Religius.** Masyarakat Sunda cenderung memilih pemimpin yang memiliki integritas moral dan religius. Pemimpin yang dikenal dekat dengan ulama atau memiliki rekam jejak keagamaan yang baik sering mendapatkan dukungan luas.
b. **Mengutamakan Politik Harmonis dan Damai.** Masyarakat Sunda cenderung menghindari konflik politik yang keras dan lebih memilih jalur musyawarah dan kompromi. Sikap ini berakar pada ajaran Islam tentang islah (perdamaian) dan

budaya Sunda yang menjunjung tinggi kesantunan dan harmoni sosial.

c. **Menolak Politik Uang dan Korupsi.** Dalam Islam, politik harus dijalankan dengan jujur dan adil, sehingga politik uang dan korupsi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai agama. Masyarakat Sunda, yang dikenal dengan prinsip "ulah dahar barang haram", cenderung menolak politik transaksional yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

E. Tantangan dan Dinamika Agama dalam Politik Sunda

Kearifan lokal yang berkembang dalam struktur sosial masyarakat Sunda mencerminkan identitas budaya dan sosial masyarakatnya seiring berjalannya waktu. Dari sudut pandang budaya, tatanan kehidupan masyarakat Sunda mengacu pada nilai Kagaluhan yang mempromosikan peradaban tinggi yang tercermin dari seni, musik, dan pertunjukkan tradisi lokal seperti tarian dan wayang, yang menunjukkan identitas lokal asli dan unik. Dari sudut pandang sosial, cara masyarakat Sunda dalam proses sosialisasi membuktikan bahwa mereka adalah kaum egaliter. Kajian ini mencakup beberapa langkah pengumpulan data seperti menganalisis situs sejarah, artefak, dan dokumen, dan serta menafsirkannya dengan mengacu pada proses peradaban tiap-tiap jaman.

Selain itu, analisis masing-masing dinamika juga dihadapkan pada realitas adanya tren masa kini berupa "gangguan" di era digital ini. Kajian ini menunjukkan bahwa budaya dan tatanan masyarakat Sunda merepresentasikan tingginya kualitas kehidupan yang bermakna. Meskipun agama memberikan banyak nilai positif dalam politik Sunda, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

a. **Politisasi Agama.** Agama sering digunakan sebagai alat politik untuk meraih dukungan, bukan sebagai pedoman moral dalam kepemimpinan. Fenomena ini dapat menyebabkan polarisasi masyarakat dan perpecahan politik berbasis agama.
b. **Fanatisme dan Radikalisme.** Beberapa kelompok memanfaatkan agama untuk kepentingan politik dengan cara yang ekstrem, yang bertentangan dengan nilai toleransi dan harmoni dalam budaya Sunda. Hal ini dapat mengancam prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar kehidupan politik di Indonesia.
c. **Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Tokoh Agama.** Tidak jarang tokoh agama yang terjun ke politik justru terjebak dalam praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat perlu lebih kritis dalam memilih pemimpin dengan melihat rekam jejak dan komitmennya terhadap nilai-nilai moral.

BAB 5 BUDAYA POLITIK SUNDA

Sunda sebagai sebuah entitas budaya lokal terbesar kedua di Indonesia setelah budaya Jawa mempunyai seperangkat nilai-nilai atau norma-norma dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari mulai norma agama, politik, hukum, sosial, dan ekonomi hingga pada persoalan kehidupan lainnya. Khusus bidang politik, Sunda pun mempunyai norma-norma sebagai warisan dari budaya leluhurnya. Banyak tokoh-tokoh sunda yang menjadi politisi dan berhasil menjadikan rakyat aman dan sejahtera. Ex: Raja-raja Sunda pada zaman Salakanagara, Tarumanagara, Kerajaan Padjajaran dsb, Pangeran Kornel, Dipati Ukur, Otto Iskandar Dinata, dll. Mereka telah menjadikan norma budaya lokal sebagai dasar bagi perjuangannya.

Warisan kebudayaan lokal yang sarat dengan nilai dan norma dalam budaya Sunda terdapat serentetan norma yang bisa dijadikan landasan bagi aktivitas politik. *Silih asih, silih asah, dan silih asuh.* merupakan ungkapan sunda yang menjadi warisan budaya Sunda dalam menata kehidupan supaya hidup damai, tentram, dan aman serta *Pamali tarung jeung dulur, pamali bengkah jeung dulur,* merupakan ungkapan yang menata keakraban sosial antara saudara.

Di samping banyak lagi warisan budaya Sunda yang semestinya menjadi dasar bagi gerak langkah orang Sunda dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya termasuk dalam aspek politik, seperti : *cageur, bageur, pinter, singer, bener, teuneung, ludeung.*

A. Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. (Sumartono, 2018)

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, politik pemerintahan, hukum, adat

istiadat, dan norma yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya.

Dalam pandangan Almond dan Verba, budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.

Politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lalu. Sejarah memberikan data dan fakta bagi politik sedangkan politik memberikan teori bagi sejarah, History without political science has no fruit; political without history has no root (sejarah tanpa ilmu politik bagai pohon tak berbuah; politik tanpa sejarah bagaikan pohon tak berakar) demikian ungkap Sir Robert Seeley.

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O'G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara

yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.

Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatifkebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau men-dorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

B. Budaya Politik Sunda

Sistem politik Sunda menganut aliran utilitas yaitu sistem politik seseorang untuk memaksimalkan keuntungan yang tidak membeda-bedakan. Sistem politik Sunda didasarkan pada hati dan perasaan atau sangat menghargai dan menghormati perasaan (Leuleus jeujeur liat tali), menguasai tanpa menyakiti (*Caina herang laukna beunang*)

untuk melaksanakan kegiatan senantiasa matang dan bijaksana (*Dibeuweung diutahkeun heula*), semua itu bermuara kepada dinamika politik kultur politik Sunda "jembar manah" yang "Silih asih, silih asuh, silih asah".

Konsep Budaya politik Ki Sunda adalah "Nyakrawati ngabahudenda kalawan adil parama arta" (Memegang kekuasaan itu adalah memikul tanggung jawab dengan menciptakan keadilan yang merata). Dan pelaksanaan "Rembug jukung sauyunan" (Rempug artinya bersama, dan jukung yaitu berdiri jingkit menahan dengan bahu dan kepala tunduk dan mata memandang ke bawah, sauyunan artinya satu gerakan. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan secara kedaulatan rakyat dan kebersamaan, berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan, pimpinan senantiasa memperhatikan keadaan rakyatnya, dan satu kata satu perbuatan yang seirama.

Peristiwa sejarah yang mempunyai makna bagi kehidupan berpolitik, Pangeran Kornel (Pangeran Kusumah Dinata), putra bupati Sumedang Raden Adipati Surianagara, ia diangkat sebagai bupati Sumedang pada tahun 1791 dengan gelar Tumengung Surianagara. Sebagai bupati dia terkenal bijaksana. Pada masa pemerintahannya kehidupan rakyat berkembang baik dan sejahtera. Dia pun terkenal sebagai bupati yang cakap serta jujur. Menurut Ajip Rosidi (1985) ia berhasil meningkatkan kehidupan rakyat Sumedang. Bahkan Nicolaas Engelhard seorang pejabat Belanda, telah memberikan kesaksiannya bahwa ia adalah seorang bupati yang jujur.

Ketika Nicolaas sedang memeriksa perkebunan kopi di seluruh priangan, ia singgah di Sumedang dan mengatakan daerah itu telah mengalami kemajuan, bahkan daerah yang asalnya hutan telah menjelma menjadi surga. Keberadaannya seorang yang kaya pun tidak pernah berprilaku untuk menambah kekayaannya dengan menggunakan kekuasaan dan jabatannya. Pangeran Kornel adalah seorang pemberani yang sangat memperhatikan pada kepentingan rakyat kecil meskipun harus berhadapan dengan keadaan yang mengancam dirinya. Ia dengan lantang memprotes Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda yang menerapkan kebijakannya dalam pembuatan jalan raya Anyer-Bayuwangi dipandang telah memperkosa keberadaan rakyat. Pangeran Konel sosok pemimpin yang mampu memberikan pemahaman kepada Sang marschalk. Berkat kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin yang demokrat, rakyat menjadi bebas dari ancaman Daendels.

Berkaitan dengan pola hubungan antara atasan dan bawahan, dalam penyelenggaraan politik pemerintahan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintahan kecamatan sampai ke desa-

desa, terjadi hubungan akrab antara birokrat setempat dan rakyatnya, bahkan tidak jarang dalam pesta-pesta rakyat, masyarakat menyuguhkan tarian jaipong dari para ronggeng dan pesinden kepada para aparat pemerintah.

Dalam kisah leluhur Sunda beredar cerita Dayang Sumbi yang identik dengan kisah Odhipus Complex di Yunani kuno. Bedanya di Sunda lebih ditekankan pada kecantikan sang ibu yang senantiasa merawat tubuhnya. Sampai saat ini kebiasaan memakan daun-daunan segar masih kental di Jawa Barat yang disengaja ataupun tidak berdampak positif untuk perawatan kulit. Istilah-istilah dalam perkawinan seperti “nyalindung ka gelung” (berlindung kepada isteri) atau pun “manggih kaya” (numpang kaya) dijadikan sindiran untuk memperlihatkan bahwa unsur materialistis menjadi rujukan utama. Itulah sebabnya perkawinan muda masih sering ditemui. Oleh karena itu, rawannya usia itu merupakan akses yang tidak dapat dihindari. Di beberapa daerah seorang kepala desa mempunyai isteri lebih dari satu. Keinginan seorang ibu untuk merelakan anak gadisnya dipersunting menjadi isteri muda kesekian, adalah karena motivasi harta serta keterlindungan materi.

Arnold Toynbee mengatakan bahwa suatu entitas kebudayaan akan tetap langgeng dan survive bila mampu menjawab tantangan yang dihadapinya. Para ahli fungsionalis berpendapat bahwa kebudayaan akan langgeng ketika kebudayaan tersebut fungsional terhadap lingkungannya. Sebaliknya, kebudayaan akan mengalami krisis bila tidak mampu fungsional dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Di tengah arus zaman yang semakin global, kita dihadapkan pada persoalan yang serba komplek. Sangat wajar bila banyak kebudayaan masuk ke Nusantara, sekaligus menjadi tantangan bagi budaya lokal. Arus modernisasi, globalisasi merupakan rangkaian kebudayaan yang sengaja masuk karena kebutuhan zaman, sekaligus mempengaruhi terhadap budaya lokal.

Kondisi inilah mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan di segala bidang, termasuk aspek politik. Kehidupan politik di Indonesia diwarnai oleh gerak politik yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Arena pertandingan politik pun telah melupakan seluruh fondasi ketimuran yang kita miliki. Warisan kebudayaan lokal yang sarat dengan nilai dan norma dalam budaya Sunda terdapat serentetan norma yang bisa dijadikan landasan bagi aktivitas politik. Silih asih, silih asah, dan silih asuh merupakan ungkapan sunda yang menjadi warisan budaya Sunda dalam menata kehidupan supaya hidup damai, tentram, dan aman. *Pamali tarung jeung dulur, pamali*

bengkah jeung dulur, pun merupakan ungkapan yang menata keakraban sosial antara saudara.

Sejak dikenal lewat catatan sejarah, diketahui bahwa masyarakat Sunda mengenal tradisi kekuasaan. Tradisi kekuasaan di Nusantara dalam era klasik dalam wujud konkritnya terlihat dari hadirnya institusi politik seperti kerajaan (masa pra-Islam) dan kesultanan (masa pengaruh Islam), atau negara dan partai politik dalam era modern.

Dalam sejarah politik Nusantara, Kerajaan Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua yang dikenal terletak di daerah Jawa Barat. Dari naskah Pustaka Pararatwan i Bhumi Jawadwipa, diketahui bahwa kerajaan itu berdiri selama kurang lebih 3 abad (abad ke-4 samai abad ke-7) dan telah berlangsung sekitar 12 kali pergantian raja. Masa puncak kejayaan Tarumanagara terjadi pada masa Raja Purnawarman (394 -434). Raja Tarumanagara yang terakhir yaitu Linggawarman mempunyai menantu bernama Tarusbawa. Tarusbawa inilah yang kemudian dikenal sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Sunda yang berkuasa selama kurang lebih 54 tahun (669-723) (Ajip Rosidi dkk., 2000: 649).

Kerajaan Sunda sendiri runtuh pada tahun 1579 akibat serangan gabungan Banten dan Cirebon yang sedang meluaskan pengaruh Islam. Adanya Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda (Galuh, Pakuan Padjadjaran dan Sumedang Larang) membuktikan bahwa sejak awal masehi masyarakat Sunda mengenal tradisi kekuasaan dan tradisi politik yang cukup stabil dan panjang. Karenanya dapat dikatakan bahwa bila tradisi kekuasaan itu diukur oleh adanya kerajaan Sunda, maka pengalaman politik Sunda telah berlangsung sekitar 14 abad atau lebih.

Sejak kekuasaan kerajaan Sunda ditamatkan oleh pengaruh Islam (abad ke-17), sejarah politik Sunda relatif tidak memiliki kelanjutannya. Dominasi kerajaan Sunda digantikan kerajaan Islam Cirebon dan Banten. Pasca kemerdekan, warisan faham dan nilai-nilai kekuasaan Sunda tidak menemukan refleksinya dalam sejarah negara modern Indonesia. 20 tahun masa Orde Lama dan 32 tahun Orde Baru, seperti disinyalir oleh Benedict Anderson (1990) dan Fachry Ali (1986), merupakan refleksi dan manifestasi dari faham kekuasaan Jawa. Kebudayaan Sunda nyaris tidak mewariskan nilai-nilai kekuasaan dalam politik Indonesia modern.

Tabel
Konsep-Konsep Kekuasaan

Masa/ Pengaruh	Sumber/ Asal Kekuasaan	Syarat Perolehan Kekuasaan	Sumber Naskah
Kerajaan Sunda	Silsilah/keturunan raja	Putra dewata	Carita Prahyangan, Batara Danghyang
Pra Pengaruh Mataram	Kabuyutan (Mandala), yang keramat, adikodrati	Penguasaan kabuyutan, bertapa di kabuyutan	Amanat Galunggung
Pengaruh Mataram	Pulung (Wahyu)	Tertitisi Pulung terdahulu	Sejarah Sukapura
	Nurbuat, Cahaya Nurbuat	Shalat, Munajat, Pdkt. Diri	Pangeran Kornel (roman)
Masa Islamisasi(pengaruh Islam)	Keturunan/silsilah tokoh besar, tokoh agama	Pendirian Kerajaan (Kesultanan Cirebon)	Carita Purwaka Caruban Nagari
	Pemberian pusaka/gelar	Hubungan darah, pertalian saudara, kesinambungan kekuasaan	Carita Purwaka Caruban Nagari

Pembagian kekuasaan dalam konteks modern menurut pandangan Montesque adalah bersandarkan pada pembagian kekuasaan yaitu Trias Politika, terdiri dari Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pembagian kekuasaan atas tiga institusi negara telah dikenal di masyarakat Sunda sejak zaman primordialnya. Hal ini dapat dibaca dari susunan perkampungan Sunda dan pantun-pantun sunda.Dalam masyarakat Sunda lama dipercayai bahwa kekuasaan atas masyarakat dan negara (kampung) itu berasal dari Dunia Atas (Kahiyangan). Manusia mendapatkan mandat kekuasaan dari Sunan Ambu Ratu Agung Pamuhunan (Ambu Luhur). Kekuasaan itu bersifat transeden. Dalam perkampungan “Baduy Dalam” dikenal adanya kesatuan kampung-kampung dibawah tiga kampung besarnya., yakni Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Kekuasaan itu dipegang oleh para pu’un masing-masing.

Mandat kekuasaan dari dunia atas diberikan kepada kampung Cikeusik. Adat dan etika sosial perkampungan dikuasai oleh Cikeusik. Punden berundak Salaka Domas berada di wilayah kampung ini. Ini menunjukan hubungan khusus kampung ini dengan dunia para hyang. Hidup didunia ini tak dapat dilepaskan dari alam transendental yang berada diluar batas-batas kemampuan manusia. Meskipun mandat normatif kekuasaan ada pada kampung ini, namun ia tidak melaksanakan mandat itu. Ia Pemilik namun bukan pemakai. Pelaksana kekuasaan justru diserahkan kepada kampung-kampung yang lebih muda, yakni Cikertawana (bungsu) dan Cibeo (sulung). Cikertawana adalah pelaksana kekuasaan yang bertugas menyatukan seluruh perkampungan. Sedangkan tugas Cibeo adalah melindungi dan menjaga Cikertawana, tugasnya adalah penjaga keamanan. Ahli-ahli silat yang kebal senjata tentunya banyak ditemukan dalam kampung ini. (Jacob Soemardjo, 2004).

Jadi trias politika Sunda lama itu berupa: “Pemilik Kekuasaan” atau “pemegang mandat kekuasaan” (Cikeusik). Ia tidak melaksanakan mandatnya, tetapi amat dihormati dan dipatuhi hukum-hukumnya. Fungsinya adalah pemegang tuah transendental. (“**Pemilik Mandat**”). Sedangkan eksekutif ada pada Cikertawana. Ia yang memutuskan apa yang seharusnya dan apa yang tabu.(“**Pemakai Mandat**”). Sedangkan pengawas dan pelindung kekuasaan adalah Cibeo. (“**Penjaga Mandat**”). Baik Cikertawana maupun Cibeo sangat menghormati Cikeusik. (Jacob, 2004)

Dalam pengelolalan kerajaan Sundapun telah dikenal Trias Politika dimana Maharaja Tarusbawa sendiri sebagai *prebu* “pemimpin roda pemerintahan pusat” membawahi beberapa penguasa wilayah yang diangkat atas kespakatan bersama dengan pihak *rama* “tokoh masyarakat wakil rakyat” dan pihak *resi* “penentu kebijakan hukum”.

Prinsip pembagian tiga semacam itu masih ditemukan dalam masyarakat kampung di zaman sekarang. Penelitian Antropologi Robert Wessing atas perkampungan Pameuntasan dekat Bandung menemukan pembagian fungsi tiga kampung utamanya, yakni: Kampung Gajah sebagai pemegang adat Sunda pra-Islam (kuburan tua dan peninggalan penting yang dihormati ada disitu); Kampung Ciseah sebagai pemegang syariat Islam; Kampung Pameuntasan sendiri sebagai pemegang kekuasaan modern (lurah, camat).

Gambaran Trias Politika ini juga tampak pada rombongan putra Pajajaran yang mengembara mencari daerah kekuasaan baru. Dalam Carita Guru Gantangan, putra Siliwangi yang masih muda ini diiringi oleh Patih Purwa Kalih, Gegedug Kidang Pananjung dan Jaksa Gelap Nyawang. Tiga helar pengiring ini menggambarkan trias politika.

Pangeran Pajajaran jelas pemilik mandat kekuasaan, ia manusia sempurna atau dalam proses menjadi manusia sempurna. Wakil atau Patih Putra Pajajaran dalam pengembaraan adalah ua Purwa Kalih (Parawa Kalih, Perewa Kalih). Gelap Nyawang adalah jaksa, orang yang memerintahkan dan memutuskan segala sesuatu dalam pengembaraan. Kidang Pananjung adalah gegedug atau Panglima, yakni perintis jalan dan pemberantas halangan dalam pengembaraan. Jadi : Purwa Kalih dan Pangeran Pajajaran analog dengan Cikeusik (pemilik mandat kekuasaan); Gelap Nyawang dengan Cikertawana dan Kidang Pananjung dengan Cibeo yang ahli silat dan perang.

Budaya politik Sunda merujuk pada nilai-nilai, norma, sikap, dan perilaku politik yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda. Masyarakat sunda memiliki nilai nilai kehidupan yang tinggi yang mengarah kepada keseimbangan dalam pengelolaan kehidupannya. Hal tersebut berpengaruh pada sikap dan perilaku politiknya. Budaya politik Sunda memiliki watak yang santun, religius, menghormati pemimpin, dan cenderung menghindari konflik terbuka dan sineger tengah. Namun, karakter ini juga membawa tantangan tersendiri dalam mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan kritis. Beberapa ciri politik sunda, yang bisa dijadikan contoh berikut ini :

1. Politik Santun dan Harmonis

Masyarakat Sunda dikenal memiliki budaya yang menjunjung tinggi kesopanan, kesantunan, dan keharmonisan. Dalam praktik politik, hal ini tercermin dalam sikap yang cenderung menghindari konflik terbuka dan mengutamakan musyawarah serta mufakat. Dalam dunia perpolitikan dekade ini cenderung sikap politik tersebut sudah ditinggalkan, sehingga kerap kali orang sunda tertinggal langkahnya dalam berpolitik.

2. Patronase dan Hormat pada Pemimpin

Budaya Sunda menghargai sistem patron-klien, di mana pemimpin atau tokoh dihormati dan diikuti. Pemimpin yang ideal menurut masyarakat Sunda biasanya adalah yang memiliki “silih asih, silih asuh, silih asah”, yaitu saling mengajari, menyayangi, dan membimbing. Pemimpin yang bisa *nulung kanu butuh nalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, nungtun kanu teu nempo, ngahudangkeun nu labuh, ngajait kanu ti leuleup*. Pemimpin yang memiliki sifat “ke-Prabuan” selalu ada ditengah-tengah masyarakatnya dan “teu nyirikeun” (tidak menampakkan diri) bahwa dia sebagai pemimpin tetapi selalu ada manakala Masyarakat membutuhkan.

3. Politik yang Cenderung Pragmatis

Masyarakat Sunda yang memiliki sikap yang santun serta ramah toleran, dalam politik praktiknya, masyarakat Sunda cenderung pragmatis dalam memilih pemimpin atau partai politik. Mereka lebih mempertimbangkan manfaat langsung atau figur yang dekat secara emosional atau kultural, ketimbang ideologi atau garis partai.

4. Religiusitas sebagai Pertimbangan Politik

Sebagian besar masyarakat Sunda adalah Islam/Muslim, dan nilai-nilai budaya lokalnya cukup kental serta religius cukup kuat dalam mewarnai pilihan politik mereka. Tokoh atau partai politik yang dianggap dekat dengan nilai-nilai Islam dan memiliki nilai budaya lokal yang kuat sering mendapatkan simpati lebih besar dari masyarakatnya.

5. Budaya Lokal dan Identitas Politik

Budaya lokal seperti *leuleus jeujeur* (lembut dan lurus), tata titi depe depe handap asor (taat aturan serta ramah dan sopan), dan tepa salira (toleran) turut memengaruhi bagaimana masyarakat Sunda berinteraksi dengan politik. Namun, hal ini juga bisa menyebabkan rendahnya partisipasi kritis karena cenderung bersikap pasif atau enggan mengkritik secara terbuka.

Di samping itu, banyak lagi warisan budaya Sunda yang semestinya menjadi dasar bagi gerak langkah orang Sunda dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya termasuk dalam aspek politik, seperti kita harus cageur, bageur, pinter, singer, bener, teuneung, ludeung. Sangatlah ironis bagi para politisi yang kaya akan nilai-nilai budaya lokal, khususnya politisi Sunda, jauh dari akar budaya yang semestinya.

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan di atas harus dijawab dengan jalan memfungsionalkan kembali nilai-nilai budaya sunda yang kita miliki dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Memfungsikan budaya lokal ini bukan berarti memunculkan kembali nilai-nilai etnosentris, tetapi di era yang pluralistik ini pelestarian dan pengembangan budaya lokal merupakan suatu keharusan. Proses penyadaran akan pentingnya warisan budaya lokal membutuhkan waktu yang panjang. Meskipun demikian, tanpa kita memulai dan memaksakan untuk menjadikan warisan budaya lokal sebagai dasar perjuangan harapan hanya tinggal harapan tanpa sebuah kenyataan.

Untuk itu, sosialisasi kembali warisan budaya lokal baik di tingkat para inohong atupun masyarakat menengah ke bawah merupakan suatu keharusan. Kemudian sosialisasi harus dilakukan di

institusi-institusi yang ada, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Mudah-mudahan dengan mensosialisasikan dan memfung-sionalkan nilai-nilai budaya Sunda di setiap lapisan ataupun struktur sosial, khususnya yang dilakukan oleh politisi Sunda akan membantu terhadap pencegahan bahaya punahnya budaya Sunda dan sekaligus berdampak pada tatanan sosial dalam skup nasional menjadi semakin jelas. Sehingga krisis politik ataupun krisis lainnya dapat segera diantisipasi.

Peristiwa sejarah yang mempunyai makna bagi kehidupan berpolitik. Adalah Pangeran Kornel sebutan lain bagi Pangeran Kusumah Dinata, seorang tokoh sejarah yang perlu dijadikan contoh oleh kita dalam sepak terjangnya sebagai pemimpin politik ataupun pemimpin masyarakat. Dia putra bupati Sumedang yang bernama Raden Adipati Surianagara, dan ia diangkat sebagai bupati Sumedang pada tahun 1791 dengan gelar Tumengung Surianagara. Sebagai bupati dia terkenal bijaksana. Pada masa pemerintahannya kehidupan rakyat berkembang baik dan sejahtera. Dia pun terkenal sebagai bupati yang cakap serta jujur.

Ajip Rosidi (1985) mengambarkannya sebagai bupati yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyat Sumedang. Bahkan Nicolaas Engelhard (dalam Ajip Rosidi), seorang pejabat Belanda, telah memberikan kesaksiannya bahwa ia adalah seorang bupati yang jujur. Pada waktu itu, Nicolaas sedang memeriksa perkebunan kopi di seluruh priangan, ia singgah di Sumedang dan mengatakan daerah itu telah mengalami kemajuan, bahkan daerah yang asalnya hutan telah menjelma menjadi surga. Keberadaannya seorang yang kaya pun tidak pernah berprilaku untuk menambah kekayaannya dengan menggunakan kekuasaan dan jabatannya.

Dalam hal lain, Pangeran Kornel adalah seorang pemberani yang sangat memperhatikan pada kepentingan rakyat kecil meskipun harus berhadapan dengan keadaan yang mengancam dirinya. Terbukti ketika ia dengan lantang memprotes Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda yang menerapkan kebijakannya dalam pembuatan jalan raya Anyer-Bayuwangi dipandang telah memperkosa keberadaan rakyat. Daendels yang terkenal sebagai *marschalk* sangat disegani dan ditakuti oleh setiap rakyat pada waktu itu, apalagi pembuatan jalan di cadas pangeran (nama sekarang) tak kunjung selesai disebabkan oleh sedikitnya personal yang ada.

Tetapi, kekhawatiran bringasnya Daendels tidak terjadi berkat sosok pemimpin Pangeran Konel yang mampu memberikan pemahaman kepada Sang marschalk. Berkat kepiawaiannya sebagai

seorang pemimpin yang demokrat, rakyat menjadi bebas dari ancaman Daendels.

Model kepemimpinan masyarakat Sunda Lama banyak memberikan kontribusi pada kearifan lokal masyarakat pada zamannya. Namun saat ini, dengan budaya politik yang berubah, model-model lama dianggap sesuatu yang hanya dianggap sebagai monument dalam catatan sejarah peradaban masyarakat sunda lama. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila dalam konstalasi nasional, tokoh-tokoh sunda tidak diperhitungkan.

C. Budaya Politik "Huma"

Penganut paham *economic determinism* memandang bahwa ekonomi atau materi merupakan faktor penentu gerak sejarah. Bagi orang seperti itu, mengkaji sejarah ekonomi menjadi teramat penting. Akan tetapi sayangnya, sejarah Sunda hampir tidak pernah meninggalkan jejak secara lengkap, lebih-lebih untuk periode yang jaraknya dengan kehidupan kita sangat jauh. Mengungkap sejarah ekonomi masyarakat Sunda pada periode Kerajaan Tarumanagara yang eksis pada abad ke-5 amat sulit karena teramat sedikitnya sumber. Begitu juga pada periode kerajaan Sunda setelahnya. Padahal sejarah ekonomi hampir identik dengan sejarah kuantitatif, menuntut banyak data angka.

Kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Sunda sedikit terkuak dan dapat digambarkan dengan adanya berita yang diperoleh dari bangsa Portugis. Menurut berita tersebut, ibu kota Kerajaan Sunda terletak di pedalaman, sejauh dua perjalanan dari pesisir pantai utara. Para pedagang dari kerajaan Sunda sudah mampu melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang asing dari kerajaan-kerajaan lain, seperti Malaka, Sumatra, Jawa Tengah-Timur, dan Makassar. Kegiatan perdagangan antarpulau itu didukung oleh pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda yaitu Kelapa, Banten, Pontang, Cigede.

Dengan demikian, kegiatan perekonomian pada sektor perdagangan di Kerajaan Sunda cukup maju. Komoditas yang diperdagangkan antara lain: lada, beras, hewan ternak, sayuran, buah-buahan. Untuk mendukung dan kelancaran perdagangan dari pesisir ke pedalaman, maka dibangunlah jalan yang baik. Dalam hal transportasi air, selain melalui laut, dilakukan pula melalui sungai-sungai besar seperi Citarum dan Cimanuk, sebagai jalur perairan dalam negeri.

Pada zaman kerajaan Pajajaran, melalui pelabuhan-pelabuhan inilah mereka melakukan aktifitas perdagangan dengan negara lain.

masyarakat Pajajaran telah berlayar hingga ke Malaka bahkan ke Kepulauan Maladewa. Barang-barang dagangan mereka umumnya bahan makanan dan lada. Di samping itu, ada jenis bahan pakaian yang didatangkan dari Kambay (India). Sementara mata uang yang dipakai sebagai alat tukar adalah mata uang Cina.

Selain sektor perdagangan, Kerajaan Sunda pun mengembangkan sektor pertanian yaitu berladang. Dari bukti-bukti sejarah, umumnya masyarakat Pajajaran hidup dari perladangan, seperti juga masyarakat Tarumanagara dan Galuh. Jadi sebelum mengenal sistem mata pencaharian di sawah, masyarakat Sunda dikenal sebagai masyarakat peladang (pahuma). Masyarakat Sunda lama dikenal sebagai masyarakat peladang, masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari hasil ladang. Masyarakat sunda lama bukanlah petani di sawah, melainkan seorang pahuma atau peladang. Bercocok tanam di sawah baru di kenal setelah berakulturasi dengan budaya Jawa (Mataraman).

Menurut naskah Carita Parahyangan, dalam kehidupan masyarakat Sunda masa lalu, hanya di jumpai satu perkataan sawah, yaitu : sawah tampian dalem, yaitu tempat dipusarakannya Ratu Dewata. Selebihnya hanya melukiskan situasi masyarakat ladang. Dalam cerita tersebut ada dikatakan Lima Titisan Pancakusika, selain menjadi Raja dan pedagang, ketiga lainnya masing-masing menjadi pahuma (peladang), panggerek (pemburu), dan panyadap (penyadap). Ketiga jenis pekerjaan tersebut adalah merupakan jenis-jenis pekerjaan di ladang.

Pengaruh pola kehidupan ngahuma pada masyarakat Sunda: Jarak rumah yang satu dengan lainnya berjauhan; Pola hubungan antar tetangga longgar; Gotong royong hanya dilakukan pada peristiwa tertentu; dan Tidak memiliki undak usuk basa.

Dalam wawacan Sulanjana, juga masih terlihat bahwa masyarakat Sunda sebagai masyarakat peladang. Hal ini tampak dari ungkapan cerita yang mengemukakan bahwa lambat laun pada tanah kuburan Pohatji ada pohon tumbuh: Di bagian kepalanya tumbuh pohon nyiur yang buahnya hijau dan kuning; Dibagian matanya tumbuh tanaman padi yang berbuah lima butir berlainan warna (merah, kuning, hitam, putih, hijau). Padi putih: keluar dari bagian putih matanya, padi hitam: keluar dari rambut. Di bagian telinganya tumbuh berbagai jenis jamur; Dari jantungnya keluar padi ketan;
Dari jari-jari tumbuh berbagai jenis bambu besar dan kecil serta berbagai jenis kacang yang menjalar tumbuh keatas, dan dari buah dada tumbuh buah-buahan.

Ngahuma, tampaknya di kenal manusia sejak zaman neolithicum (zaman batu baru), suatu zaman tatkala manusia masih menggunakan alat perkakas hidup yang terbuat dari batu yang telah diasah. Bagi masyarakat Baduy, ngahuma bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang hurip (layak, sehat lahir bathin). Kegiatan ngahuma dilaksanakan dalam rangkaian upacara adat yang sakral, sebab ngahuma bukan hanya sebagai mata pencaharian saja, tetapi juga melestarikan kehidupan Nyi Pohaci Hyang Sri yang setiap tahun harus halimpu (kawin) dengan bumi. Nyi Pohaci adalah gambaran simbolis Dewi Padi yang berada di alam Kahyangan (Buana Nyungcung). Pemujaan dan pengabdian masyarakat Baduy tercermin pada kegiatan ngahuma. Sebagai kegiatan sakral, upacara ngahuma dilaksanakan berdasarkan pikukuh dan buyut. Setiap tahapan upacara ngahuma memerlukan media kesenian, baik musik pengiring (karawitan), gerak tari dan perupaan.

Salah satu benda upacara yang diperlukan pada tahap awal adalah waroge, waroge adalah jampi-jampi penolak bala (tutulak) yang digoreskan pada bilahan bambu, potongan kayu, batu atau pecahan gerabah. Waroge ditempatkan di huma, ditanam ditanah atau di saung di huma. Jampi-jampi pada waroge ini berisi motif-motif perlambangan yang berujud abstraksi makhluk hidup (binatang pengganggu tanaman padi, hama), makhluk gaib (setan, jurig, dedemit), dan bentuk abstrak geometris yang bermakna jampi. Hal yang patut dijadikan contoh dari sikap masyarakat Baduy terhadap alam adalah, mereka hanya menebang pohon ketika mereka membutuhkannya, mereka berusaha sebaik mungkin untuk menghargai dan menghormati alam, termasuk dalam pengelolaan huma.

Pada garis besarnya dapat di kemukakan bahwa cara-cara bercocok tanam di ladang di kerjakan manusia sebagai berikut: Suatu areal hutan yang akan di buka mulai di bersihkan dulu belukarnya; Setelah areal dibersihkan, baru dilakukan penebangan pohon-pohon besar, lalu di bakar;

Setelah dibakar, di biarkan dulu beberapa waktu sampai tanah tersebut dingin; Ditanami; dan 3-4 bulan kemudian di panen. Mengolah huma pada masyarakat Sunda melalui tahap-tahap: Nyacar, dengan menggunakan alat patik dan beliung; Ngaseuk, menggunakan aseuk (sekarang bisa dengan cangkul); Ngoyos (menyiangi), di pergunakan kujang dan kored; dan Panen.

Pada masyarakat huma biasanya bentuk hak milik agak bersifat longgar, tidak ada tradisi huma yang di wariskan. Namun dalam pandangan Prof. Ayat dari Universitas Indonesia, ada salah satu warisan dari model peladangan ini terhadap budaya politik, ketika

beliau membandingkan antara masyarakat Sunda yang peladang dan masyarakat Jawa yang menjadi petani di sawah. Masyarakat peladang disimbulkan sebagai masyarakat yang merasa setara antara satu dengan yang lainnya. Prinsip kesetaraan (*equality*) kalau dibina akan menghasilkan sebuah tatanan yang demokratis.

Jadi masyarakat Sunda cenderung menjadi masyarakat yang demokratis. Baik dari adat yang sekarang masih ada, maupun dari naskah-naskah kuno, masyarakat Sunda memperlihatkan kehidupan yang cukup demokratik, indikatornya adalah :

1. Meskipun terdapat peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Ujungkulon (Banten) terdapat Kerajaan abad pertama Masehi (Salakanagara), begitu juga Tarumanagara di Bekasi (abad ke-5) dan di Bogor Kerajaan Padjajaran (abad 11), yang kesemuanya beragama Hindu. Namun tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa disini pernah di kenal pembagian masyarakat ke dalam kasta-kasta seperti dalam masyarakat Hindu;
2. Tidak terdapat bekas-bekas yang membuktikan bahwa dalam masyarakat Sunda itu pernah terbina suatu birokrasi feodal yang kuat mengakar;
3. Tidak pernah terdapat bukti bahwa masyarakat Sunda pernah di kenal Keraton sebagai pusat kehidupan atau pusat kebudayaan Baru pada zaman yang lebih kemudian, setelah Tatar Sunda ditaklukan oleh Sultan Agung, di berbagai Kabupaten yang merupakan tempat tinggal *Dalem* (Bupati), nampak usaha mengikuti pola kehidupan Mataram, yaitu: Adanya Keraton; dan Adanya Undak-usuk Basa.

Namun sisi negatifnya adalah cenderung individualis dan susah diatur. Hal ini disimbolkan oleh binatang ternak yang ada di ladang, yaitu ayam. Karakter ayam adalah susah diatur, kalau dipegang ekornya, kepalanya meronta-ronta, kalau dipegang kepalanya, ekornya meronta-ronta, dan kalau ayam digiring ke kandang susahnya minta ampun. Hal ini melahirkan budaya politik Sunda bersendikan kesetaraan, indidualis dan susah diatur. Nilai-nilai menjadi pondasi terbangun sistem demokrasi.

BAB 6 SISTEM POLITIK KERAJAAN SUNDA

Dalam sistem politik Kerajaan sunda menunjukan keseimbangan antara pemerintah pusat yang kuat dan otonomi daerah yang cukup kuat. Meskipun sistem pemerintahannya menganut sistem monarki absolut, tetapi sistem musyawarah tetap diterapkan dalam pengambilan keputusannya. Hukum adat, sistem militer yang kuat, serta hubungan diplomatiknya yang aktif menjadikan Kerajaan Sunda sebagai salah satu Kerajaan yang cukup stabil serta berpengaruh di Nusantara hingga ahirnya runtuh pada abad ke 16, itulah sekilas lintasan Sejarah Kerajaan sunda.

Sir Robert Seeley pernah menyebutkan: *History without political science has no fruit; political without history has no root.* Sejarah tanpa ilmu politik bagai pohon tak berbuah; politik tanpa sejarah bagaikan pohon tak berakar. Politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lalu. Sejarah memberikan data dan fakta bagi politik sedangkan politik memberikan teori bagi sejarah.

Sejak dikenal lewat catatan sejarah, diketahui bahwa masyarakat Sunda mengenal tradisi kekuasaan (politik), dimulai pada zaman awal pembentukan sistem pemerintahan di kerajaan Salakanagara pada tahun 130 M. Dewawarmanlah yang telah mengawali sistem politik kerajaan, yang sebelumnya pada masa kekuasaan mertuanya, yaitu Aki Tirem masih berbentuk pedukuhan.

Permulaan kisah adalah di Pantai Barat Jawa Barat di pimpin oleh seorang Penghulu Desa bernama Aki Tirem, dan memiliki putri yang bernama Larasati. Pada saat pemerintahan Aki Tirem, datang sekelompok kaum pedagang dari India Selatan yang di pimpin Dewawarman. Atas jasa Dewawarman yang telah membantu Aki Tirem dalam memerangi perampok/bajak laut, maka Aki Tirem memungut Dewawarman sebagai mantu, dan banyak pula tentara Dewawarman yang menikahi masyarakat pribumi. Tatkala Aki Tirem sakit, sebelum meninggal ia menyerahkan kekuasaan pada sang menantu. Setelah Aki Tirem wafat, Sang Dewawarman menggantikannya sebagai penguasa Salakanagara (negeri Perak) dengan nama nobat Prabu Darmalokapala Dewawarman Haji Raksa Gapura Sagara (130-168), sedang istrinya Pohaci Larasati menjadi

permaisuri dengan nama nobat Dewi Dwani Rahayu, Kerajaannya di sebut Salakanagara (negeri Perak).

Daerah Kekuasaannya: Jawa Barat bagian Barat (Banten), semua pulau di sebelah Barat nusa Jawa, Laut diantara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Ibukota Salakanagara adalah Rajatapura (kota Perak). Hal ini sama dengan nama negara yang di kemukakan oleh Ptolomeus Argyre (kota Perak) di wilayah Nusantara.

Kerajaan Sunda memiliki sistem politik monarki yang terstruktur, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, didukung oleh dewan penasihat, pejabat daerah, dan pasukan militer. Sistem hukum berbasis adat dan agama, sementara diplomasi dengan kerajaan lain bersifat dinamis. Namun, pengaruh Islam yang semakin kuat serta melemahnya kekuatan ekonomi dan militer menyebabkan kerajaan ini akhirnya runtuh pada abad ke-16 dan digantikan oleh Kesultanan Cirebon serta Banten.

Sistem politik Kerajaan Sunda menunjukkan kombinasi antara pemerintahan monarki yang kuat, penghormatan terhadap adat dan hukum, serta unsur musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terstruktur, kerajaan ini mampu bertahan selama berabad-abad sebelum akhirnya runtuh akibat ekspansi Islam pada abad ke-16.

A. Struktur, Hukum, dan Dinamika Pemerintahan Kerajaan Sunda

Sistem politik Kerajaan Sunda menunjukkan keseimbangan antara pemerintahan pusat yang kuat dan otonomi daerah yang cukup luas. Meskipun menganut monarki absolut, sistem musyawarah tetap diterapkan dalam pengambilan keputusan. Hukum adat, sistem militer yang kuat, serta hubungan diplomatik yang aktif menjadikan Kerajaan Sunda sebagai salah satu kerajaan yang cukup stabil dan berpengaruh di Nusantara hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16 akibat ekspansi Islam.

Kerajaan Sunda adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dari sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16. Sistem politiknya menggabungkan unsur monarki, adat istiadat lokal, dan pengaruh Hindu-Buddha, sebelum akhirnya mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Sistem politik Kerajaan Sunda tidak hanya mencakup struktur pemerintahan, tetapi juga hukum, hubungan internasional, sistem militer, dan peran agama dalam pemerintahan.

1. Bentuk dan Struktur Pemerintahan

Kerajaan Sunda menganut sistem monarki hereditas, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga kerajaan. Pemerintahan bersifat hierarkis dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

a. Raja sebagai Pemimpin Tertinggi (Prabu atau Maharaja), Raja adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, serta memiliki kekuasaan absolut.
b. Dalam sistem Hindu-Buddha, raja dianggap sebagai perwujudan atau wakil dewa di dunia (konsep dewa-raja).Dalam pemerintahan, raja dibantu oleh dewan penasihat, pejabat tinggi, dan pasukan militer. Salah satu raja terkenal adalah Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi), yang membawa kejayaan bagi Kerajaan Sunda.
c. Dewan Penasihat dan Menteri Kerajaan, Raja dibantu oleh pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan dan penegakan hukum. Para penasihat utama kerajaan termasuk: -Rakryan Mahamantri – Dewan tertinggi yang membantu raja dalam pengambilan kebijakan. -Rakryan Mapatih (Perdana Menteri) – Pemimpin administrasi pemerintahan dan pelaksana kebijakan raja. -Rakryan Halu – Mengurus keamanan dan militer. -Rakryan Kanuruhan – Mengelola urusan sosial dan kesejahteraan rakyat.
d. Pemerintahan Daerah (Bupati dan Raksa Desa). Kerajaan Sunda dibagi menjadi beberapa wilayah yang masing-masing diperintah oleh bupati atau raja bawahan yang tunduk kepada raja Sunda. Di tingkat desa, pemerintahan dipegang oleh Raksa Desa, yang bertugas menjaga ketertiban, mengatur ekonomi, dan menyelesaikan sengketa masyarakat. Wilayah kerajaan mencakup pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran (sekarang Bogor), serta daerah lain seperti Galuh, Kawali, Banten, dan Cirebon.
e. Militer dan Keamanan Negara (Bala Saraja). Pasukan kerajaan dikenal dengan sebutan Bala Saraja, bertugas mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Raja memiliki panglima perang (Senapati Agung) yang mengatur strategi pertahanan dan ekspansi kerajaan. Pasukan elit kerajaan dikenal dengan Bala Sunda Siliwangi, yang terlatih dalam peperangan dan strategi bertahan di medan sulit.

2. Sistem Hukum dan Administrasi

Kerajaan Sunda memiliki sistem hukum yang berbasis hukum adat dan agama, yang diabadikan dalam prasasti dan aturan kerajaan.

a. Hukum dan Tata Negara. Hukum di Kerajaan Sunda diatur dalam berbagai prasasti dan piagam kerajaan, yang menetapkan hak serta kewajiban rakyat dan pejabat. Prasasti Batutulis di Bogor adalah salah satu bukti hukum yang digunakan dalam sistem pemerintahan. Hukuman bagi pelanggar hukum bersifat tegas tetapi juga mempertimbangkan unsur keadilan.
b. Pajak dan Sistem Ekonomi. Rakyat wajib membayar pajak kepada kerajaan dalam bentuk hasil bumi, tenaga kerja, atau jasa. Perdagangan menjadi salah satu sumber ekonomi utama, terutama melalui pelabuhan Sunda Kelapa, Banten, dan Cirebon. Kerajaan Sunda memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, India, dan Timur Tengah.

3. Hubungan Luar Negeri dan Diplomasi.

Sebagai kerajaan besar, Sunda memiliki hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain, baik di Nusantara maupun di luar negeri.

a. Hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Sunda memiliki hubungan yang kompleks dengan Majapahit. Salah satu peristiwa besar dalam hubungan ini adalah Perang Bubat (1357), di mana pasukan Majapahit menyerang rombongan Kerajaan Sunda yang datang untuk menikahkan putri raja dengan Hayam Wuruk. Setelah Perang Bubat, hubungan kedua kerajaan memburuk dan terjadi ketegangan politik serta ekonomi.
b. Hubungan dengan Kesultanan Islam Pada abad ke-16, pengaruh Islam mulai masuk ke Kerajaan Sunda melalui Kesultanan Cirebon dan Banten. Kesultanan Islam ini akhirnya menjadi kekuatan yang melemahkan kerajaan hingga akhirnya runtuh pada 1579 akibat ekspansi Kesultanan Banten.

4. Peran Agama dalam Sistem Politik

a. Hindu-Buddha sebagai Dasar Pemerintahan Awal. Pada masa awal, sistem politik Sunda sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Konsep Ratu Adil (pemimpin yang bijaksana dan melindungi rakyat) berasal dari ajaran ini. Raja dianggap sebagai wakil dewa yang memiliki tugas menjaga keseimbangan alam dan masyarakat.
b. Masuknya Islam dan Transformasi Politik. Islam mulai berkembang pada abad ke-15 dan memberikan pengaruh besar dalam sistem politik. Sejumlah pangeran Sunda

memeluk Islam dan membentuk kesultanan-kesultanan seperti Cirebon dan Banten. Islam memperkenalkan konsep kepemimpinan yang lebih demokratis, seperti musyawarah dan syura.

B. Tantangan dan Runtuhnya Kerajaan Sunda

Meskipun Kerajaan Sunda memiliki sistem politik yang kuat, pada masa Kerajaan Salakanagara, Tarumanagara, Sunda dan Galuh, bagai pertunjukan drama kontemporer, puncak kejayaan Kerajaan Sunda benar-benar dekat dengan antiklimaks dari eksistensi kerajaan Paddjaran. Tidak lama berselang dari masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, hadir eksponen-eksponen politik Islam di Pulau Jawa. Eksponen-eksponen politik ini langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi pondasi pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa yang manunggal dengan sistem keagamaannya. Terlebih, para penguasa Islam pendatang anyar itu menduduki pos-pos dagang di pesisir utara Pulau Jawa. Jadi, apabila sewaktu-waktu mereka memberlakukan sistem monopoli dan memberontak pada pemerintahan raja-raja Hindu-Buddha di pedalaman, maka hal itu akan segera menyebabkan efek embargo.

Dalam naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari,* disebutkan bahwa penguasa Islam di Cirebon, yakni *wali qutub* Sunan Gunung Jati telah menghentikan pengiriman upeti berupa *uyah kalawan trasi* (garam dan terasi) untuk raja di Pajajaran sebagai tanda perlawanan. Hal ini tak ayal telah menyebabkan kegaduhan, sehingga tidak lama dari situ Surawisesa yang tengah memerintah kemudian mengirimkan peringatan. Di luar benar atau tidaknya peristiwa ini, yang jelas naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* telah merekam suatu informasi penting mengenai metode yang digunakan oleh para penguasa Islam di pesisir untuk melemahkan raja-raja yang belum memeluk agama tauhid di pedalaman.

Belakangan, embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Cirebon makin menjadi-jadi, karena kemudian pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Sunda juga dicaplok satu persatu. Sebagaimana disebut oleh Tjandrasasmita, mula-mula Pelabuhan Banten dan sekitarnya yang menjadi sasaran pasca Cirebon memberontak. Dengan menempatkan Maulana Hasanuddin—putra Sunan Gunung Jati yang berdarah Banten, Pelabuhan Banten kemudian bertransformasi menjadi pelabuhan kaum muslimin yang berjejaring dengan Demak dan Cirebon. Puncaknya, Pelabuhan Sunda Kalapa yang akhirnya tunduk pada kekuatan liga Islam-Jawa. Akhirnya, Sunda terkungkung dalam kesendirian tanpa pemasukan barang yang datang luar negeri.

Husein Djajadiningrat dalam *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten* (1983), percaya bahwa keruntuhan Kerajaan Sunda murni disebabkan serangan Kesultanan Banten ke ibu kota Pakwan Pajajaran tahun 1579, sebagaimana disampaikan dalam sumber-sumber versi Banten. Namun, jika diperdalam lagi dari sumber sejarah Sunda Kuno, penulis *Carita Parahyangan* justru menyebut bahwa keruntuhan Kerajaan Sunda-Galuh terjadi lantaran lemahnya struktur kerajaan itu sendiri. Sang penulis bahkan menggambarkan masa-masa akhir Kerajaan Sunda itu sangat buruk, dari bagaimana tingkah laku raja-raja yang memerintah pasca Surawisesa.

Prabu Ratu Dewata, yang disebutkan disemayamkan di *Sawah Tampian Dalem*. Sang raja dikenal sangat alim dan gemar melakukan kegiatan keagamaan, namun sayang kesalehannya itu menyebabkan ia jadi abai terhadap kerajaannya yang tengah genting. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sunda diserang oleh musuh yang tidak diketahui asalnya. Akibatnya, dua pejabatnya tewas di medan perang. Di sisi lain, "mabuknya" sang raja terhadap agama telah menyebabkan banyak ketidakadilan di kerajaannya, misalnya mengenai kasus dieksekusinya beberapa pendeta yang tidak bersalah.

Masa pemerintahan Prabu Ratu Dewata hanya berlangsung delapan tahun, hingga ia digantikan oleh Sang Ratu Saksi Mangabatan ring Tasik. Berlawanan dengan pendahulunya, Ratu Saksi sangat gemar perempuan dan konon telah mengawini ibu tirinya sendiri. Delapan tahun pula pemerintahan Ratu Saksi, hingga ia digantikan oleh Raja Nilakendra. Sama buruknya, sang raja juga gemar berfoya-foya di istana dan menyebabkan rakyatnya konsumtif. Tiga generasi destruktif Kerajaan Sunda ini mencapai hilirnya ketika Nusiya Mulya yang menggantikan Nilakendra kemudian kalah perang melawan koalisi Demak-Cirebon.

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Sunda-Padjdjaran. Sehingga bisa disimpulkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kehancurannya:

a. Persaingan dengan Majapahit dan Kesultanan Islam. Perang Bubat memperburuk hubungan dengan Majapahit, sehingga posisi politik Sunda semakin melemah. Kesultanan Cirebon dan Banten yang semakin kuat secara politik dan ekonomi akhirnya menggantikan peran Kerajaan Sunda.
b. Melemahnya Ekonomi dan Perdagangan. Setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Kesultanan Demak dan Fatahillah pada tahun 1527, Kerajaan Sunda kehilangan pusat perdagangan utama. Hal ini menyebabkan melemahnya ekonomi kerajaan.

c. Kekalahan dalam Ekspansi Islam. Pada tahun 1579, pasukan Kesultanan Banten menyerang Pakuan Pajajaran. Raja terakhir, Prabu Ragasilang Kertabumi, akhirnya melarikan diri dan kerajaan resmi runtuh.

Sistem politik Kerajaan Sunda mencerminkan struktur pemerintahan yang bercorak monarki dengan nilai-nilai kearifan lokal yang kuat. Berikut adalah beberapa aspek utama sistem politik Sunda : *Pertama*, Bentuk Pemerintahan. Kerajaan Sunda menganut sistem monarki, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja. Raja dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan absolut, tetapi tetap berlandaskan adat dan nilai-nilai keagamaan. *Kedua*, Struktur Pemerintahan. Pemerintahan Kerajaan Sunda memiliki hierarki yang jelas: Raja, Pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri (Mantri Agung), Membantu raja dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Para Mantri (Pejabat Tinggi), Bertugas mengatur berbagai sektor seperti ekonomi, keamanan, dan hukum. Para Rakyan (Bangsawan dan Kepala Daerah), Mengelola wilayah kerajaan, termasuk wilayah vasal yang diperintah oleh penguasa lokal. Demung, Wedana, dan Lurah, Pemimpin di tingkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada penguasa daerah. *Ketiga*, Sumber Hukum dan Kebijakan. Kerajaan Sunda menjunjung tinggi hukum adat (pikukuh) yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa aturan hukum juga dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha yang berkembang saat itu. *Keempat*, Prinsip Demokrasi dan Musyawarah. Meskipun bersifat monarki, kerajaan ini tetap menerapkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam lingkungan istana dan di tingkat pemerintahan daerah. Raja sering berkonsultasi dengan para penasihat dan pemimpin lokal sebelum menetapkan kebijakan penting. Kelima, Sistem Pertahanan dan Keamanan. Kerajaan Sunda memiliki angkatan perang yang kuat, dipimpin oleh seorang Senapati. Pasukan kerajaan bertugas melindungi wilayah dari ancaman luar, seperti ekspansi Majapahit dan serangan dari Kesultanan Demak. *Keenam*, Hubungan Luar Negeri Kerajaan Sunda dikenal memiliki hubungan dagang yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti Sriwijaya, Majapahit, bahkan pedagang dari India dan Tiongkok. Hubungan diplomatik juga dilakukan, seperti persekutuan dengan Portugis di Malaka pada abad ke-16 untuk menghadapi ancaman Demak dan Cirebon.

Kerajaan Sunda adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkembang sejak abad ke-7 hingga abad ke-16. Kerajaan ini

memiliki sistem politik yang bercorak monarki feodal, di mana kekuasaan raja bersifat absolut tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai adat dan keagamaan. Struktur pemerintahan, hukum, serta hubungan luar negeri Kerajaan Sunda menunjukkan keseimbangan antara kekuasaan pusat dan otonomi daerah.

Kerajaan Sunda menganut sistem pemerintahan monarki feodal, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi tetapi tetap mempertahankan struktur pemerintahan berjenjang. Sistem ini memungkinkan penguasa lokal untuk memiliki otoritas di bawah raja, menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah.

Sebagai raja, penguasa Kerajaan Sunda dianggap sebagai pemimpin politik, agama, dan militer. Raja juga memiliki peran sebagai pelindung rakyat serta pemelihara keseimbangan kosmos, sesuai dengan konsep Dewa-Raja yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha.

Sistem pemerintahan Kerajaan Sunda terdiri dari beberapa tingkatan, dari pusat hingga daerah: Pemerintahan Pusat (Istana), terdiri dari : *Raja*. Pemimpin tertinggi yang memiliki wewenang dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan keagamaan. Dipandang sebagai wakil dewa di bumi (konsep dewaraja), sehingga kebijakan yang dikeluarkan bersifat mutlak. Raja dipilih berdasarkan sistem pewarisan takhta, biasanya dari garis keturunan langsung. *Perdana Menteri* (Mantri Agung). Membantu raja dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Bertanggung jawab atas koordinasi antara raja dan pejabat kerajaan lainnya. Dan *Para Mantri* (Pejabat Tinggi Negara). Pejabat yang membawahi berbagai sektor, seperti ekonomi, militer, dan hukum. Mereka bertugas untuk menjalankan kebijakan raja di seluruh wilayah kerajaan.

Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah (Wilayah Vasal dan Provinsi), Kerajaan Sunda terdiri dari beberapa daerah yang dikelola oleh penguasa lokal: *Rakyan* atau Prabu Anom. Kepala daerah yang ditunjuk oleh raja untuk mengelola provinsi tertentu. Bertugas menjaga stabilitas politik dan ekonomi di daerahnya. *Demung, Wedana, dan Lurah*. Penguasa lokal yang bertanggung jawab atas pemerintahan desa atau komunitas kecil. Mereka menjalankan hukum adat dan bertindak sebagai perwakilan kerajaan di tingkat bawah.

Hukum dalam Kerajaan Sunda berlandaskan adat istiadat dan ajaran Hindu-Buddha. Beberapa sumber hukum utama meliputi: *Pikukuh* (Hukum Adat). Peraturan yang mengikat masyarakat dan harus dipatuhi tanpa pengecualian. Hukum adat menekankan keseimbangan sosial, keadilan, dan keharmonisan. *Hukum Keagamaan*. Dipengaruhi oleh Hindu-Buddha, dengan ajaran tentang

karma dan dharma sebagai pedoman moral. Beberapa aspek hukum diadopsi dari ajaran keagamaan yang berlaku di kerajaan. *Sanksi & Hukuman*. Hukuman dalam Kerajaan Sunda bersifat tegas, mulai dari denda, kerja paksa, hingga hukuman mati. Pejabat yang terbukti korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai hukuman berat.

Meskipun berbentuk monarki, Kerajaan Sunda tetap menerapkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dalam beberapa aspek berikut: *Sidang Dewan Kerajaan*. Raja sering berkonsultasi dengan penasihat dan pejabat tinggi sebelum mengambil keputusan penting. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam kebijakan ekonomi, keamanan, dan hubungan luar negeri. *Musyawarah Masyarakat* (Rapat Adat). Rakyat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpin lokal dalam forum musyawarah. Pemimpin daerah seperti Demung dan Wedana bertugas menyampaikan hasil musyawarah ke tingkat yang lebih tinggi. *Tradisi Gotong Royong & Partisipasi Rakyat*. Masyarakat ikut berperan dalam pembangunan kerajaan, seperti dalam pembangunan infrastruktur dan irigasi. Sistem kerja bakti (gotong royong) diterapkan dalam proyek-proyek kerajaan.

Kerajaan Sunda memiliki sistem militer yang kuat untuk menjaga wilayahnya dari ancaman eksternal, seperti ekspansi Majapahit dan serangan Kesultanan Demak. *Senapati* (Panglima Militer). Bertanggung jawab atas strategi perang dan pertahanan kerajaan. Mengendalikan pasukan yang ditempatkan di berbagai wilayah kerajaan. *Pasukan Kerajaan*. Terdiri dari prajurit profesional dan prajurit rakyat yang dimobilisasi saat perang. Beberapa pasukan elit dikenal dengan keahlian bertempur dan bela diri yang tinggi. *Benteng dan Pertahanan Alam*. Kerajaan Sunda memanfaatkan benteng alami seperti gunung dan sungai untuk pertahanan. Wilayah Pakuan Pajajaran memiliki sistem pertahanan yang kuat dengan tembok dan parit.

Kerajaan Sunda memiliki kebijakan luar negeri yang aktif dalam perdagangan dan aliansi politik: Hubungan Dagang. Memiliki hubungan dagang dengan kerajaan lain seperti Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan di India dan Tiongkok. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pusat perdagangan yang strategis. Aliansi Politik. Pada abad ke-16, Kerajaan Sunda menjalin hubungan dengan Portugis di Malaka untuk menghadapi ancaman Demak dan Cirebon. Sayangnya, aliansi ini tidak berhasil karena Portugis gagal memenuhi janjinya untuk melindungi Sunda Kelapa dari serangan Demak.



Kerajaan Sumedang Larang akhir kekuasaan Sunda

BAB 7 MODEL KEPEMIMPINAN SUNDA

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Bukan hanya menjadi domain para eksekutif atau manajer, kepemimpinan adalah kualitas yang dapat dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai tingkatan dan bidang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi.

Sementara itu, Civitas akademika di Amerika Serikat menyebutkan pengertian kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selainnya dalam usaha mencapai suatu tugas bersama. Menurut William G. Scott (1962), kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok, dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangakan Weschler dan Massarik (1961), mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam situasi tertentu, dan diarahkan melalui proses komunikasi, untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekadar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain. Dalam dunia yang terus berkembang ini, pemimpin yang efektif adalah aset berharga bagi setiap organisasi.

Efektifitas dalam tatakelola Negara akan sangat bergantung dari kepiawaian seorang pemimpin, sehingga Sun-Tzu dalam The Art of War menyebutnya sebagai the art of Genderal. Kapamingpinan dina masyarakat Sunda ngacu kana naskah kuno Sanghiyang Siksa Kandang Karesian (1518 M) nu di nyutat perilaku Prabu Jayadewata/Siliwangi, nu pupusna tahun 1512, ngeunaan tuduh laku tatakrama pikeun jadi pamingpin di masyarakat jaman harita. Eta

palanggeran teh disebut Parigeuing a Parigeuing. Parigeuing mah ngarana: bisa nitah bisa miwarang, ja sabda arum wawangi, nya mana henteu surah di piwarang. (Nu di sebat parigeuing teh nyaeta bisa marentah bisa miwarang ku caritaan nu pikageunaheun tepi ka teu matak jengkel nu di parentahna). Pemimpin yang baik dan ideal, menurut naskah Sanghyang Hayu, juga harus berpegang teguh kepada prinsip astaguna ”delapan kearifan” agar kepemimpinannya berjalan selaras, baik, dan harmonis.

Kepemimpinan Sunda tergolong kepada tipe kepemimpinan transending totaliter. Tipe kepemimpinan ini ditandai dengan tidak adanya dialog dalam proses peleburan nilai-nilai dan harapan melalui indoktrinasi. Bawahan digambarkan berada di tengah situasi darurat yang memerlukan keputusan segera tetapi bawahan masih berada dalam kebingungan.Sehingga hirarkhi prioritas nilai ditentukan oleh pemimpin tanpa kompromi dengan pengikut.Kepemimpinan dapat dilihat dari hasilnya.Kepemimpinan Sunda termasuk ke dalam kategori tipe kepemimpinan transforming enterpreneurship. Hal ini dapat kita temukan pada elemen-elemen yang dipimpin oleh sebagian pemimpin Sunda berada dalam situasi yang cukup kompetitif sehingga Priadi Surya, Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan hal. 64-77, No. 02/Th VI/Oktober/2010 71 pemimpin perlu mentransformasikan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam persaingan tersebut.Kemudian, nilai-nilai yang ditransformasikan pemimpin menciptakan kemandirian bagi pengikutnya.

Kepemimpinan juga dilihat dari sumber kekuasaan. Kepemimpinan Sunda termasuk tipe kepemimpinan transaksional kharismatis. Kepemimpinan seperti ini dalam penyampaian ide, gagasan dan nilai disertai dengan dimensi citra diri atau pesona pemimpin menanamkan unsur emosional antara pemimpin dan pengikut.Oleh karenanya, figur pemimpin adalah sebagai orang yang berjasa atau memiliki kelebihan dibandingkan pengikutnya.Untuk beberapa kondisi hal ini dapat mempermudah pemimpin menawarkan gagasannya dan pengikut lebih mudah percaya pada figur pemimpinnya.

Hal menarik yang terdapat dalam kepemimpinan Sunda, yaitu nyalindung ka gelung yang makna intinya adalah tergantung pada orang lain, tidak punya sikap. Arti luas ungkapan nyalindung ka gelung, tidak mau berusaha, menyandarkan, diri kepada pendapatan sang istri, atau mertua. Nyalindung artinya berlindung, menyerahkan, mempercayakan hidup terhadap sesuatu atau kepada seseorang karena yang digelung (berkonde) itu biasanya istri. Pemaknaan ini mengindikasikan bahwa di kala kepemimpinan suami atau laki-laki itu tidak berjalan maksimal, perempuan sebenarnya memiliki kemampuan

yang luar biasa untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi. Potensi kepemimpinan yang sebenarnya dimiliki perempuan yang jika diberikan kesempatan dapat saja memberikan sumbangan berarti.

"Betapa gigihnya para sesepuh Sunda zaman dahulu menggali apa yang terjadi dalam perjalanan panjang sejarah bangsa kita. Dan itu terungkap melalui pemahaman-pemahaman dalam pedoman hidup, sebuah warisan berharga sebagai pegangan dari pemimpin terendah hingga pemimpin tertinggi.Kita mulai dari pemimpin keluarga. Ada peribahasa gagade bari nyarande. Setiap orangtua, pasti senantiasa mendambakan anaknya maju, jauh melebihi kemajuan yang dicapai oleh orangtuanya. Kata ayahnya -"*Kilangbara atuh, bapa jadi patani, maneh mah kudu jadi pamingpin*-". Jawab anaknya : *Atuh, Pa. Piraku bapa ngongkosan abdi, ngaluarkeun ongkos langkung tina kabutuhan bapa*. Kata ayahnya, *Keun bae bapa mah gagade bari nyarande ge, asal hidep bisa leuwih ti bapa*. Itu adalah contoh kepemimpinan yang diperlihatkan oleh seorang ayah, pemimpin yang berani berkorban untuk kemajuan anaknya. Pemimpin harus seperti itu, ia harus lebih mementingkan kesejahteraan dan kemajuan anak buahnya.

Jangan jadi pemimpin yang nyalindung ka gelung. Tergantung pada orang lain, tidak punya sikap. Coba kita *guar istilah haripeut ku teuteureuyeun*. Itu kan gambaran keserakahan. Kalau jadi pemimpin jangan haripeut ku teuteureuyeun. Artinya, jangan serakah, jangan korupsi atau kolusi. Begitu kira-kira. Kemudian istilah *kejot borosot*. Anak-anak sekarang mungkin tidak mengenal ungkapan itu. Maksudnya: seorang pemimpin janganlah mengambil Keputusan terlalu cepat atau tergesa-gesa.

Begitu banyak ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya bukan sekadar ungkapan, istilah atau peribahasa, sebab kalau dihayati ternyata memiliki makna yang dalam sebagai pedoman hidup. Dan kalau petuah para sesepuh itu dijalankan, dilaksanakan, akan terasa manfaat dan dampaknya, baik bagi pemimpin keluarga atau pemimpin yang lebih tinggi lagi. Sangat banyak ungkapan-ungkapan Sunda yang bisa dijadikan pedoman untuk dikonsepkan, sehingga Kepemimpinan Sunda tetap berpijak pada filsafat (paramalenyep) kasundaan.

Tradisi kepemimpinan Sunda menurut Haji Hasan Mustapa adalah nyantri, nyakola dan nyunda. *Pertama*, pemimpinan itu harus memiliki kecerdasan spiritual yang disimbolisasikan dengan nomenklatur nyantri. Spiritualitas menjadi harga mati sebagai benteng terakhir agar seorang pemimpin sadar betul bahwa kepemimpinan adalah amanah yang musti dipertanggungjawabkan. Nomenklatur santri mengandaikan seorang pemimpin menjangkarkan setiap langkah berada dalam terang religiositas sehingga dia berpikir seribu kali ketika

hendak melakukan tindakan basilat (korupsi). Dalam era global, pemerintahan dan perusahaan besar yang dapat bertahan seseungguhnya berjangkar pada kunci kepekaan kesantrian ini (dimensi mistik) seperti dapat kita baca dalam buku The Corporate Mystic: A Guidebook for Visionaries with Their Feet on The Ground-nya Gay Hendricks dan Kate Ludeman (1996).

Tentu saja kesantrian ini tidak harus kita pahami sebagai bentuk aksentuasi penerapan agama formal dalam arti sempit, namun justru yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai agama menjadi haluan etika sosial untuk diterapkan setiap orang apapun afiliasi institusi agama resminya sebagaimana dengan memikat ditulis filsuf besar Haji Hasan Mustapa di atas dalam judul *Hariring Nu Hudang Gering*. Bahkan lebih jauh dieskplorasi bahwa ketika santri ini hanya berhenti sebatas 'tanda' formalitas pembeda dengan abangan dan priyayi maka sesungguhnya pada saat itu juga kualifikasi santri tidak akan banyak berbicara kalau tidak justru ikut ambil bagian dalam tradisi korupsi. Kita simak tafsir menarik Haji Hasan Mustapa berikut ini:

Barodona alam nyantri
Tacan kitab tacan Quran
Tacan daraek masantren
Tacan agama drigama
Kaula era paradah
Sirung ngamomore dapur
Dapuran kamanusaan

Tentu saja seorang pemimpin harus nyakola. Memiliki nalar yang memadai agar apa yang dikatakan dan menjadi bagian dari pengambilan kebijakan benar-benar sebanding lurus dengan hajat publik. Nyakola tidak identik dengan gelar akademik, tidak musti dimaknai dengan strata jenjang-jenjang perkuliahan apalagi kalau gelar akademik diperoleh dengan cara cacat. Nyakola sesungguhnya adalah simbol dari seseorang yang lebih mementingkan nalar ketimbang tubuh. Nalar yang tidak pernah berhenti berpikir. Tidak pernah berpikir juga menggadaikan nalar untuk kepentingan sesaat, memburu kekuasaan dengan cara tidak terhormat seperti dapat kita baca dari riwayat pemimpin pra kemerdekaan: mereka datang di panggung politik tidak dengan kepala kosong namun dengan segudang gagasan yang mencerminkan keakraban mereka dengan tradisi geneologi pengetahuan seperti nampak pada : Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Agus Salim, Cokroaminoto, Natsir, dan lainnya sehingga ruang politik menjadi ramai dengan perdebatan mencerahkan.

Saat ini diakui atau tidak, nalar inilah yang nyaris punah dalam pergaulan politik kebudayaan kita sehingga nyaris pemimpin yang dilahirkan tak ubahnya dengan mereka yang tidak mampu berpikir, tidak merumuskan visi jauh ke depan. Karena nalar absen maka menjadi sangat tidak aneh kalau yang muncul ke permukaan adalah bukan nyakola tapi ”tubuh”: pencitraan, politik transaksi, selebrasi politik, dan popularitas. Dalam performa seperti ini jangan berharap akan muncul perdebatan sengit ideologis, justru yang tersisa adalah perayaan memburu kekuasaan pragmatis dengan cara-cara yang tidak elok.

Tentu nyunda sebagai persyaratan ketiga tidak harus dimaknai secara reduktif sekadar referensi etnis geografis yang merujuk pada wilayah Pasundan, namun nyunda adalah diksi dengan makna seperangkat nilai kesundaan yang harus dimiliki oleh para pemimpin dan calon pemimpin. Nilai-nilai itu hakikatnya adalah kearifan lokal *inklusif perennial* yang juga dimiliki oleh kultur lain.

Nyunda sebagai budaya terbuka yang juga dapat dimiliki oleh mereka yang tidak serupa secara geografis tempat kelahirannya. Maka pilihan rasionalnya kalau kita dihadapkan pada opsi: memilih orang sunda yang tidak nyunda atau non sunda namun nyunda? Tentu saja kalkulasi rasionalitas publik akan menjatuhkan pilihan kepada yang kedua.

Karena nyunda adalah nilai budaya dan kearifan perennial maka kita patut, kalau ada, menggugat klaim pemimpin kesundaan seseorang hanya sekadar dia berbicara bahasa Sunda dengan kepala yang dibakutet iket sementara tindakannya jauh panggang dari api dengan nilai-nilai kesundaan.

Nyunda sebenarnya mencerminkan, di antaranya, sosok pemimpin yang mampu menyatu dengan rakyat secara tulus (*ngumawula ka wayahna*) pribadi yang *teu ningkah* (tidak bertingkah); *teu adigung kamagungan* (tidak pongah dan memperlihatkan sikap tinggi hati kepada orang lain); *teu paya diagreng-agreng* (tidak suka dimeriahkan dengan kemegahan); *nyaah kanu masakat* (mencintai yang melarat); *agung maklum sarta adil* (arif dan adil); dan *landung kandungan, laer aisan* (memiliki perspektif yang luas).

Bagi orang Sunda, mencari seorang pemimpin selalu terkesan sangat sulit. Hal ini lebih disebabkan oleh kultur dan interpretasi yang keliru pada teks-teks agama yang mereka anggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam nilai budaya “urang Sunda”, maka yang lahir kemudian adalah krisis kepemimpinan yang berujung pada inferioritas orang Sunda dalam pergaulan di lingkup nasional.

Apa sebenarnya akar historis krisis kepemimpinan orang Sunda? Pertanyaan ini mutlak dikedepankan bukan untuk menghakimi masa lalu, mengingat sebagai masyarakat Jawa Barat kita hidup dalam penggalan sejarah dan merupakan bagian dari sejarah tersebut, melainkan untuk menggambarkan realitas yang bergerak secara dinamis dalam kesadaran kita, mampu mengontrol laju sejarah tersebut melalui stuktur kesadaran.

Akar-akar yang dimaksud adalah serpihan-serpihan, akumulasi nilai-nilai, dan struktur psikologis yang kita warisi dari masa lalu yang mengendap dalam kesadaran kolektif masyarakat Sunda. Inilah yang dalam ilmu sosiologi disebut “sistem nilai”.

Atribut akar-akar krisis tersebut patut dikritisi karena elemen-elemen yang tumbuh pada masyarakat Sunda tadi telah membias sangat jauh dalam stuktur kolektif budaya Sunda dan aktivitas mereka kerap dimanfaatkan oleh para pemimpin “pusat” melalui struktur otoritas.

Masyarakat Sunda memiliki karakteristik budaya yang diharapkan oleh Islam, maka tidak salah apabila banyak kalangan menyebutkan bahwa budaya Sunda sebenarnya adalah Islam yang pada titik akhir selalu menyebut bahwa Sunda adalah Islam. Menjadi Islam berarti menyandarkan segala pola hidup kepada Al Quran dan Sunah Rasul sebagai pedoman hidup, termasuk dalam hal kepemimpinan. Kita memahami dalil, “Janganlah kamu meminta-minta jabatan”, dengan interpretasi “tidak boleh” mengejar kepemimpinan. Akhirnya yang sering kita saksikan adalah minimnya gaung orang Sunda untuk bersaing memperebutkan kepemimpinan baik di kandang sendiri lebih-lebih di lingkup nasional. Orang Sunda lebih memilih tidak ikut-ikutan dan “mangga akang bae ka payun” daripada harus “berkeringat” menjadi yang terbaik. Hal-hal tersebut sangat tampak dalam pergaulan antaretnis, sipil militer, senior junior, dan sebagainya.

Al Quran sebenarnya menggambarkan bahwa kepemimpinan itu memang harus diperjuangkan. Karena menjadi pemimpin adalah amanah, ia harus didukung oleh perangkat ilmu pengetahuan yang cukup dan *track-record* yang bersih. Ia harus sanggup menjaga, melindungi, dan melestarikan masyarakat dan lingkungannya dengan baik dan jangan membiarkan yang telah rusak menjadi lebih rusak.

Kepemimpinan berdasarkan ashobiyah tersebut, menurut Ibnu Khladun memiliki enam karakter. *Pertama*, seorang pemimpin harus berpengetahuan disertai kesanggupan untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan hukum. Menurut Ibnu Khaldun, seorang pemimpin harus menempatkan hukum sebagai aturan yang pokok. Ia sendiri tidak boleh bermain dan mempermainkan hukum; *Kedua*, ia

harus adil. Artinya bersikap jujur, berpegang pada keadilan, dan memiliki sifat-sifat moral yang baik sehingga perkataan dan tindakannya dapat dipercaya. *Ketiga*, ia memiliki kesanggupan menjalankan tugas-tugas yang dituntut dari padanya sebagai pemimpin pemerintahan, termasuk melaksanakan hukum yang diputuskan secara konsekuen. *Keempat*, secara fisik dan mental, ia harus bebas dari cacat yang tidak memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik; *Kelima*, pemimpin sebuah pemerintahan harus berasal dan dipilih dari suku sendiri; *Keenam*, seorang pemimpin harus lemah lembut dan sopan santun terhadap pengikutnya dan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan wajib membelanya dan juga tidak mencari-cari kesalahan rakyat.

Keenam teori Ibnu Khaldun ini merupakan bukti nyata dalam setiap pola kepemimpinan manapun terlebih sebagai mantan aparatur pemerintahan pada zamannya; Ibnu Khaldun pernah merasakan bahwa kepemimpinan yang didukung masyarakat yang berdasarkan solidaritas sosial dan berasal dari suku sendiri akan mampu menjadikan pemerintahannya menjadi kokoh.

Falsafah kepemimpinan dalam setiap budaya sudah lazim berbeda satu sama lain. Begitu pula dalam masyarakat Sunda. Setiap pemimpin, pasti senantiasa mendambakan anak buahnya maju, jauh melebihi kemajuan yang dicapai oleh pemimpinnya. Kepemimpinan yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin perempuan yang berani berkorban untuk kemajuan anak buahnya. Hal ini terlambangkan dalam ungkapan *gagade bari nyarande*. Peribahasa Sunda yang bermakna mencari sandaran untuk menopang kondisi ekonomi yang mungkin sangat pas-pasan. Pemimpin harus seperti itu, ia harus lebih mementingkan kesejahteraan dan kemajuan anak buahnya.

A. Dasa Pasanta

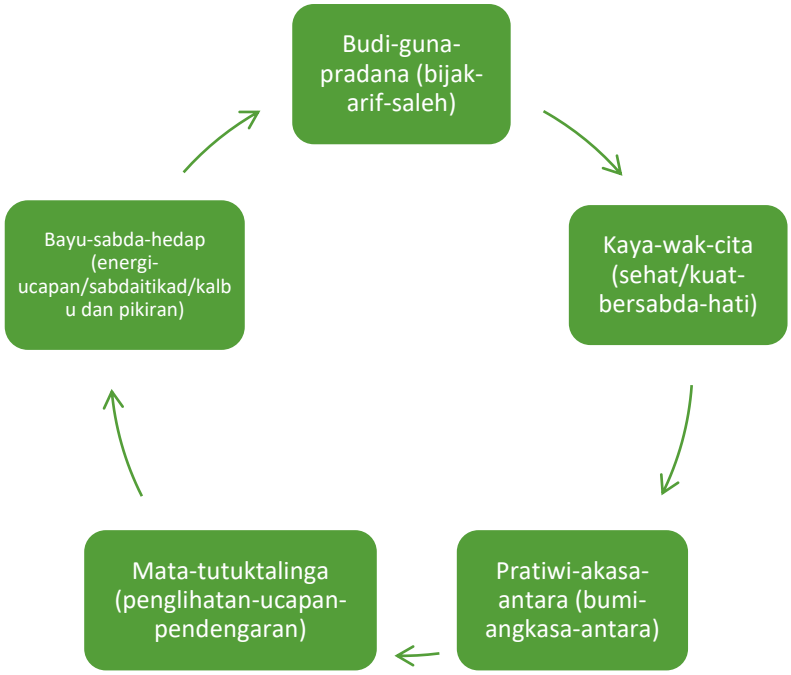
Kepemimpinan dalam masyarakat Sunda mengacu kepada naskah kuno Sanghiyang Siksa Kanda ng Karesian (1518 M) yang disebut dengan Rucita Parigeuing (konsep kepemimpinan). Yang dimaksud dengan rucita parigeuing (konsep kepemimpinan), dalam naskah Sunda Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, dikutip oleh Hidayat Suryalaga (1993:49-55). Nyutat perilaku Prabu Jayadewata/Siliwangi, ngeunaan tuduh laku tatakrama pikeun jadi pamingpin di masyarakat jaman harita. Eta palanggeran teh disebut *Parigeuing a Parigeuing* : “Parigeuing mah; bisa nitah bisa miwarang, ja sabda arum wawangi, nya mana henteu surah anu dipiwarang” (yang disebut parigeuing itu ialah; bisa memerintah dan menyuruh

denganbahasa yang menyenangkan hati, sehingga tidak menimbulkan ketidak senangan bagi yang diperintahnya).

Untuk Melaksanakan parigeuing caranya harus bisa melaksanakan Dasapasanta (Sapuluh Penentram Hati), yaitu:

- *Guna*; perintah harus dimengerti atau dengan pemikiran yang sehingga pelaksanaannya akan disertai dapat memenuhi kegunaan dari tugas tersebut.
- *Ramah*; perintah hendaknya disampaikan dengan ramah/bijaksana sehingga orang yang diperintah merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki nilai pribadi.
- *Hook* (kagum); perintah harus dapat dirasakan sebagai bentuk kekaguman atas kemampuan orang yang diperintah, sehingga dapat menjadi dorongan (motif) dalam melaksanakan tugasnya.
- *Pesok* (bangga); perintah disampaikan dengan cara yang memikat hati, sehingga bawahan merasa senang dan bangga dalam melaksanakan tugasnya.
- *Asih* (perhatian); perintah yang disampaikan disertai dengan rasa kasih sayang, sehingga bawahan merasa dirinya menjadi bagian dari orang yang memerintah, hal ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya.
- *Karunia* (anugrah); perintah hendaknya dapat dirasakan sebagai anugrah bagi bawahan atas kepercayaan dari pemimpinnya, sehingga bawahan bekerja sungguh-sungguh karena tugas itu dianggap sebagai suatu kehormatan bagi dirinya.
- *Mukpruk* (bimbingan); perintah periu disertai bimbingan/arahan agar jelas bagaimana mengerjakannya, dengan demikian tugas itu dianggap sebagai kewajibannya.
- *Ngulas* (mengulas); pemimpin hendaknya memberikan ulasan (komentar/evaluasi) terhadap hasil kerja bawahan dengan kata-kata yang bijaksana, walaupun harus mengoreksi kesalahan hasil kerja bawahan.
- *Nyecep* (sejuk); pemimpin harus dapat menyejukan hati bawahannya, dengan cara memberikan sesuatu, dapat berupa ucapan terima kasih atau berbentuk barang (insentif materil/non materil), sehingga bawahan merasa senang.
- *Ngala angan* (menarik simpati); pemimpin hendaknya mampu menarik simpati/mengambil hati bawahan dengan cara memperhatikannya, menjalin silaturahmi, sehingga dapat menimbulkan kesetiaan (loyalitas) dan pengabdian (dedikasi) bawahan terhadap pemimpin.

Dalam naskah Sanghyang Hayu yang merupakan naskah berbahan nipah abad XVI Masehi, dipaparkan lima belas unsur penting yang harus dimiliki pemimpin, yang terangkum ke dalam lima kelompok, sebagaimana dikemukakan Darsa (1998).



- Semuanya berhubungan satu sama lain yang membangun sikap dan karakter pemimpin ideal). Pemimpin yang baik (naskah Sanghyang Hayu), harus berpegang teguh kepada prinsip astaguna ”delapan kearifan” agar kepemimpinannya berjalan selaras, baik, dan harmonis.

- *Pertama*, animan (lemah lembut), pemimpin harus memiliki sifat lemah lembut, dalam arti tidak berperilaku kasar.
- *Kedua*, ahiman (tegas), bersikap tegas, dalam pengertian tidak plinplan (panceg haté).
- *Ketiga*, mahiman (berwawasan luas), memiliki berbagai macam pengetahuan dan berwawasan tinggi agar tidak kalah dari bawahannya.
- *Keempat*, lagiman (gesit/cekatan/terampil), dituntut terampil dan gesit serta cekatan dalam bertindak atau melakukan suatu pekerjaan.

- *Kelima*, prapti (tepat sasaran), memiliki ketajaman berpikir serta tepat sasaran karena jika keliru atau berspekulasi akan menghambat suatu pekerjaan.
- *Keenam*, prakamya (ulet/tekun), memiliki keuletan dan ketekunan yang sangat tinggi.
- *Ketujuh*, isitna (jujur), dituntut memiliki kejujuran, baik dalam perkataan, pemikiran, maupun perbuatan, agar dipercaya orang lain (rekan kerja/bisnis/perusahaan/negara lain) dan bawahannya. Dengan demikian, terjalin kesepahaman yang harmonis.
- *Kedelapan*, wasitwa (terbuka untuk dikritik), memiliki sikap legowo dan bijaksana sehingga mau menerima saran dan terbuka untuk dikritik jika berbuat salah atau menyimpang dari aturan

B. Saptakrida

Bagi seorang pemimpin yang Nyunda tentunya perlu mengadaptasi simbol-simbol, pemikiran-pemikiran, sikap dan perilaku yang digariskan oleh filosofis kehidupan Ki Sunda, menurut pemikiran dari E.T. Rustanto (Aom Vanriest), dalam blognya yang berjudul Potensi Budaya Politik Sunda dalam Lingkup Dinamika Politik Nasional. Menurut Aom Vanriest, Saptakrida, adalah :

Pertama, Sikap politik Sunda dalam hal Kerukunan Agama, sikap politik Ki Sunda dalam menciptakan kerukunan beragama memiliki prinsip WIWAHA (Wi yaitu dua, dan Waha = pemikiran) artinya toleransi dan tenggang rasa. WIWAHA berasal dari filsafat Sunda *"Wedel Iman Wajib Amaliah Hukumullah Ahlakulkarimah"* yaitu Kekuatan keimanan harus diwujudkan dalam perbuatan amal ibadah yang berdasarkan ketentuan agama masing-masing.

Kedua, Sikap politik Sunda dalam hal Kepemimpinan dan Pemerintahan. Dalam hal kepemimpinan, budaya politik Sunda menggariskan LURAH, yaitu: L adalah *Landung kandungan laer aisan, leuleus jeujeur liat tali*; U adalah *Ulah lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang*; R adalah *Ramah tamah, rikrik gemi*; A adalah *Asak jeujeuhan, asih asuh asah*, dan H adalah Hade tata, hade basa, Hade gek, Hade pok tur Handap asor.

Ketiga, Sikap Politik Sunda dalam Penegakan hukum dan keadilan, dalam simbol 'TUMUT " ka sabda ratu. T = *Tara sirik pidik jail kaniaya*, U = *Ulah cueut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng*, M = *Mo' unggut kalinduhan, moal gedag kaanginan*, U = *Ulah ngusik ula manik, ngahudangkeun macan turu*, dan T = *Titah ratu, sabda raja*

Tetekon hukum nu tangtu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Ki Sunda dalam menegakkan keadilan senantiasa *positif thinking* dan tidak disertai rasa dendam.

Keempat, Sikap Politik Ki Sunda dalam Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan. Dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, budaya politik Sunda menganut sistem "SUBUR" ma'mur gemah ripah loh jinawi yaitu, S = *Saeutik mahi loba nyesa*. U = *Ulah adean ku kuda beureum*; B = *Bengkung ngariung bongkok ngaronyok*, U = *Ulah ngaliarkeun taleus ateul*, dan R = *Repeh rapih, kerta raharja*.

Kelima, Konsep Politik Ki Sunda dalam hal kesatuan, persatuan, ketertiban dan keamanan. Dalam hal kesatuan, persatuan, ketertiban dan keamanan, Budaya Politik Sunda mengandung prinsip, boga "WATES," wangenan yaitu berasal dari W = *Waspada permana tinggal*; A = *Ayem tengtrem, kerta raharja sepi paling towong rampog*, T = *Tiis ceuli herang mata, caina herang laukna beunang*. E = *Entong endag buuk salambar ngabela lemah cai*, serta S =*Sareundeuk saigel, sabata sarimbagan, saketek sapihanean*.

Keenam, Sikap Politik Sunda dalam Hal Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam hal meraih kemajuan bangsa melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, budaya politik Sunda menganut sistem "NANJUNG" yang berasal dari konsep N = *Nete taraje nincak hambalan*; A = *Asak jeujeuhan , N yaitu Ngadek sacekna, nilas saceplasna*, J = *Jembar pangabisa*; U = *Ulah heureut ku sateukteuk*; N = *Ngindung ka waktu, mibapa ka zaman*, serta G = *Gemah ripah lohjinawi*.

Ketujuh, Sikap Politik Ki Sunda dalam Aspek Sosial-Budaya. Dalam bidang hubungan sosial dan pengembangan budaya, konsep politik Sunda menggunakan prinsip "GENAH" tur tumaninah. G adalah *Guru ratu wong atua karo*; E berasal dari *Entong Poho Ka Purwadaksina*, N yaitu *Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu keueung*, A adalah *Akal budi lantaran ti pada jalma, Adat tatali karuhun* serta H artinya *Handap asor, hade hate, hade tata hade basa, hade gek, hade pek*.

C. Tri Tangtu

Tri Tangtu merupakan dasar dari akar falsafah Sunda, Tri Tangtu merefleksi segala sistem dalam Budaya Sunda seperti pada sistem Negara, sistem Sosial, sistem Hukum, sistem Seni dan lain sebagainya. Masyarakat tradisional Sunda memaknai tri tangtu sebagai falsafah hidup yang

berpedoman 3 unsur utama semesta, yaitu Tuhan, Alam, dan Manusia.

Menurut Stephanus Djunatan (2011), kebahagiaan tidak akan diperoleh jika tidak terjadi keseimbangan hidup antara tiga ketentuan tersebut yakni manusia, alam, dan Tuhan. Dengan kata lain, masyarakat Sunda meyakini kebahagiaan dan kesejahteraan hanya akan diperoleh jika manusia dapat memelihara hubungan harmonis antara dirinya dengan sesama, antara dirinya dengan Tuhan, dan juga antara dirinya dan alam.

Asas Tritangtu mendasari cara berpikir masyarakat Sunda dalam memaknai budayanya. Benda maupun produk budaya berasaskan Tritangtu misalnya :

1. Kujang (yang mempunyai tiga fungsi sekaligus yakni; pukul, potong, dan tusuk).
2. Boboko (wadah nasi yang dibuat dari jalinan bambu yang memilki tiga bentuk yakni bundar, segi delapan, dan bujur sangkar).
3. Rumah adat Sunda (terdiri dari ruang tengah, ruang belakang, dan ruang depan).
4. Pola kampung Adat Baduy Dalam (Cikeusik-pemilik mandat, Cikertawana-pelaksana mandat, dan Cibeo-penjaga mandat).

Secara konseptual, sebutan Tritangtu dapat ditemukan dalam naskah Sunda lama, Sang Hyang Siksakanda-ng Karesian (1518) pada lempir 26, yang berbunyi “ Ini tritangtu di bumi, Bayu pinahka prebu, sabda pinakha rama, hedap pinahka resi” (inilah tiga ketentuan di dunia, Kesentosaan kita ibarat raja, ucap kita ibarat rama, budi kita ibarat resi). Tritangtu di atas mengandung bayu, sabda, hedap atau lampah, ucap, tekad dalam bahasa Sunda sekarang.

Setiap manusia memiliki tiga hal, yaitu tekad atau keinginan dan kehendak, ucap yang berarti pikiran dan lampah yang berarti tindakan. Kalau seorang melakukan sesuatu tentu ada tujuan dan keinginannya, dan tindakan itu dilakukan setelah dipikirkannya. Tekad, ucap, lampah adalah tiga potensi manusia yang merupakan satu kesatuan untuk menandakan bahwa dia itu hidup.

Tri tangtu juga diterapkan dalam pemikiran masyarakat tradisional Sunda, antara lain:

1. Silih asah, silih asih, silih asuh;
2. Tekad, ucap, lampah;
3. Naluri, nurani, nalar;
4. Leuweung larangan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan;

5. Dunia atas, dunia bawah, dan dunia tengah.

Dalam pengaturan tata ruang terbagi dalam tiga bagian : tonggoh, landeuh, dan lebak. Sementara itu, dalam arsitektur rumah adat terbagi atas: para, panggung dan kolong dengan setiap bagian memiliki fungsi dan peruntukannya masing-masing. Adapula prinsip akur-sakasur, akur sadulur, dan akur salembur, dalam konteks -keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan.

Adapula Tri Tangtu Salira, tiga titik pusat dari tiga bagian tubuh yaitu Dada, Perut dan Kepala disebut titik-titik DA, SA, RA. DA : titik pusat bagian dada yaitu pada jantung yang merupakan representasi dari unsur Tuhan, Ini dijelaskan karena jantung adalah pusat hidup atau pusat tempat masuknya energi yang menghidupkan yang berasal dari Tuhan yang disebut Dada. Wilayah dada ini adalah wilayah Asih dan wilayah Ketuhanan. SA : titik pusat bagian perut yaitu pada pusar atau udel, sebagai titik pusat proses perwujudan; bahwa kita diwujudkan didalam perut ibu melalui tali ari-ari yang menyambungkan Bali dan pusar kita. Wilayah Perut ini merupakan representasi dari unsur Alam yang mengasah atau membentuk wujud diri. RA : titik pusat Otak, titik RA adalah suatu kelenjar yang merupakan pusat syaraf dan pusat otak yang merupakan pula pusat pengendali Badan dan Kehidupan. Wilayah RA ini mewakili unsur Manusia karena kepala inilah yang membedakan manusia dengan mahluk lain dengan kata lain kepala adalah wilayah kemanusiaan atau wilayah Asuh.

Titik RA ini dilambangkan sebagai matahari (atau Dewa Matahari), Manik Maya atau Rajawali atau Singha atau titik Jenar (Merah). Titik RA yang merupakan pusat segala syaraf yang terdapat pada sum-sum tulang belakang yang berjumlah 25 ruas ditambah 7 ruas tulang leher dilambangkan sebagai Naga (naga kuning atau emas) atau Ular berkepala 7 (didalam cerita Hindu), jadi Naga-Ra adalah badan kita sendiri.

25+7+1 (RA) = 33. Mungkin inilah yang disebut Nu satelu puluh telu oleh orang Kanekes (Baduy), dan menurut cerita, tinggi tiang utama istana Pajajaran adalah 33 depa. Hitungan 33 juga dipakai sebagai patokan pada Tarawangsa, yaitu dari gong ke gong adalah 33 ketukan.

RA sebagai pusat pengendali kehidupan dimana wujud kehidupan ini merupakan Tri Tangtu yaitu Tri Karma yang terdiri dari Bayu, Sabda, Hedap atau Pikir, Ucap dan Lampah (perbuatan). Tiga unsur tadi mempunyai Energi dan tiap manusia mempunyai Frekwensinya masing-masing.

Akumulasi dari 3 energi ini disebut RAHA (Roh).Tri Karma atau Pikir, Ucap, Lampah ini juga ditentukan oleh Galuh, Galeuh dan Galih atau menurut istilah sekarang Naluri, Nurani dan Nalar (SQ,EQ dan IQ).

Dalam naskah amanat Galunggung Kropak 632 menjelaskan tentang kedudukan Tri Tangtu Di Bumi yaitu: Rama-Resi-Ratu. Rama : Representasi dari unsur Tuhan yang dimanifestasikan dalam tugas Rama yaitu bidang spiritual, dimana seorang rama ini adalah manusia yang sudah meninggalkan kepentingan duniawi, sehingga bisa menjaga rasa asih dan bijaksana. Resi : Representasi dari unsur alam yang merupakan penyedia bagi kepentingan kehidupan, maka para Resi merupakan ahli-ahli atau guru-guru didalam bidang-bidang diantaranya pendidikan, militer, pertanian, seni, perdagangan, dan lain sebagainya. Misinya adalah Asah. Ratu : Representasi unsur manusia yang bertugas untuk mengasuh seluruh kegiatan dan kekayaan negara. Karena misinya adalah Asuh, maka didalam tatanan Sunda para pemimpin ini disebut Pamong atau Pangereh dan bukan Pemerintah.

Tritangtu (Rama, Resi, Ratu) didalam kearifan lokal sunda sudah ada jauh sebelum apa yang orang kenal Trias politaca (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Dewasa ini dikenal pula tritangtu dalam bentuk :

1. Galeuh/rasa/amal/lampah atau bisa disebut pula RATU atau sekarang disebut EQ. Emotional Quotient.
2. Galih/logika/ilmu/ucap atau disebut pula RAMA atau sekarang disebut dengan IQ, Intellectual Quotient.
3. Galuh/jiwa/tekad atau disebut RESI atau dekade sekarang ada SQ Spiritual Quotient.



Konsep Tritangtu di Buana

BAB 8 DEMOKRASI ALA SUNDA : PARTISIPATIF DAN MUSYAWARAH

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, berasal dari bahasa Yunani *dēmokratía* (kekuasaan rakyat), yang terbentuk dari dêmos (rakyat) dan kratos (kekuatan atau kekuasaan) muncul pada abad ke-5 SM. Demokrasi kemudian menjadi lebih populer, ketika Amerika Serikat (AS), berupaya untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara global.

Pada fase kemudian demokrasi menjadi sistem yang paling banyak dipakai dalam tatakelola pemerintahan negara-negara di dunia. Bahkan Francis Fukuyama, menyebutnya *the end of history and the last man*. Sejarah telah berakhir, dan yang jadi pemenangnya adalah demokrasi, karena dalam bukunya tersebut Fukuyama menyebut bahwa sistem-sistem seperti sosialis-komunis, teokrasi, dan yang lainnya telah gagal membawa negara dan rakyatnya menjadi lebih makmur, satu-satunya sistem yang berhasil adalah demokrasi.

Saat ini, mayoritas negara-negara di dunia berpaham demokrasi, dengan berbagai variannya, ada Presidensial, Parlementer, Semi-Perlementer, dan juga model adaptasi yang beraneka macam dalam prakteknya, meskipun seorang David Beetham, menyebut *democracy is democracy*, dan demokrasi yang memakai embel-embel dikatakan tidak demokratis.

Salah satu warisan karuhun kita dalam memilih pemimpin dan atau memecahkan masalah adalah musyawarah mufakat, dan saat ini menjadi usang digantikan oleh suara mayoritas atau suara terbanyak melalui *votting*. Sistem ini akan melahirkan oligarki mayoritas, tanpa membuka peluang kepada minoritas untuk mendapatkan peluang yang sama. Ketika kondisi ini berjalan dalam waktu yang lama, akan menyisakan rasa ketidakadilan.

A. Nilai Demokrasi Dalam Budaya Sunda

Budaya Sunda mengedepankan pendekatan ngariung, yaitu berkumpul untuk bermusyawarah demi mencapai mufakat. Tradisi ini menjadi dasar bagi pengembangan demokrasi partisipatif, di mana

semua suara dalam masyarakat dihormati. Tradisi musyawarah (rembug) merupakan praktik politik Sunda yang mengutamakan dialog untuk mencapai mufakat. Nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda yang selalu mengedepankan harmoni dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.

Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat lokal, yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Kearifan lokal dapat menawarkan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, keterbukaan, keadilan, dan kesejahteraan yang esensial untuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan inklusif. Nilai-nilai karakter kearifan lokal sunda dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat budaya demokrasi. Kearifan lokal Sunda adalah pengetahuan, nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Sunda, yang mayoritas mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten. Kearifan lokal Sunda menjadi pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi dengan wujud aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal.

Kearifan lokal sunda dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti nukilan, tritangtu, dan rumah bambu. Nukilan adalah kutipan atau peribahasa yang berisi petuah atau nasihat hidup yang bersumber dari naskah klasik atau sumber tertulis lainnya. Tritangtu adalah sistem tiga hal yang pasti, yaitu Batara Tunggal, Batara Keresa, dan Batara Bima Karana, yang menjadi pedoman hidup masyarakat Sunda dalam hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Rumah bambu adalah jenis rumah adat Sunda yang terbuat dari bahan alami, seperti bambu, kayu, dan ijuk, yang memiliki nilai estetika, ekonomi, dan ekologi.

Nukilan sunda “Bageur ka semah, bageur ka hayu” yang berarti “Baik kepada tamu, baik kepada tetangga”. “Indung suku gé moal dibéjaan” yang berarti “Ibu jari pun tak akan diberi tahu” mengajarkan tentang komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga rahasia. Mencerminkan pandangan hidup, moto, dan ungkapan-ungkapan tradisional Sunda yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nukilan sunda mencerminkan pandangan hidup, moto, dan ungkapan-ungkapan tradisional Sunda yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, nukilan “Dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban” yang berarti “Dikurung tidak dirawat, diikat tidak diberi makan” menunjukkan adanya kritik terhadap perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi.

Nukilan sunda menunjukkan sikap terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan pendapat dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, nukilan “Silih asih, silih asuh, silih asah” yang berarti “Saling mengasah kemampuan, saling mengasuh kesejahteraan, dan

saling mengasihi sesama" menggambarkan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Nilai-nilai karakter kearifan lokal sunda tersebut dapat merepresentasikan perilaku ideal sikap moral warga negara, yang meliputi tiga muatan utama pendidikan kewarganegaraan, yaitu:

a. Civic Knowledge, yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta sistem dan proses demokrasi;
b. Civic Skill, yaitu keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat; dan
c. Civic Disposition, yaitu sikap dan nilai yang mendukung demokrasi, seperti toleransi, partisipasi, dan tanggung jawab.

Konsep Demokrasi telah dikenal sejak dulu, yaitu "gotong royong" dimana masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Saat ini tercermin dalam adanya lembaga-lembaga seperti Badan Musyawarah Desa (BMD), Lembaga Adat Sunda (LBS), yang bertugas memfasilitasi proses musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif.

Prinsip demokrasi ala Sunda didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan. Orang Sunda percaya bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka. Selain itu prinsip-prinsip demokrasi Sunda juga menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan budaya suku Sunda yang sangat menghargai persatuan dan kesepakatan bersama. Prinsip ini nampak pada tradisi aub di wilayah Ciamis, baik dalam membangun rumah dan hajatan.

B. Konsep Aub Sebagai Kontending Demokrasi

Ketika ada tetangga membangun rumah, maka seluruh tetangga ikut berpartisipasi dengan membantu semen, genteng dll, dan juga tenaga. Dan apabila yang memberi bantuan akan membangun rumah, maka orang yang diberi bantuan memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan seperti yang mereka terima, dengan barang dengan jumlah yang sama, dengan harga yang berlaku saat itu.

Begitu pula ketika ada orang hajatan (khitanan, perkawinan) para tetangga akan memberikan bantuan, dengan Bahasa "ngiring aub" umpamanya daging sapi, kentang, beras dll. Ketika yang

bersangkutan punya hajat yang sama, maka yang kehutangan akan menggantinya dengan jumlah barang yang sama dengan harga pada saat ini. Jadi jumlah tidak berkurang, apabila aubnya 100 kg daging sapi, maka akan menggantinya dengan 100 kg daging sapi, dengan mengabaikan harga.



Contoh aub dalam membuat rumah

C. Tradisi Talitian : Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Talitihan adalah istilah dalam bahasa Sunda yang berarti memberikan sesuatu berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue dan uang, bingkisan dan lain lain kepada orang yang akan menikah. Tujuannya adalah untuk membantu sesama muslim dan menyambung tali silaturahmi untuk mempererat ukhuwwah Islamiyyah.

Keunikan dari tradisi Talitihan di Desa Batangsari adalah bahwa dalam hal ini pemberian atau sumbangan Talitian harus dikembalikan sesuai dengan pemberiannya. Mereka menuntut kembali Talitihan (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan kepada orang yang telah menerima Talitihan tersebut, jika pengembaliannya tidak sesuai dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang.

D. Tradisi Nguyang : Demokrasi Berkeadilan

Tradisi di daerah Bantarujeg, ketika para petani miskin didaerah tersebut sedang panen palawija, maka hasilnya akan dibagikan

kepada orang-orang kaya, dengan mengatakan “hatur lumayan, ngaraosan.” Ada kewajiban bagi orang-orang yang menerimanya untuk mengganti dengan beras atau uang, minimal 2,5 dari harga hasil panen tersebut.

BAB 9 GREEN POLITICS SUNDA : KONSEP SUNDA WIWITAN

Kalau kita melihat Sejarah panjang perjalanan politik Nusantara, masyarakat Sunda telah memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu sistem nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Sunda adalah ajaran Sunda Wiwitan, yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Sunda sebelum masuknya agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Ajaran Sunda Wiwitan bukanlah hanya sekedar ajaran spiritual saja, tetapi juga merupakan pedoman moral dan etika dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Prinsip-prinsip dalam Sunda Wiwitan menekankan pada keseimbanagan antara manusia, alam serta yang maha kuasa. Disamping itu menekankan pula pada nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, keadialan dan kesejahteraan bersama. Dalam kaitan dengan alam demokrasi modern, nilai-nilai dari Sunda Wiwitan dapat dijadikan inspirasi dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

A. Konsepsi Green Politics

Politik hijau (*green politics*), adalah ideologi politik yang berfokus pada isu lingkungan hidup. Politik hijau bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis. Politik Hijau merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jerman *Grün*, disatukan oleh *die Grünen*, sebuah partai Hijau yang terbentuk di akhir 1970-an. Kadang-kadang istilah ekologi politik digunakan di Eropa dan di lingkaran akademis, tetapi yang belakangan telah mulai mewakili ranah kajian lintas-disiplin, termasuk kimia dan teknik kimia.

Politik hijau adalah pemahaman bahwa titik berat kehidupan bukan pada ekonomi melainkan pada alam (*ekosentris*), seterusnya pandangan ini menempatkan keseimbangan ekologi sebagai faktor pertumbuhan dan perkembangan negara, setelah sebelumnya beberapa negara mengakui bahwa ekonomi dan nilai moral yang berujung pada beberapa peperangan. Maka dari itu pemahaman negara terhadap Politik hijau muncul setelah pemulihan pasca perang dunia kedua.

Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations*, Jackson & Sorensen (1999) berpendapat bahwa *Green*

Politics muncul untuk mengkritik pandangan liberalisme dan melihat isu-isu nyata ketika perang dingin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berlebihan. Tujuan kehadiran *green politics* dalam Hubungan Internasional adalah menjelaskan krisis ekologi yang dihadapi manusia. Setelah itu fokus pada usaha menangani krisis tersebut dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya (Patterson, 2005).

Green Politics dan teori lingkungan hidup memiliki persamaan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya peduli pada lingkungan dunia. Lalu perbedaannya adalah *Green Politics* lebih kritis daripada teori lingkungan hidup. *Sustainability* dalam teori green politics bukan pada pembangunan, melainkan pada keseimbangan ekologi, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Teori ini yakin bahwa menjaga keseimbangan ekologi melindungi manusia. Menurut *Green Politics*, sistem kepercayaan yang terlalu fokus dengan pemenuhan kebutuhan manusia (*anthropocentric*) menyebabkan krisis lingkungan hidup. *Anthropocentric* bisa diartikan bahwa segala kebaikan yang ada di alam berpusat pada manusia sehingga membuat manusia bertindak secara eksploratif berlebihan terhadap alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya *green politics* meningkatkan berbagai macam alat kebijakan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan mempunyai peran penting dalam merespon berbagai isu lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional (Jerald Mast, 2013: 737). *Green Politics* yang dilakukan oleh pemimpin negara adalah wujud nyata dari kepedulian meraka kepada permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan di bumi ini menghasilkan kepedulian manusia untuk berupaya mencegah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, *Green Politics* ada sebagai jawaban dalam mengupayakan kelangsungan yang seimbang antara alam dan makhluk hidup di dalamnya.

Pada abad 20, Politik hijau diusung saat konferensi Rio pada tahun 1992, sebelumnya memang sudah dirintis pertemuan dengan beberapa negara oleh PBB. Pada tahun 1972 diadakan konferensi Stockholms yang dikenal dalam dunia international dengan *United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHE). Rintisan politik hijau dapat dikatakan dimulai dari pertemuan antar negara ini. Karena dihadiri 6000 orang yang terdiri dari 113 delegasi negara, perwakilan dan pengamat dari semua organisasi non pemerintah, dan setidaknya ada 1500 wartawan dari seluruh dunia. Selain beberapa tamu penting tersebut ada banyak produk hukum yang dilahirkan dari

konferensi tersebut. Salah satu produk hukum dari konferensi ini adalah terbentuknya UNEP.

Berdasarkan pertemuan international tersebut maka dilahirkan Konferensi Rio yang disebut sebagai *Rio Declaration on Environment and Development* yang digagas oleh *Earth Summit*. Dari sinilah muncul klausul hukum apa yang disebut sebagai politik hijau. Partai Hijau Jerman bersaing dalam pemilihan nasional pertama mereka pada pemilihan federal 1980. Setelah mengikuti pemilihan Eropa 1979, mereka mengadakan konferensi Empat Pilar Partai Hijau yang disetujui oleh semua kelompok dalam aliansi asli, dan menyatukan kelompok-kelompok tersebut menjadi satu Partai. Pernyataan prinsip ini telah digunakan oleh banyak Pihak Hijau di seluruh dunia. Pada pertemuan itulah tercipta istilah "Hijau" (bahasa Jerman: *"Grün"*) dan mengadopsi bunga matahari sebagai simbol Politik Hijau.

Berkenaan dengan politik bersendikan pada lingkungan hidup, masyarakat Sunda sebenarnya sudah mengenal dan mempraktekannya jauh sebelum di Jerman di formulakan dalam bentuk “politik hijau”, terutama dengan perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat Baduy yang senantiasa hidupnya bersendikan pada alam. Bagi masyarakat peladang seperti halnya orang Baduy, kehidupannya sangat bergantung pada alam dan hasil alam. Masyarakat Baduy taat menjalankan ajaran Sunda Wiwitan adalah kepercayaan tradisional yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam dan manusia. Dalam perspektif Sunda Wiwitan, pemeliharaan lingkungan dilakukan dengan cara menghormati alam, menjaga hubungan baik dengan alam, dan tidak mengganggu keseimbangan alam.

Maka dengan segala kekuatan mereka akan mencoba untuk memelihara alam dan lingkungan, bahkan hutan (leuweung) yang merupakan penyangga lingkungan, ditetapkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu : leuweung tutupan (hutan tutupan), leuweung larangan (hutan larangan) dan leuweung garapan (hutan garapan). Ada dua area yang tidak boleh diganggu, yaitu leuweung tutupan dan leuweung larangan, atau sekitar 2/3 area hutan perlu di lindungi, dan Konsep ini tidak hanya berlaku di Baduy, namun juga di kampung adat lainnya seperti kampung Naga, kampung Dukuh dan lain-lain. Bahkan demi perlindungan hutan, tetua adat harus mengeluarkan kebijakan lisan berbentuk “pamali” atau larangan untuk masuk area kedua hutan tersebut, dan ditakut-takuti dengan dijadikan hutan keramat yang ditunggui oleh makhluk halus dan kekuatan gaib dari para leluhur kampung.

Bahkan leuweung garapanpun tidak bisa seenaknya di ekonomisasi oleh masyarakat. Umpamanya masyarakat akan menebang pohon yang ada di area leuweung garapan, sebelum pohon kayu itu ditebang, terlebih dahulu harus menanam bibit pohon baru untuk disiapkan sebagai penggantinya. Dan kayu tidak boleh ditebang, sebelum penggantinya memiliki agar yang kuat, yang diyakini akan tumbuh.

Perlindungan alam termasuk juga dalam penyiapan lahan untuk membangun rumah. Ketika membuat rumah harus mengikuti besaran lahan yang tersedia, kalau yang tanahnya lebih tinggi jangan digali, tanah yang lebih rendah jangan di urug. Mengacu pada pepatah "lamun pondok tong disambung, lamun panjang tong di potong". Pepatah ini bukan hanya untuk menyiapkan lahan dalam membangun rumah, namun dalam segala aspek. Kita tidak boleh merubah apa yang telah di takdirkan oleh Tuhan YME.

Politik Sunda dalam konsep Sunda Wiwitan berfokus pada keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Politik dalam sistem ini tidak hanya berorientasi pada kekuasaan semata, tetapi juga pada kepemimpinan moral, keadilan sosial, musyawarah, serta keberlanjutan lingkungan.

Konsep Tri Tangtu di Buana menunjukkan bahwa politik Sunda bersifat terstruktur dan kolektif, di mana raja tidak bisa bertindak sendiri tanpa bimbingan spiritual dan dukungan rakyat. Strategi politiknya pun lebih mengedepankan aliansi diplomatik, pertahanan berbasis ekologi, serta kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, sistem politik Sunda yang berlandaskan Sunda Wiwitan bukan hanya sekadar pemerintahan, tetapi juga cara hidup yang menekankan kesejahteraan bersama dalam harmoni dengan alam dan hukum adat.

Sunda Wiwitan adalah sistem kepercayaan asli masyarakat Sunda yang berkembang sebelum masuknya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Kepercayaan ini menekankan harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Dalam konteks politik, konsep Sunda Wiwitan sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan, kebijakan, dan strategi politik Kerajaan Sunda.

Politik Sunda dalam konsep Sunda Wiwitan bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga cara pandang terhadap kekuasaan, hubungan sosial, serta hubungan antara manusia dan alam. Politik dalam masyarakat Sunda kuno berorientasi pada keseimbangan (tatali paranti karuhun), kepemimpinan yang berbasis moral (silih asah, silih asih, silih asuh), serta tata kelola yang bersandar pada adat dan musyawarah.

B. Konsep Politik Hijau dalam Sunda Wiwitan

Sunda Wiwitan adalah sebuah aliran kepercayaan yang menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Sunda, khususnya di wilayah Banten dan Jawa Barat. Kepercayaan ini memiliki akar historis yang panjang dan diyakini sebagai ajaran yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sunda Wiwitan mengedepankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Hyang Kersa (Tuhan Yang Maha Esa).

Salah satu tradisi Sunda Wiwitan adalah menghormati alam. Masyarakat Sunda Wiwitan diajarkan mengenai konsep hubungan antara manusia dengan alam. Dalam hal ini, manusia memiliki ketergantungan terhadap alam untuk bertahan hidup, melalui sumber air, hasil pertanian, hingga tempat tinggal masih berhubungan dengan alam. Di samping itu, konsep menghormati alam ini juga diterapkan dengan melarang masyarakat untuk merusak hutan maupun lingkungan, seperti pada Suku Baduy Dalam.

Sunda Wiwitan juga merupakan upaya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam yang menggambarkan pemahaman bahwa kesejahteraan manusia dan keberlanjutan alam semesta adalah bagian dari keseluruhan yang saling terkait. Kepercayaan Sunda Wiwitan terdapat di sebagian daerah yang ada di sekitar Jawa Barat dan Banten. Di sana terdapat beberapa kampung adat yang merupakan perwujudan dari keberadaan masyarakat adat yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena terdapat kebudayaan yang unik dan berbeda.

Alam dan leluhur menjadi salah satu acuan untuk kehidupan. Alam telah menyediakan semuanya, tinggal bagaimana cara kita menjaga dan mengolahnya. Keberadaan leluhur sangat diagungkan, karena setiap leluhur mampu menjaga dan melindungi kita dari segala marabahaya. Keyakinan ini lebih mengarah pada kegiatan positif dimana ajaran Sunda Wiwitan mengajarkan tentang melestarikan lingkungan, perlakuan baik terhadap alam, sumber air, dan adanya perlakuan yang mulia terhadap Dewi Sri atau Dewi Padi. (Yohana Reni Anggraeni, 2020)



Ritual Seren Taun

Mayarakat Sunda Wiwitan memiliki tradisi atau adat yang rutin dilakukan setiap tahunnya, sebagai ucapan syukur dan pemujaan kepada Dewi Kesuburan dan Dewi Padi atas hasil panen yang dinamakan dengan Upacara Adat Seren Taun. Upacara adat seren taun ini telah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat sunda wiwitan sangat memuliakan alam sebagai sumber kesuburan terutama dalam tanaman padi, yang dalam dimensi orientasi nilai Kluckhohn and Strodtbeck disebut Hubungan Manusia dengan Alam.

Masyarakat sunda wiwitan melihat bahwa alam diciptakan untuk memberikan segala kebutuhan manusia terutuma padi, oleh karenanya manusia yang harus menjaga alam dengan baik demi keberlangsungan hidup. Tidak hanya itu, hal magis terlihat dalam budaya sunda wiwitan ini dimana mereka masih kental dengan kepercayaan para leluhur. Semua aktivitas yang akan dilakukan pasti diawali dengan meminta perlindungan para leluhur dengan tujuan niat baik akan berjalan dengan baik pula. Mereka akan selalu melakukan ritual bersama untuk menjaga hubungan dengan leluhur, merka pun selalu bekerjasama dalam menjaga alam.

Dalam upaya pelestarian lingkungan di Masyarakat Baduy, kalau mereka akan menebang pohon, maka terlebih dahulu harus mempersiapkan pohon pengganti. Dan pohon tidak boleh ditebang, jika pohon penggantinya belum memiliki akar yang kuat. Terdapat juga babasan *"lamun pondok tong disambung, lamun panjang tong di potong"* hal ini menunjukkan kesinambungan.

Agama Sunda Wiwitan merupakan agama yang bersifat monoteis, penghormatan kepada roh nenek moyang, dan kepercayaan

kepada satu kekuasaan yakni Sang Hiyang Keresa (Yang Maha Kuasa) yang disebut juga Batara Tunggal (Yang Maha Esa), Nu Ngaresakeun, Batara Jagat (Penguasa Alam), dan Batara Seda Niskala (Yang Maha Gaib) yang bersemayam di Buana Nyungcung (Buana Atas). Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes. lsi terpenting dari pikukuh (kepatuhan) Kanekes tersebut adalah konsep "tanpa perubahan apapun" atau perubahan sesedikit mungkin.

Terkait dengan pikukuh ini masyarakat Kanekes memiliki sikap ekosentrisme. Mereka memperlakukan alam sebagai bagian integral dari proses kehidupan mereka yang harus dipelihara secara baik, memperlakukan alam sebagai sahabat karib, dimana batas antara lingkungan dan manusia ditiadakan. Penjagaan terhadap alam secara tulus merupakan tugas hidup yang harus dilakukan oleh setiap insan Kanekes, sesuai dengan setatus kesuciannya. Masyarakat Tangtu, sebagai masyarakat yang dipandang memiliki tingkat kesucian yang paling tinggi memiliki tugas hidup yang lebih berat, karena mereka harus menjaga tanah-tanah suci dari perubahan yang diakibatkan ulah kesewanangan manusia. Cara hidup yang selalu diatur dan dibatasi dengan berbagai buyut, membuat sikap teu wasa (tidak kuasa) dalam memperlakukan alam secara sewenang-wenang.



Upacara Seren Taun di Ciptagelar

BAB 10 PENATAAN WILAYAH : PAPAT KALIMA PANCER

"Sunda dan kesundaan sangat kaya akan pelajaran dan falsafah hidup." Berbicara tentang "filsafah Sunda" atau "falsafah orang Sunda", kita tidak akan banyak menemukan hasil pemikiran orang Sunda yang tertulis. Orang Sunda banyak mempergunakan cara lisan dalam menyampaikan kearifan hidupnya, karena tradisi tulisan belum melembaga dalam masarakat.

Orang Sunda berpandangan bahwa manusia harus punya tujuan hidup yang baik, dan senantiasa sadar bahwa dirinya hanya bagian kecil saja dari alam semesta. Sifat-sifat yang dianggap baik al. harus sopan, sederhana, jujur, berani dan teguh pendirian dalam kebenaran dan keadilan, baik hati, bisa dipercaya, menghormati dan menghargai orang lain, waspada, dapat mengendalikan diri, adil dan berpikiran luas serta mencintai tanah air dan bangsa.

Untuk mempunyai tujuan hidup yang baik, harus punya guru yang akan menuntunnya ke jalan yang benar. Guru dihormati dalam masyarakat Sunda. Bahkan Tuhan Yang Maha Esa juga disebut Guru Hyang Tunggal. Dalam naskah Siksa Kanda ng Karesian dikatakan bahwa orang dapat berguru kepada siapa saja. Dianjurkan agar bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Teladani orang yang berkelakuan baik. Terimalah kritik dengan hati terbuka. Ambil manfaatnya dari teguran dan nasihat orang lain.

Tujuan hidup yang dianggap baik oleh orang Sunda ialah hidup sejahtera, hati tenang dan tenteram, mendapat kemuliaan, damai, merdeka dan mencapai kesempurnaan di akhirat. Sejahtera berarti hidup berkecukupan. Tenang dan tenteram berarti merasa bahagia. Mendapat kemuliaan berarti disegani dan dihormati orang banyak, terhindar dari hidup hina, nista dan tersesat. Hidup damai artinya rukun, akrab dengan tetangga dan lingkungan. Orang yang merdeka artinya terlepas dari ujian dan terbebas dari hidup tanpa tujuan. Dan kesempurnaan akhirat ialah terhindar dari kema'siatan dunia dan ancaman neraka di akhirat.

Untuk mencapai tujuan hidup itu orang harus taat kepada ajaran-ajaran karuhun, pesan orangtua dan warisan ajaran yang tercantum dalam cerita-cerita pantun, dan yang berbentuk naskah seperti Siksa Kandang Karesian. Ajaran-ajaran itu punya tiga fungsi:

(1) sebagai pedoman dalam menjalani hidup; (2) sebagai kontrol sosial terhadap kehendak dan nafsu yang timbul pada diri seseorang dan (3) sebagai pembentuk suasana dalam masyarakat tempat seseorang lahir, tumbuh dan dibesarkan yang secara tak sadar meresap ke dalam diri semua anggota masyarakat.

Semangat bekerjasama dalam masyarakat harus dipupuk dan dikembangkan. Harus saling hormat dan bertatakrama, sopan dalam berkata, sikap dan kelakuan. Harus saling sayangi sesama anggota masyarakat.

Orang Sunda beranggapan bahwa lingkungan alam memberikan manfaat yang maksimal kepada manusia apabila dijaga kelestariannya, dirawat serta dipelihara dengan baik dan digunakan hanya secukupnya saja. Kalau alam digunakan secara berlebihan apalagi kalau tidak dirawat dan tidak dijaga kelestariannya, maka akan timbul malapetaka dan kesengsaraan.

Dalam Siksa Kandang Karesian misalnya terdapat ungkapan, “makan sekedar tidak lapar, minum sekedar tidak haus, berladang sekedar cukup untuk makan, dll. ” yang berarti tidak boleh berlebihan. Orang Sunda dianjurkan agar “siger tengah” atau “siniger tengah”, yaitu tidak kekurangan tetapi tidak berlebihan. Samasekali bukan untuk kemewahan, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tidak menguras atau memeras alam secara berlebihan, sehingga terjaga kelestariannya.

Sejak pra-Islam, orang Sunda percaya akan adanya Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu Esa. Meskipun pernah memeluk agama Hindu, namun dewa-dewa Hindu ditempatkan di bawah Hyang Tunggal, Guriang Tunggal atau Batara Tunggal.

Tuhan Maha Mengetahui, mengetahui apa yang diperbuat mahlukNya, karena itu manusia wajib berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Tuhan disebut juga Nu Murbéng Alam (Yang Menguasai Alam), Nu Mahawisésa (Yang Mahakuasa), Nu Mahaasih (Maha Pengasih), Gusti Yang Widi (Yang Maha Menentukan), Nu Mahasuci (Yang Maha Suci), dll. Tuhan menghidupi mahlukNya, memberi kesehatan, memberi rizki dan mematikannya pada waktunya.

Orang Sunda menghindari persaingan, lebih mengutamakan kerjasama untuk kepentingan bersama. Lebih menghargai musyawarah. Bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Lebih mengutamakan mutu hasil kerja daripada kecepatan menyelesaikannya. Tidak menunda pekerjaan yang belum selesai apalagi menyerahkannya kepada orang yang bukan ahlinya. Mau mengerjakan yang baik meskipun pekerjaan kasar.

Kesehatan dipelihara, makan cukup, pakaian bersih dan pantas, punya kedudukan, punya harta kekayaan. Tidak buru-buru menerima yang baru yang belum tentu baik dan tidak mudah meninggalkan yang berharga warisan nenekmoyang. Memperlihatkan rasa tanggungjawab, tidak boros, selalu mengukur keinginan dan keperluan dengan penghasilan, dan selalu hidup sederhana.

Kreatif mencari lapangan kerja sendiri dan percaya pada kekuatan sendiri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perkembangan zaman dan dengan kebiasaan yang berlaku di tempat hidupnya. Berusaha mencapai hari depan yang lebih baik. Mempelajari ilmu sampai mendasar sehingga dapat diamalkan.

Masyarakat Sunda memiliki sebuah konsep berfikir Sunda, dikenal dengan opat kalima tunggal, yaitu mengacu pada pandangan, manusia terbentuk dari acining : *seuneu* (sebagian orang menyebutnya panon poe), yang disimbolkan dengan warna merah berupa energi *kahayang* atau keinginan; *taneuh*, disimbolkan dengan warna hitam, berupa dorongan sensasi pancaindera; *cai* disimbolkan dengan warna bodas (putih), berupa emosi atau perasaan, dan *angin atawa hawa* disimbolkan dengan warna kuning berupa fikiran. Keempat hal diatas dimaknai sebagai kurung. Kurung nyaeta raga badag atawa fisik manusa, nu ngalampahkeun kahayang kuring. Sementara makna Tunggal atau dalam konsepsi Jawa disebut *pancer* adalah puseur atau pusat, atau dalam bahasa sederhananya ruhani atau Ruh dalam bahasa tasauf Sunda dimaknai dengan kuring. Menyatunya antara kurung dan kuring, itulah yang dimaknai manunggal atau Tunggal.

Simbolisasi dari “Opat kalima Tunggal” tergambarkan dalam tataletak dari situs purbakala Gunung Padang. Gunung Padang mibanda 5 (lima) punden/undakan tina susunana batu mangrupa punden panggene sadunya jeung mangrupa situs peradaban manusa nu pangkolotna. Salian ti eta gunung padang dilingkung ku lima gunung gunung leutik katut unggal kapunden mibanda lir ibarat pantonna nu nyanghareup kagunung Pangrango. Eta oge kahalangan ku lima gunung leutik kaasup gunung gede. Hal sejen salian ti eta, batu batu nu aya di komplek Gunung Padang ampir kurang leuwih 85 persen batu batuna nyudut 5 (lima), hal ini mencerminkan Opat kalima Tunggal.

Tapi sejak beberapa dasawarsa lembaga-lembaga lisan yang dahulu menjadi cara menurunkan kearifan hidup orang Sunda sudah tidak berfungsi lagi. Kearifan hidup dari nenek moyang tidak lagi disampaikan kepada anak cucu, karena masarakat Sunda mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hanya sebagian kecil saja kearifan nenek moyang orang Sunda yang sempat dicatat dan dengan

demikian tersimpan. Artinya kalaupun ada “falsafah Sunda”, namun hampir tidak dikenal lagi oleh komunitas manusia yang sekarang disebut orang Sunda. Karena “falsafah” itu merupakan pandangan tentang hidup (dan juga tentang mati) yang dianut seseorang atau sekelompok orang.

Persepsi lain dari Papat Kalima Pancer adalah konsep kosmologis dalam budaya Nusantara, khususnya dalam tradisi spiritual Sunda, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Konsep ini menggambarkan keteraturan alam dan kehidupan manusia berdasarkan keselarasan antara unsur alam, ruang, dan spiritualitas. Dalam konteks tata wilayah, Papat Kalima Pancer digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan ruang yang harmonis.

Adapun pengertian Papat Kalima Pancer, secara harfiah adalah empat penjuru dan satu pusat. Ini mencerminkan struktur kosmologi yang mengelompokkan dunia ke dalam empat arah utama (utara, selatan, timur, barat) dengan satu pusat di tengah. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk: penataan permukiman dan wilayah kerajaan, struktur sosial dan kepemimpinan dan filosofi kehidupan dan spiritualitas.

A. Struktur dan Makna Papat Kalima Pancer dalam Penataan Wilayah

Dalam tata ruang, konsep ini sering digunakan untuk menciptakan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kekuatan spiritual. Berikut adalah makna simbolis setiap elemen Papat Kalima Pancer dalam penataan wilayah:

a. Empat Penjuru (Papat)

1. Utara (Kaler/Ulu), simbol kearifan dan spiritualitas, biasanya ditempatkan pusat keagamaan atau tempat ibadah seperti kabuyutan (pusat spiritual dalam budaya Sunda). Dalam tata ruang kerajaan, bagian utara sering dijadikan tempat istana atau pusat pemerintahan yang melambangkan kebijaksanaan.
2. Selatan (Kelod/Kidul), simbol kehidupan dan kesuburan, wilayah pertanian, perkebunan, atau lahan produktif sering ditempatkan di selatan. Dalam kepercayaan Sunda dan Jawa, selatan juga dikaitkan dengan kehidupan alam bawah atau dunia roh, sehingga sering ditempatkan tempat-tempat suci atau keramat.
3. Timur (Wetan/Timoer), imbol kelahiran dan harapan baru, arah matahari terbit sering dikaitkan dengan kehidupan baru, sehingga di timur biasanya dibangun pemukiman atau tempat pendidikan.

Wilayah ini juga sering menjadi tempat peristirahatan para pemimpin spiritual atau tokoh masyarakat.

4. Barat (Kulon/Lor), simbol ketahanan dan perlindungan, wilayah ini sering dijadikan tempat pertahanan atau pusat militer. Secara filosofis, barat juga dikaitkan dengan akhir kehidupan atau peralihan, sehingga dalam beberapa tradisi sering menjadi tempat makam leluhur.

b. Pusat (Pancer)

Pancer berarti pusat keseimbangan, inti kehidupan, atau kekuatan utama yang menghubungkan keempat arah lainnya. Dalam tata kota kerajaan Sunda, pusat ini biasanya berupa alun-alun, tempat berkumpulnya masyarakat untuk musyawarah, kegiatan sosial, dan ritual keagamaan. Pancer juga melambangkan raja atau pemimpin, yang menjadi poros kesejahteraan rakyat dan penjaga harmoni.

B. Papat Kalima Pancer dalam Tata Wilayah Kerajaan Sunda

Konsep ini diterapkan dalam penataan kota dan kerajaan di Sunda. Contohnya dalam Kerajaan Pajajaran, struktur kota dan wilayahnya dibangun berdasarkan prinsip Papat Kalima Pancer:

a. Kraton (Pancer, Pusat), sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan.
b. Alun-Alun (Tengah), tempat musyawarah dan pertemuan rakyat.
c. Kabuyutan (Utara), tempat peribadatan dan spiritualitas.
d. Sawah dan Ladang (Selatan), wilayah pertanian untuk kesejahteraan rakyat.
e. Benteng dan Pasukan (Barat), wilayah pertahanan dan keamanan.
f. Permukiman Rakyat (Timur), tempat kehidupan sehari-hari Masyarakat.

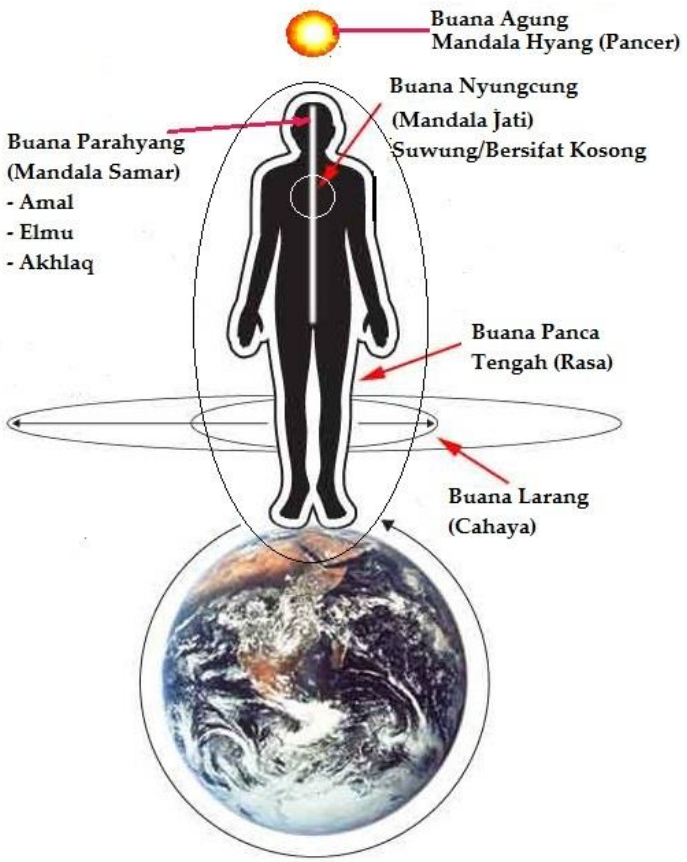
Sistem ini mencerminkan harmoni antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas, sehingga kerajaan dapat berkembang dengan baik tanpa merusak keseimbangan alam.

C. Penerapan Papat Kalima Pancer dalam Masyarakat Modern

Walaupun konsep ini berasal dari tradisi kuno, prinsipnya masih relevan dalam perencanaan kota dan pembangunan wilayah modern, seperti :

a. Keseimbangan Ekologi. Penempatan zona hijau dan kawasan lindung sebagai “pancer” yang menjaga keseimbangan ekosistem.
b. Tata Kota Berbasis Fungsi. Pembagian wilayah untuk perkantoran, tempat ibadah, permukiman, dan pertanian sesuai dengan arah kosmologi.
c. Pelestarian Tradisi dan Budaya. Pusat budaya dan spiritual ditempatkan di lokasi strategis untuk menjaga nilai-nilai lokal.
d. Pembangunan Berkelanjutan. Menggunakan prinsip keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Di era modern, dimungkinkan nilai-nilai ini masih dapat diterapkan dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, mengutamakan keseimbangan ekologi, sosial, dan budaya. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia.



EMPAT KALIMA PANCER DALAM TATA SALIRA MANUSIA SUNDA

BAB 11 PRINSIP SILIH ASIH, ASUH DAN ASAH

Falsafah hidup dan kearifan orang Sunda Silih Asih, Silih Asuh, Silih Asah mempunyai arti dan makna yang istimewa karena ia mengajarkan satu kesatuan sikap yang jika terjiwai dengan baik oleh suatu masyarakat berpotensi besar untuk membuat masyarakat tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang kuat, bersatu dan sejahtera. Prinsip ini mencerminkan harmoni dan keharmonisan sebagai dasar dalam pengelolaan hubungan sosial dan politik.

Filsafat Silas yang merupakan kearifan lokal berasal dari abad ke 14 dari Prabu Siliwangi yang namanya ini diserap dari kata silih-wangikeun agar rakyatnya bisa menjadi manusia unggulan atau manusa sunda nu-nyunda. Prabu Wangi sendiri merupakan julukan yang diberikan kepada Prabu Maharaja setelah "mewangikan" kebanggaan rakyat tatar Sunda dengan prestasi dan kemasyhurannya.

Mantan Gubernur Jawa Barat, Sanusi Hardjadinata tahun 1950, memaknai ayat budaya ini secara sederhana adalah silih asih ku pangarti, silih asah ku pangabisa jeung silih asuh ku pangaweruh. Pesan-pesan yang nampak sederhana dari falsafah tersebut sesungguhnya sesuatu yang amat bernilai tinggi. Dan bukan hanya itu bahkan kalau kita cermati, pesan-pesan tersebut adalah pesan-pesan yang sama dengan apa yang di ajarkan dalam agama Islam.

Silih asih yang berarti saling sayang menyayangi, silih asuh yang berarti saling memelihara, dan Silih asah yang berarti saling memintarkan. Adalah tiga perilaku yang menjadi satu kesatuan pembentuk budaya hidup yang memungkinkan terwujudnya sebuah tatanan masyarakat dengan peradaban yang luhur.

A. Silih Asih

Silih asih (saling menyayangi atau loving each other). Kata asih berarti cinta, mengandung makna nilai ontologi bahwa keberadaan asih berasal dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga Dia memberikan perintah kasihilah sesamamu. Bukan hanya saling mengasihi untuk pasangan, keluarga atau satu kelompok saja, tetapi juga untuk sesama individu dan kelompok lain maupun agama serta

mengutamakan kasih sayang dan kebersamaan dalam interaksi politik. Ini tentu hal yang sangat dasyat jika bisa lakoni dengan baik.

Kasih sayang itulah kunci segalanya serta akar dari segala perilaku luhur manusia, dan bahkan inti dari pada ajaran agama. Saling menyayangi inilah setinggi-tingginya pencapaian keluhuran peradaban. Di atas dasar kasih sayang inilah seluruh interaksi kita harus berdiri.

Saling menyayangi inilah setinggi-tingginya pencapaian keluhuran peradaban. Di atas dasar kasih sayang inilah seluruh interaksi kita harus berdiri. Secara harfiah, silih asih dalam pandangan Prof. Dr. Ali Anwar, adalah tingkah laku dan sikap mental yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Sikap ini paling tidak diterapkan dalam ungkapan-ungkapan seperti gawe (bekerja atau beramal), tanpa pamrih dan rasa miboga.

Gawe (bekerja atau beramal), termasuk didalamnya kerjasama (rukun gawe atau ta'awfn) dan tanggungjawab bersama (ngabagikeun tanggungjawab atau tadlammun). Ungkapan ini bermakna bahwa rasa welas asih atau kasih sayang diwujudkan dalam bentuk amal atau pekerjaan, baik pekerjaan yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Rasa welas asih ini akan lebih kuat bila dilaksanakan secara gotong royong (ta'awun) dan bertanggungjawab bersama (tadlammun).

Konsepsi Asih, selaras dengan QS al-Maidah : Yā ayyuhallażīna āmanụ lā tuḥillụ sya'ā`irallāhi wa lasy-syahral-ḥarāma wa lal-hadya wa lal-qalā`ida wa lā āmmīnal-baital-ḥarāma yabtagụna faḍlam mir rabbihim wa riḍwānā, wa iżā ḥalaltum faṣṭādụ, wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin an ṣaddụkum 'anil-masjidil-ḥarāmi an ta'tadụ, wa ta'āwanụ 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanụ 'alal-iṡmi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb (QS al-Maidah, ayat 2).

PERTAMA hidup tolong-menolong dan membantu dalam kebaikan. Gotong royong (tolong-menolong) bermakna ganda yaitu kebaikan dan keburukan. Islam mengajarkan tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam perbuatan buruk.

KEDUA adalah ungkapan tanpa pamrih (ihsan, ikhlash dan ridla). Sikap welas asih akan mendorong seseorang untuk berbuat tanpa pamrih, sungguh-sungguh, dan kompetitif (ikhlas). Ia akan selalu merasakan bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah (ihsan). Kedua sikap ini pada akhirnya akan melahirkan sikap menerima apa adanya terhadap segala apa yang menimpa dirinya (ridlo).

KETIGA adalah rasa memiliki (rasa miboga atau tarahum). Wujud nyata dari sikap welas asih terdapat pula dalam sikap tarahum, saling menyanyangi (dalam bentuk memberi perhatian dan peduli).

B. Silih Asuh

Menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Silih asuh (caring each other), berarti membimbing, mendidik, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain, serta mengingatkannya tentang perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Sikap ini mengandung nilai moral kebaikan dalam membangun kebersamaan. Melalui kehidupan bermasyarakat dengan cara membangun hubungan silaturrahmi dengan cara saling bantu satu dengan yang lain. Sikap ini harus disertai oleh rasa kasih sayang.

Bagi mereka yang membutuhkannya misalnya yang muda bantu yang tua, karena pada suatu saat kita juga akan menjadi tua. Yang kaya bantu yang miskin, yang kuat bantu yang lemah. Kesaling-tergantungan kepada sesamanya mendorong manusia untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya.

Dalam pandangan Drs. RH. Hidayat Suryalaga, silih asuh pada hakekatnya adalah terwujudnya hak azasi manusia menurut kodrat masing-masing. Sementara Prof. Dr. Ali Anwar, menambahkan bahwa silih asuh akan terjadi secara harmoni dan interaktif bila kedua belah pihak memberikan sikap asuh dengan penuh kasih sayang.

Unsur-unsur yang terdapat dalam silih asuh ini, antara lain, kasadarajatan, kawening hate, ngajak kana kahadean, dan conto anu hade. *PERTAMA*, kasadarajatan (musawah) mengandung arti adanya persamaan hak antara dirinya dan orang lain di hadapan Allah. Pembeda diantara manusia bukanlah sesuatu yang bersifat materi, baik fisik-jasad maupun penguasaan materi (kekayaan), melainkan siapa yang paling bertakwa kepada-Nya. Didalam ungkapan kasadarajatan tercakup sikap menghargai dan menghormati (ngahargaan batur atau tasamuh). Tasamuh mengajarkan seseoranguntuk tidak memiliki rasa unggul dari orang lain (superior) atau menekan orang lain, apalagi menjajahnya. Melalui tasamuh kedua pihak berusaha keras agar ada keseimbangan yang sesuai dengan tatakrama atau etika sosial. Dengan sikap Tasamuh, interaksi dapat berjalan dengan baik karena masing-masing saling menghargai hak asasi pribadinya. Seperti yang tercantum dalam QS al-Hujurat, ayat 13, yaitu :

- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Hai sekalian manusia, sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS al-Hujurat, 49 : 13)

KEDUA adalah bersih atau bening hate (kawening hate atau iffah). Silih asuh akan terlaksana secara akrab dan harmonis bila kedua pihak memiliki hati yang bersih (qolbun salim). Sikap ini (kawening hate atau iffah) bagaikan air jernih yang memberi kesejukan kepada setiap makhluk. Wal ladzina hum lifurfjihim hafizhfn, ula-ika fi jannatin mukramfn, dan orang-orang yang menjaga kesuciannya (tiada mengikuti hawa nafsunya). Itulah mereka orang-orang yang berada di taman surga dan mendapatkan kehormatan (diutamakan) (QS al-Ma'arij, 70 : 29 dan 35).

KETIGA adalah keteladanan (nyontoan anu hade atau uswatun hasanah), perilaku yang baik merupakan cara atau metode pendidikan yang paling berhasil. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW, dalam menjalankan misinya, baik dibidang sosial, ekonomi, maupun politik, terletak pada perilakunya yang dapat dijadikan contoh oleh para sahabat atau umatnya. Bahkan, beliau digelari oleh Allah sebagai pribadi yang berakhlak agung (khuluqin azhim). Laqad kana lakum fi rasflillahi uswatun hasanatun li man kana yarjullaha wal yaumil akhir, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, serta mereka banyak mengingat Allah (QS al-Ahzab, 33 : 21). Keteladanan inilah yang kemudian mengilhami Ki Hajar Dewantara : ing ngarso sung tulodo. Jadi keteladanan itulah yang seharusnya menjadi pemicu para pemimpin di level apapun mereka berkuasa.

C. Silih Asah

Mendorong pembelajaran dan peningkatan kapasitas individu dan kolektif. Silih asah (educating each other). Secara harfiah, Slih Asah berarti membuat sesuatu menjadi tajam, termasuk didalamnya pikiran manusia. Hal ini dimaksudkan saling memberi ilmu, meningkatkan dan mengembangkannya. Bukan saling menajamkan bedog atau celurit untuk membacok seseorang, tetapi saling mengasah ilmu dan kecerdasan antar individu. Tidak hanya dalam lingkungan sekolah atau kampus, memberikan ilmu bisa kita lakukan di mana saja.

Dengan cara saling menajamkan pengetahuan, saling menajamkan pikiran, saling menajamkan hati nurani kita dengan cara saling bertukar pikiran bahkan saling memberi nasehat satu dengan yang lain. Kita mengasah kepintaran orang lain karena kepintaran kita sudah terlebih dulu diasah. Jika setiap masyarakat tajam ilmu dan kecerdasannya, maka kesejahteraan bisa meningkat karena orang lain akan lebih berguna dengan ilmunya.

Esensi asah, menurut Drs. R. Hidayat Suryalaga adalah kualitas kognitif dan psikomotor seseorang yaitu kemampuan dan kemahiran serta keterampilan mengatasi masalah yang didapat dari proses belajar. Sikap ini dalam pandangan Prof. Dr. H. Ali Anwar, dapat diterapkan dalam wujud boga sumanget jeung kahayang, sumanget bermusyawarah, dan paheula-heula muru kana kahadean.

Ungkapan boga sumanget jeung kahayang menunjukkan ada kemauan yang sangat kuat dalam diri seseorang. Dalam bahasa agama, boga sumanget jeung kahayang itu sama dengan ijtihad, termasuk didalamnya berpikir, berdzikir dan bersabar. Untuk menambah ilmu dengan sendirinya harus didasari oleh semangat dan kamauan, serta berusaha keras. Sikap ini akan membangkitkan rasa percaya diri bagi seseorang bahwa dirinya mampu untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Upaya seperti ini dalam literatur Islam disebut ijtihad. Ijtihad merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis.

Silih Asih ku Pangarti
Silih Asuh ku Pangaeruh
Silih Asah ku Pangabisa

BAB 12 FILOSOFI POLITIK DALAM KAULINAN SUNDA

Dalam budaya Sunda terdapat beberapa jenis permainan (kaulinan) tradisional yang bisa dikaitkan dengan unsur-unsur politik, meskipun hal itu tidak secara langsung, tapi didalam permainan itu biasanya terdapat kandungan unsur strategi, diplomasi, kepemimpinan, kekuasaan, kerjasama, penempatan sumber daya, dan lain-lain, yang merupakan praktek politik dalam kehidupan bernegara atau sosial kemasyarakatan. Beberapa diantaranya :

A. Catur dan Politik

Catur adalah olahraga mental yang melibatkan dua pemain dengan tujuan utama memenangkan permainan melalui skakmat melawan raja lawan. Permainan ini kaya akan unsur strategi, taktik, dan perencanaan. Dari refensi lain disebutkan, bawa Catur berasal dari India sekitar abad ke-6 dengan nama chaturanga, yang berarti "empat divisi" (infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta perang). Permainan ini menyebar ke Persia (disebut shatranj) dan kemudian ke Eropa pada Abad Pertengahan, di mana ia berkembang menjadi bentuk modern yang kita kenal sekarang.

Catur bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga seni, olahraga, dan sarana pendidikan, karena memiliki manfaat untuk: *Pertama*, meningkatkan kognisi (melatih logika, daya ingat, dan pemecahan masalah). *Kedua*, tingkatkan fokus (dibutuhkan konsentrasi untuk memenangkan permainan). Dan *Ketiga*, mengembangkan emosi (melatih kesabaran dan kemampuan mengelola emosi). Oleh karena itu, Catur mengajarkan pentingnya perencanaan, analisis dan pengendalian emosi dalam menghadapi tantangan. Catur terus menjadi salah satu permainan paling populer di dunia, dimainkan oleh jutaan orang. Catur saat ini sering disebut politik di papan. Catur dan politik adalah dua bidang yang pada dasarnya berbeda, tetapi memiliki banyak kesamaan dalam hal strategi, taktik, dan pengambilan keputusan.

Dalam catur, pemain harus berpikir beberapa langkah ke depan, memperhatikan gerakan lawan, dan menyusun strategi untuk meraih kemenangan. Dalam politik, para pemimpin atau politisi sering kali harus memikirkan kebijakan atau langkah strategis yang tidak hanya berdampak langsung tetapi juga relevan dalam jangka panjang.

Misalnya, dalam catur, mengorbankan pion sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan posisi pada langkah berikutnya. Dalam politik, keputusan jangka pendek seperti subsidi tertentu dapat menjadi bagian dari strategi untuk memenangkan pemilu atau menciptakan stabilitas jangka panjang.

Catur melibatkan taktik untuk menghadapi situasi, seperti jebakan, pertahanan, atau serangan balik. Hal yang sama terjadi dalam politik, di mana kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang dinamis, seperti krisis ekonomi atau skandal, sangatlah penting. Misalnya, dalam catur, jebakan seperti skakmat dalam tiga gerakan memanfaatkan lawan yang malas. Dalam politik, manuver untuk membentuk koalisi atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu sensitif dapat menjadi taktik yang penting.

Dalam catur, setiap buah catur punya peranan khusus: pion adalah alat strategi, kuda untuk manuver tak terduga, dan ratu adalah kekuatan utama. Dalam politik, kelompok atau individu memainkan peran yang berbeda, seperti pendukung, oposisi, dan penasihat. Sebagai analogi, Raja dalam catur adalah pusat permainan; mempertahankan itu adalah tujuan utama. Dalam politik, pemimpin negara atau kepala pemerintahan memiliki kedudukan yang sama. Seorang ratu yang memiliki kebebasan bergerak dapat dibandingkan dengan seorang tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di berbagai bidang.

Dalam catur dan politik, terkadang pengorbanan diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam catur, pengorbanan gajah dapat membuka jalan bagi serangan yang menentukan. Dalam politik, pengorbanan citra pada beberapa isu dapat dilakukan untuk menciptakan keuntungan strategis di masa depan.

Catur dan politik keduanya melibatkan unsur menggebrak/manuver dan ketidakpastian. Tindakan yang tak terduga atau "langkah catur" politik sering kali menjadi faktor penentu. Misalnya: Dalam catur, serangan diagonal oleh gajah dapat mengejutkan lawan. Dalam politik, keputusan mendadak seperti pembubaran parlemen atau perubahan kebijakan besar dapat mengubah situasi secara drastis.

Catur dan politik adalah seni dan ilmu mengelola konflik dan persaingan. Keberhasilan dalam kedua masalah ini memerlukan perencanaan yang matang, kemampuan membaca situasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Analogi antara catur dan politik dapat menarik perhatian pada bagaimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka di tengah kompleksitas dunia modern.

Perencanaan yang matang, kemampuan membaca situasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, berlaku tidak hanya pada politik, tetapi juga pada organisasi dan manajemen pendidikan tinggi. Atas dasar itu, Universitas Pasundan sebagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Masyarakat Pasundan, pada setiap Dies Natalis selalu menyelenggarakan pertandingan catur, disamping cabang olahraga lainnya, seperti menembak, memanah, bulu tangkis, pingpong, Gapleh, dan jalan santai.

Tantangan bagi perguruan tinggi swasta saat ini, selain harus menghadapi pesaing dari perguruan tinggi negeri, juga makin menjamurnya perguruan tinggi swasta hampir di setiap kabupaten dan kota. Kondisi ini perlu disikapi secara cermat, agar Unpas mampu beradaptasi dengan perubahan dan tetap menjadi perguruan tinggi yang unggul, minimal di kawasan Sunda, sekaligus memiliki jati diri yang tangguh dan weweg. Oleh karena itu, rencana ke depan harus disusun secara matang, penuh inovasi dan berani mengambil resiko dalam menentukan rencana mewujudkan Tri Jatidiri Pasundan (Nyantri-Nyunda-Nyakola; Pengkuhu Agamana-Jembarka Budaya-Luhung Elmuna, dan Silih Asih-Silih Asuh-Silih Asuh). Simbol tersebut dapat dipelajari dari permainan Catur, sehingga ke depannya civitas akademika Universitas Pasundan dapat mengubah zaman dan begitulah seharusnya mampu mengubah zaman.

B. Gapleh dan Politik

Gapleh adalah salah satu jenis permainan domino yang sangat populer di Indonesia. Permainan ini sederhana, namun tetap membutuhkan strategi dan taktik untuk memenangkan permainan. Biasanya dimainkan dalam suasana santai bersama keluarga atau teman, Gapleh memiliki daya tarik tersendiri karena dapat menciptakan suasana yang akrab dan kompetitif. Gapleh tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi juga tentang strategi, kerja sama, dan kemampuan membaca situasi. Permainan ini mengajarkan: Keseimbangan antara Serangan dan Bertahan: Seperti dalam kehidupan, tidak semua langkah harus agresif; terkadang strategi bertahan lebih efektif. Kerendahan Hati: Meskipun strategi Anda baik, terkadang keberuntungan memengaruhi hasil. Interaksi Sosial: Gapleh sering menjadi sarana untuk menjalin hubungan dan menciptakan kebersamaan. Gapleh adalah permainan yang menyenangkan dan penuh tantangan, cocok dimainkan untuk mengisi waktu luang atau mempererat hubungan dengan orang terdekat.

Gapleh bukan hanya merupakan permainan biasa, tetapi banyak mengandung unsur filosofis yang mendalam tentang strategi, kepemimpinan, diplomasi dan persaingan yang sehat dalam permainan politik. Seorang pemimpin seperti pemain Gapleh yang cerdas : Harus bisa membaca situasi, merancang strategi, membangun aliansi dan menentukan waktu yang tepat untuk bertindak.

Kompetisi daalm politik harus dilakukan dengan sportifitas, seperti dalam permainan kartu gapleh, meskipun ada pesaing, tetapi tetap harus menjungjung tinggi etika dan keadilan. Dengan pemahaman filosopis gapleh, kita bisa belajar bagaimana politik yang sehat dan beretika dapat dijalankan dengan lebih bijaksana dan strategis demi kesejahtraan Masyarakat.

Istilah Gapleh dalam politik Indonesia yang sering digunakan untuk menggambarkan praktik kompromi atau negosiasi antar-elit politik demi mencapai kesepakatan tertentu, sering kali dengan mengabaikan prinsip atau kepentingan rakyat. Istilah ini diambil dari permainan domino atau gapleh, di mana pemain berusaha mencari kecocokan dalam kartu yang dimiliki, mirip dengan dinamika politik yang sarat dengan perhitungan untung-rugi antar aktor politik.

Adapun ciri-ciri Politik "Gapleh" adalah : *Pragmatik dan Transaksional*, kepentingan utama adalah hasil jangka pendek, seperti pembagian kekuasaan, alokasi jabatan, atau keuntungan finansial, daripada ideologi atau visi jangka panjang. *Elitisme*, keputusan diambil oleh segelintir elit tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas, sehingga mengikis demokrasi partisipatif. *Koalisi Fleksibel*, Partai atau kelompok yang sebelumnya berseberangan bisa bekerja sama jika ada insentif politik atau ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. *Kompromi Nilai*, dalam politik "gapleh," prinsip dan komitmen ideologis sering kali dikorbankan demi mendapatkan hasil pragmatis.

Dampak Politik "Gapleh" adalah sebagai berikut, Positif: Dapat mempercepat tercapainya keputusan politik dan menciptakan stabilitas sementara di tengah konflik kepentingan. Sementara Negatif: Melemahkan kepercayaan publik terhadap politik karena keputusan sering kali tidak transparan dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.

Praktik seperti ini sering muncul dalam sistem politik di mana partai-partai politik saling bergantung untuk mencapai kekuasaan, seperti dalam sistem parlementer atau koalisi pemerintahan di Indonesia. Untuk solusi lebih baik terkait masalah politik seperti ini, masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam pengawasan dan meningkatkan literasi politik.

Kaulinan (permainan) tradisional dalam budaya Sunda bukan sekadar hiburan, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan sosial, budaya, dan bahkan politik. Salah satu permainan yang sering dikaitkan dengan strategi sosial dan politik adalah gapleh (domino).

Gapleh tidak hanya dimainkan untuk mengisi waktu luang, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan, membaca situasi, dan membangun strategi dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam konteks politik, gapleh dapat dijadikan analogi untuk memahami strategi kekuasaan, diplomasi, dan dinamika kepemimpinan.

1. Pengertian dan Aturan Dasar Gapleh
   a. Pengertian Gapleh, gapleh adalah permainan yang menggunakan kartu domino, di mana pemain harus menyusun kartu dengan mencocokkan jumlah titik di ujung kartu sebelumnya. Permainan ini memerlukan strategi, kecerdikan, dan kemampuan membaca langkah lawan agar bisa menang.
   b. Aturan Dasar Gapleh. Permainan dilakukan oleh 2-4 orang.Setiap pemain mendapatkan 7 kartu domino.Pemain yang memiliki kartu bernilai ganda terbesar memulai permainan.Pemain berikutnya harus mencocokkan angka di ujung kartu dengan kartu yang ada di tangannya.Jika seorang pemain tidak memiliki kartu yang bisa dimainkan, mereka harus menunggu atau mengambil kartu baru jika ada aturan demikian.Permainan berlanjut hingga satu pemain menghabiskan semua kartunya atau hingga tidak ada lagi langkah yang bisa dimainkan.

C. Filosofi Kaulinan Gapleh dalam Politik

Dalam politik, setiap pemimpin atau aktor politik harus memiliki strategi, kemampuan membaca situasi, dan kecerdikan dalam mengambil keputusan. Permainan gapleh mencerminkan berbagai aspek yang juga terjadi dalam dunia politik, seperti strategi dalam kekuasaan, aliansi, diplomasi, serta persaingan yang sehat atau bahkan penuh intrik.

   a. Strategi dan Kepemimpinan. Dalam permainan gapleh, pemain harus cermat dalam memilih kartu yang akan dimainkan agar tidak memberikan keuntungan bagi lawan. Sama halnya dalam politik, seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang strategis agar tidak merugikan dirinya atau kelompoknya. Seorang pemimpin yang cerdas

dalam politik, seperti pemain gapleh yang handal, tidak akan membuka kelemahan mereka terlalu cepat dan selalu memiliki rencana cadangan. Contoh dalam Politik: Seorang calon pemimpin tidak langsung mengungkapkan seluruh rencana strateginya, tetapi merancang langkah-langkah secara bertahap. Dalam negosiasi politik, seorang pemimpin tidak langsung memberikan seluruh tuntutan, tetapi menunggu momentum yang tepat.

b. Aliansi dan Diplomasi. Dalam gapleh, sering terjadi situasi di mana pemain harus membentuk aliansi tidak resmi dengan pemain lain untuk menghambat lawan yang lebih kuat. Dalam politik, koalisi atau kerja sama strategis sering dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dalam Politik: Partai-partai politik membentuk koalisi untuk memenangkan pemilu atau menguasai parlemen. Negara-negara membentuk aliansi diplomatik untuk menghadapi ancaman bersama.
c. Kecermatan dalam Membaca Situasi. Pemain gapleh harus mampu membaca pola permainan lawan dan memperkirakan kartu apa yang mereka miliki. Dalam politik, seorang pemimpin harus memiliki analisis situasi yang tajam agar tidak terjebak dalam strategi lawan. Contoh dalam Politik: Seorang politisi yang mampu membaca aspirasi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan dukungan. Dalam debat politik, seorang kandidat yang memahami kelemahan lawannya akan lebih mudah memenangkan argumen.
d. Kesabaran dan Momentum. Dalam gapleh, tidak semua kartu bisa langsung dimainkan. Pemain harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan kartu strategis. Dalam politik, momentum adalah faktor yang sangat penting. Seorang pemimpin harus tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Contoh dalam Politik: Seorang calon presiden mungkin menunggu hingga saat yang tepat sebelum mengumumkan pencalonannya. Seorang diplomat menunda negosiasi hingga situasi lebih menguntungkan.
e. Kompetisi dan Sportivitas. Gapleh adalah permainan yang kompetitif, tetapi tetap memiliki unsur sportivitas. Dalam politik, persaingan yang sehat diperlukan agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Contoh dalam Politik: Pemilu yang berlangsung adil dan jujur mencerminkan persaingan sehat seperti dalam permainan gapleh. Seorang pemimpin yang kalah dalam pemilu tetapi tetap menerima hasilnya menunjukkan sportivitas politik.

D. Pelajaran dari Gapleh untuk Politik yang Sehat

a. Mengutamakan Strategi daripada Emosi. Dalam gapleh, pemain yang terlalu emosional cenderung kalah karena langkahnya bisa ditebak lawan. Begitu pula dalam politik, seorang pemimpin harus tetap rasional dan tidak mudah terpancing provokasi.
b. Membangun Aliansi yang Tepat. Gapleh mengajarkan bahwa tidak semua orang bisa dijadikan sekutu, sehingga perlu memilih aliansi yang tepat. Dalam politik, koalisi harus didasarkan pada kepentingan bersama, bukan sekadar kepentingan sesaat.
c. Memahami Kapan Harus Bertahan dan Kapan Harus Bertindak. Dalam gapleh, pemain yang terlalu agresif bisa saja terjebak di akhir permainan. Dalam politik, kesabaran dalam mengambil keputusan sering kali lebih penting daripada tindakan yang terburu-buru.
d. Menghormati Lawan dan Menjaga Sportivitas. Meskipun gapleh adalah permainan yang kompetitif, para pemain tetap menghormati satu sama lain. Dalam politik, persaingan harus dilakukan secara sehat tanpa menjatuhkan lawan secara tidak etis.

E. Kaulinan Lain

1. Permainan/Kaulinan Congklak

Permainan Congklak merupakan jenis permainan tradis yang dilakukan oleh dua orang, dengan memakai alat papan yang berbentuk seperti perahu serta papan tersebut sisi kiri dan kanannya ada lubang lubang masing masing terdiri dari 7 lubang serta tiap pojok kiri kanan terdapat lubang yang lebih besar dari lubang lubang yang lain. Permainan dilakukan secara berhadap hadapan masing masing lubang diisi dengan sepuluh buah kuwuk. Kaitan dengan politik, permainan ini memerlukan strategi, berpikir jangka panjang dan mengatur sumber daya seperti politik dalam mengatur warga negara atau mengatur organisasi politik. Dianalogikan dalam politik, menggambarkan cara bermain untuk menyusun rencana untuk memenangkan keuntungan yang maksimal seperti strategi politisi dalam kampanye kampanye atau dalam mengatur koalisi.

2. Permainan/Kaulinan Ucing Sumput

Pemainan ini kaitannya dengan politik, adalah adanya unsur politik dalam membikin taktik untuk menyembunyikan serta mencari hal ini erat kaitannya dalam politik karena merupakan permainan Diplomasi. Dalam analogi politik, biasanaya para politisi

menyembunyikan maksudnya terlebih dahulu atau bisa disebut dengan negosiasi di belakang layar. Proses bersembunyi dan mencari dalam politik hal ini merupakan atau mengajarkan takti kamuplase dan pemetaan lingkungan sosial atau kemasyarakatan.

3. Kaulinan Galah Asin atau Bebentengan

Permainan ini merupakan permainan tim yang saling berhadapan dan lapangan permainann biasanya memakai lapangan bulutangkis dan terdiri dari 4 orang 4 orang. Permainan tim ini memerlukan strategi, koordinasi dan kepemimpinan utuk menyerang sambil mempertahankan benteng. Dalam praktek politik mirip dengan konflik politik antara oposisi dengan pemerintah, dimana ada pihak yang mempertahankan dalam hal ini pemerintah dan ada pihak yang menyerang kekuasaan atau mengkritisi pemerintah dan mencoba untuk mengambil alih kekuasaan. Disamping hal tersebut ada strategi menyerang, bertahan dan koordinasi tim, hal ini identik dengan dinamika politik partai dalam politik. Tentu saja dalam kaitan ini diperlukan nilai kepemimpinan dalam tiap tiap tim untuk menyusun strategi dan mengarahkan anggotanya.

4. Permainan Jajangkungan/Egrang

Permainan ini merupakan permainan individu tapi bisa diperlombakan, permainan ini merupakan suatu permainan yang berjalan memakai bambu panjang yang memerlukan ke seimbangan. Dalam kaitan dengan politik, hal ini melambangkan perjuangan yang cukup memerlukan tenaga pikiran dan perasaan untuk mencapai suatu kekuasaan yang diharapkan yang kerapkali harus dijaga dan dipelihara keseimbangan dan kestabilannya. Dalam permainan ini ada resiko jatuh kalau tidak hati-hati dalam menjalankan egrang tersebut sama halnya dengan resiko jatuh dalam politik, kalau tidak berhati-hati.

BAB 13 PEMIKIRAN POLITIK TOKOH-TOKOH SUNDA

Masyarakat Sunda memiliki warisan pemikiran politik yang kaya, yang tercermin dalam nilai nilai demokrasi, keadilan, musyawarah dan kesejahtraan rakyat. Banyak tokoh tokoh Sunda yang telah memberikan kantribusi dalam pengembanagn politik di Indonesia, baik dalam kontek yang tradisional, kolonial, maupun modern. Salah satu contoh dalam kaitan dengan hal ini, paling tidak kita dapat melihat dari pemikiran politik tokoh legendaris Sunda yaitu Prabu Silihwangi. Tokoh legendaris ini sering dikaitkan dengan kepemimpinan yang bijaksana, adil, dan penuh perhatian bagi kehidupan rakyatnya. Pemikiran politiknya menekankan pada pentingnya kesatuan, keadilan, dan keseimbangan dalam mengatur negaranya/Kerajaan. Dibawah ini akan penulis sajikan beberapa pemikiran tokoh Sunda dari jaman Bihari sampai dengan jaman moderent, diantaranya:

A. Dewawarman

Sebelum mendirikan kerajaan Salakanagara, beliau adalah seorang utusan dari Maharaja Palawa. Dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan raja tersebut, beliau pernah mengunjungi kerajaan-kerajaan di Ujung Mendini, Bumi Sopala, Yawana, Syangka, Cina, dan Abasid (Mesopotamia). Raja ini memiliki dua orang istri, yang pertama merupakan putri dari Benggala (India) dan yang kedua adalah puteri dari Aki Tirem yang bernama Pohaci Larasati.



Ilustrasi Dewawarman

Kontribusi politik yang disumbangkan adalah menyusun pemerintahan pertama yang berbentuk kerajaan, setelah mendirikan Salakanagara. Beliau bergelar Prabu Darmalokapala Dewawarman Haji Raksa Gapura Sagara (selanjutnya disebut Dewawarman I). Dewawarman I, kerap kali harus memimpin langsung pasukannya untuk menumpas para bajak laut. Karena beliau begitu ahli dalam bertempur, maka para perompak saat itu dapat ditumpas dan enggan untuk memasuki wilayah Salakanagara.

Dari pernikahannya yang pertama dengan Putri Benggala, beliau memiliki putra yang bernama Singasagara Bhimayasawirya. Sedangkan dari pernikahannya dengan Pohaci Larasati, Dewawarman I memiliki beberapa orang anak. Anak laki-laki tertua yang bernama Digwijayakasa Dewawarmanputra (Dewawarman II) menggantikan kedudukan ayahnya selaku penguasa Salakanagara.

B. Purnawarman

Adalah Raja yang paling terkenal, serta dikenal sebagai Raja yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Tarumanagara. Beliau melakukan pemeliharaan aliran sungai. Tahun 410 M ia memperbaiki alur kali Gangga di Cirebon; Memperbaiki alur Kali Cupu di Kerajaan Cupunagara, juga kali Gomanti dan Candrabaga. Sehingga ladang-ladang petani menjadi subur, dan tidak lagi mengalami kekeringan ketika kemarau tiba. Purnawarman adalah Raja yang namanya ditulis dalam prasasti paling lama memerintah (Prasasti Ciaruteun). Beliau juga mendirikan kota Sundapura serta membuat pelabuhan angkatan perang. Pada masanya, tentara Tarumanagara sudah mengenakan pakaian dari besi (kere, zirah). Beliau bergelar *Wyagra Tarumanagara* (Maung Tarumanagara) dan Tarumanagara setelah di pimpin Purnawarman, angkatan perangnya di perbesar serta lengkap persenjataannya.



Ilustrasi Purnawarman

C. Prabu Anom Tarusbawa

Prabu Anom Tarusbawa adalah Raja di kerajaan bawahan Tarumanagara, yaitu kerajaan Sunda Sawawa. Beliau menduduki tahta kerajaan Tarumanaga, ketika mertuanya yaitu Maharaja Linggawarman wafat pada tahun 669 M. Ketika Tarumanagara dipimpin oleh mertuanya, kejayaan kerajaan sudah hampir mati. Tarusbawa mengupayakan agar kerajaan bisa kembali seperti kejayaan Tarumanagara waktu dipimpin oleh Sri Maharaja Purnawarman (395-434 Masehi). Yang pertama dilakukan Tarusbawa adalah mengubah nama Tarumanagara jadi Kerajaan Sunda, dari nama kota kelahirannya yang pada waktu itu beralih fungsi dari sebutan Sundapura menjadi Sunda Sembawa (Tanah Kabuyutan/Tanah Leluhur). Oleh karena itu, di belakang nama pelantikannya juga menggunakan gelar Sundasembawa. Keadaan ini memancing protes dari Wretikandayun sehingga ia menyatakan kemerdekaan Kerajaan Galuh (Kendan) dari kekuasaan Kerajaan Sunda (pengganti nama Tarumanagara).



Ilustrasi Prabu Anom Tarusbawa

Tarusbawa memindahkan ibu kota kerajaan dari Sundapura (Bekasi) ke Pakuan (Bogor). Di salah satu tanah, Tarusbawa mendirikan lima keraton, yang bangunannya dan besarnya sama juga posisinya sejajar. Keraton itu masing-masing diberi nama: Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati. Naskah Carita Parahiyangan menyebutkan ¬Sri Kadatwan Bima-Punta-Narayana-Madura-Suradipati. Setelah keraton selesai dibangun, selanjutnya diberkahi (diprebokta) oleh Bujangga Sedamanah. Jumlah keraton 5 itu dalam sastra klasik disebut panca persada.

D. Prabu Sanjaya

Sanjaya merupakan pendiri kerajaan Medang sekaligus raja pertama yang berkuasa sekitar tahun 732-746 Masehi. Namanya dikenal melalui prasasti Canggal, prasasti Mantyasih, dan Prasasti Wanua Tengah III serta naskah Carita Parahyangan. Walaupun naskah Carita Parahyangan bukan sumber primer tetapi naskah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengecekan dan pembanding serta pelengkap.

Dalam prasasti Mantyasih, Sanjaya disebut dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Berbeda dengan gelar para penggantinya ia menggunakan gelar Sang Ratu, itu artinya posisinya lebih tinggi dari para Maharaja. Setelah dicek menggunakan naskah Carita Parahyangan, akhirnya terungkap bahwa gelar Sang Ratu yang ia sandang tersebut karena ia mewarisi dan menjabat sebagai raja di tiga kerajaan yaitu Sunda, Galuh, dan Medang.



Ilustrasi Prabu Sanjaya

Sanjaya adalah cicit dari Wretikandayun (raja pertama kerajaan Galuh, yang memisahkan diri dari kerajaan Tarumanagara). Ia menikahi cucu Tarusbawa, yang bernama Nay Sekarkancana. Karena anak laki-laki Tarusbawa meninggal di usia muda, maka tahta kerajaan Sunda jatuh pada Sanjaya.

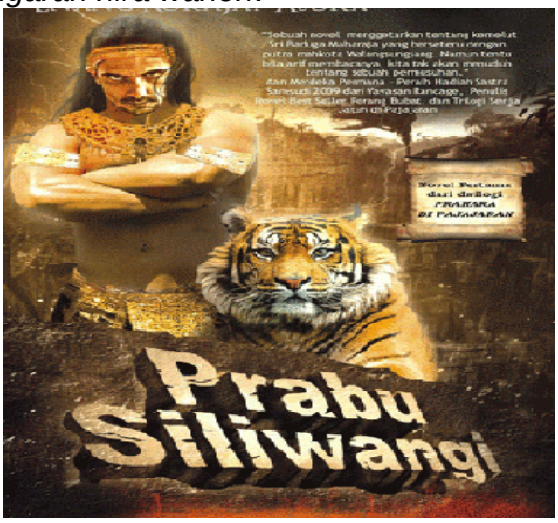
Dengan silsilah seperti diatas, Sanjaya juga merupakan pewaris sah dari kerajaan Galuh. Namun pada tahun 716 M, ayah Sanjaya, Bratasenawa atau Sena (raja ketiga Galuh) dikudeta dari tahtanya oleh Purbasora (saudara seibu Sena sendiri). Saat kudeta terjadi, Sanjaya dan keluarganya melarikan diri ke daerah Pakuan Pajajaran (pusat pemerintahan kerajaan Sunda). Kemudian meminta pertolongan pada Tarusbawa untuk menyerang Galuh, dengan tujuan melengserkan Purbasora. Saat Tarusbawa meninggal tahun 723 M, tahta kerajaan Sunda diwariskan pada Sanjaya. Dengan begitu, kekuasaan Sunda dan Galuh sama–sama berada di tangan Sanjaya. Di tangan Sanjaya, Sunda dan Galuh kembali bersatu. Sanjaya berkuasa hingga tahun 732 M, dan mewariskan tahta kerajaan pada puteranya, Tamperan Barmawijaya.

Kontribusi Sanjaya dalam pemikiran politik : *Pertama*, menyatukan 3 (tiga) kerajaan di Jawa, yaitu Medang, Sunda dan Galuh menjadi satu pemerintahan. *Kedua*, memperkenalkan pola penyerangan (perang) di malam hari ketika menyerang Galuh. Ketiga, mempergunakan model

koalisi permanen melalui pernikahan dengan putri dari kerajaan Sunda. Koalisi dibangun antara Medang dari Jawa Timur dengan kerajaan Sunda, dalam upaya mengalahkan Galuh.

E. Sri Baduga Maharaja

Raja I adalah Jayadewata, dari bapak Raja Galuh/Kawali (Ningrat Kancana) dan istri putri Susuk Tunggal dari Kerajaan Sunda, sehingga Jayadewata menjadi Maharaja dari Sunda dan Galuh yang diberi nama Padjajaran. Ia bergelar Sri Baduga Maharaja Pajajaran (Prabu Siliwangi). Didalam Pustaka Kertabumi I/4 HAL 51 dikatakan : *RAHYANG Dewa Niskala manak ta Sri Baduga Maharaja Pajajaran kang amituhu wwang Sunda sinebut Prabhu Siliwangi ya ta Raden Pamanan Rasa ngaran nira waneh*.



Ilustrasi Sri Baduga Maharaja Pajajaran

Ia di sebut Siliwangi karena dalam hal kekuasaan ia menggantikan Prabu Wangi (Linggabuana) dan Prabu Wangisuta (Wastu Kancana). Sumbangan Prabu Siliwangi kepada masyarakat Sunda: *Pertama*, memberikan pondasi kepemimpinan melalui konsep Dasapasanta (sepuluh penetram hati); *Kedua*, membangun Kota Pakuan menjadi kota kedua terbesar di Indonesia setelah Demak; *Ketiga*, dalam perilaku hablulminnanas, melahirkan prinsip kasilihwangian (silih asih-silih asuh-silih asah). *Keempat*, menanamkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Padjadjaran, ia juga berlaku adil kepada 48 orang istrinya (bahkan dalam Babad Padjajaran yang di tulis Pangeran Kornel, istri Prabu Siliwangi adalah 150 lebih satu).

F. Prabu Tajimalela

Prabu Tajimalela menjadi sosok penting yang mencetuskan nama Sumedang Larang pada saat masih zaman kerajaan. Prabu Tajimalela memiliki nama lain, yakni Batara Tungtang Buana. Ia adalah pewaris tahta dari Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh ayahnya, yaitu Prabu Guru Aji Putih. Di tangan Prabu Tajimalela, Kerajaan Tembong Agung berubah menjadi Sumedang Larang. Nama tersebut, dipilihnya setelah dirinya mempelajari ilmu Kasumedangan.



Ilustrasi Prabu Tajimalela

Kontribusi Prabu Tajimalela dalam pemikiran politik adalah : *Pertama*, mengelola pemerintahan secara baik, penuh dengan terobosan (inovasi) termasuk didalamnya merubah nama kerajaan dari Tembong Agung ke Sumedang Larang. *Kedua*, Mengangkat lawan menjadi mitra (bisa tidur nyenyak dengan musuh, di pakai oleh Samsung Elektronik). Ketika tokoh pemberontak Gagak Sangkur yang dikalahkannya dalam pertempuran, kemudian untuk melakukan rekonsiliasi, Gagak Sangkur diangkat menjadi Patih kerajaan Sumedang Larang. *Ketiga*, mewariskan Ilmu Kasumedangan, ilmu tentang menjadi pemimpin yang mulia. *Keempat*, kepemimpinan Prabu Tajimalela sangat menaruh perhatian pada bidang pertanian di sepanjang tepian sungai Cimanuk, peternakan dipusatkan di paniis Cieunteung dan pemeliharaan ikan di Pengerucuk (Situraja).

G. Syarif Hidayatullah

Sunan Gunung Jati atau lebih di kenal sebagai Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Walisongo, ia dilahirkan Tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin Sultan Pertama Kesultanan

Champa dan Syarifah Mudaim (Nyai Rara Santang), putri dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi) dari Kerajaan Padjajaran. Beliau dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon ke-2 pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati.



Ilustrasi Syarif Hidayatullah

Kontribusi pemikiran politik beliau adalah : *Pertama*, membangun kekuatan politik Islam di Jawa Barat yang berpusat di Cirebon. *Kedua*, memadukan antara seorang ulama (Wali Songo) dengan Umaro (menjadi Sultan di Pakungwati). *Ketiga*, mengelola pemerintahan berdasarkan sistem kesultanan dan juga meletakan pondasi kesultanan juga untuk kesultanan Surasowan (Banten). *Keempat*, menerapkan sistem pemerintahan monarkhi heridetis, dimana kekuasaan dalam bidang keagamaan dan bidang politik semuanya berada di tangan sultan. Sehingga, ucapan sultan dalam bentuk pesan-pesan moral ataupun larangan-larangan, akan menjadi aturan hukum yang berlaku.

H. Pangeran Kornel

Nama aslinya adalah Pangeran Kusumah Dinata putra dari bupati Sumedang sebelumnya, yaitu Raden Adipati Surianagara(1761-1765). Nama kencilnya dikenal sebagai Raden Jamu dan ketika diangkat bupati bergelar Tumenggung Surianagara. Bergelar Pangeran Kornel

diberikan oleh Belanda, ketika diminta untuk membantu Belanda dalam Perang Diponogoro (1925-1930), karena keberaniannya Belanda mengangkat Kusumah Dinata menjadi kolonel titular.

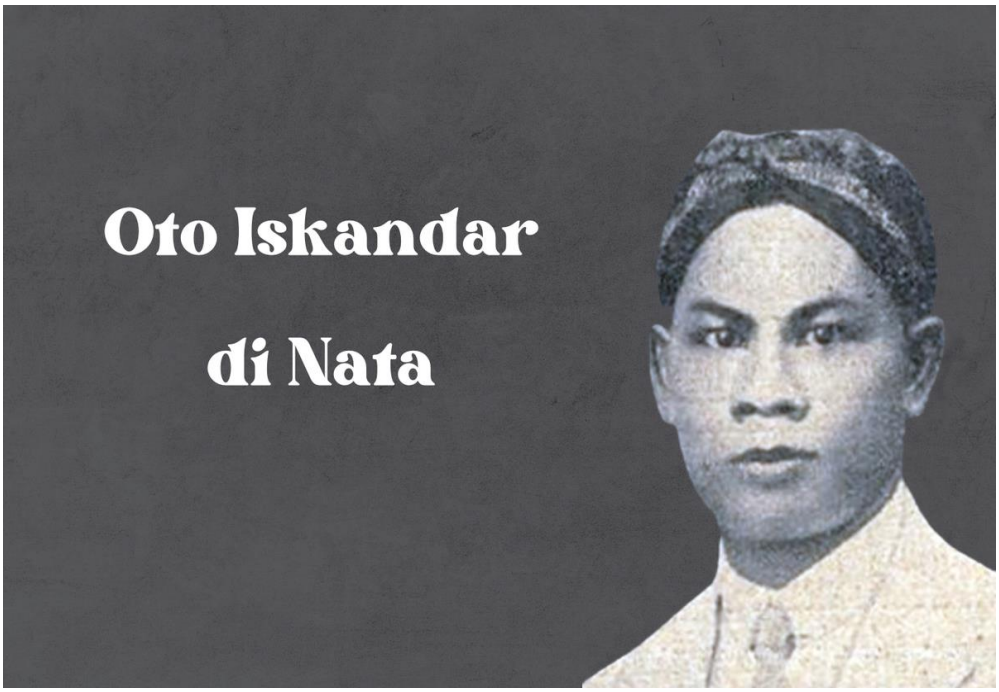


Pangeran Kornel

Kontribusi pemikiran politik dari Pangeran Kornel adalah : *Pertama*, dalam menata pemerintahan dikenal sebagai bupati yang bijaksana dan adil, sehingga dalam masa kepemimpinannya, keadaan rahayat Sumedang makmur dan sajehtera. *Kedua*, kepribadiannya parigel (kreatif), jujur, handap asor (merakyat), dibuktikan oleh pangakuan Nicolaas Engelhard, *Sumedang ti saprak di parentah ku Tumenggung Surianagara langkung maju, daerah nu asalna leuweung ayeuna janten sawarga*. Ketiga, dalam membela rakyat Sumedang yang dipaksa membelah gunung untuk membuat jalan (Cadas Pangeran), Pangeran Kornel mempertaruhkan nyawanya, ketika Jenderal Daendels yang dikenal sangar, dihadapi dengan salaman dengan kiri, sementara tangan kanannya siap menghunus keris (senjata tajam) yang terselip di belakang pinggangnya. Kajadian ieu, tiasa disebat minangka wawanen Pangeran Kusumah Dinata dina ngedalkeun nu dianggapna hal bener. Lamun anjeuna yakin eta bener, anjeuna wani ngedalkeun di hareupeun saha wae, teu paduli nu dilakukeun ngabahayakeun kedudukan, pangkat tur kasalametan dirina.

I. Oto Iskandar di Nata

Oto Iskandar di Nata, adalah salah seorang tokoh pahlawan yang besar jasanya bagi masyarakat Sunda dan Indonesia, lahir di Bandung 31 Maret 1897. Oto berasal dari keluarga priyayi dan berjiwa kerakyatan. Beliau adalah Ketua Umum Paguyuban Pasundan yang ke-7, serta menjadi Menteri pada masa pemerintahan awal Indonesia, juga pernah terpilih menjadi dewan kota(gemeenteraad) pada tahun 1928.



Kontribusi pemikiran politik dari Oto Iskandardinata, adalah : *Pertama*, menjadikan Paguyuban Pasundan sebagai organisasi yang mengalami kemajuan pesat di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan pers. Bermula dari gerakan kebudayaan, Paguyuban Pasundan kemudian menyelami juga pergerakan politik. *Kedua*, menjadikan dewan rakyat (volksraad, Oto refresentasi dari Paguyuban Pasundan), sebagai ajang untuk mengkritisi pemerintah Belanda, sehingga atas keberaniannya digelari "Si Jalak Harupat". *Ketiga*, Dalam usaha merebut kemerdekaan, Oto membentuk PETA dan terpilih juga menjadi anggota BPUPKI dan selanjutnya PPKI, dan orang pertama yang mengusulkan Soekarno jadi Presiden dan Hatta sebagai Wakil dalam siding pertama PPKI. *Keempat*, inisiator pekik kemerdekaan, meski saat awal beliau meneriakkan "Indonesia Merdeka" dan kemudian pekiknya menjadi hanya "Merdeka". *Kelima*, ketika menjadi Menteri Negara, mengusulkan pembentukan BKR yang terdiri dari para lascar yang ada, dan kemudian BKR menjadi TKR, dan selanjutnya menjadi TNI.

J. Syafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara, lahir 28 Februari 1911 adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai

Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa Demokrasi Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama.

Syafruddin lahir di Banten, dengan campuran darah Minangkabau–Sunda Banten. Menyusul pecahnya perang kemerdekaan, Syafruddin terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta ke Bukittinggi. Setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi.



Kontribusi pemikiran politik adalah: *Pertama*, seorang pemimpin yang tidak menganal menyerah, bahkan ketika diamanahi menjadi Presiden PDRI, dia mampu merawatnya, sehingga Indonesia tetap eksis. *Kedua*, Konsisten dengan sikapnya meskipun harus berseberangan dengan pemerintahan karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Sukarno selama akhir masa Demokrasi Liberal.

K. Sanusi Hardjadinata

Raden Hadji Mohamad Sanusi Hardjadinata, lahir 24 Juni 1914, seorang tokoh nasionalis yang berkiprah di dunia politik dengan bergabung Partai Nasional Indonesia. Pada masa orde baru, menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia, serta menjadi Ketua Umum PDI (1975-1980). (Evan, 2015). Riwayat jabatan : Wakil Residen Priangan (1947–1948), Residen Madiun (1948–1949), Residen Priangan (1950–1951), Gubernur Jawa Barat ke-5 (1951–1957), Menteri Dalam Negeri (1957-1959), Rektor Universitas Padjadjaran (1960-1966), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1967–1968), aktif di Partai (PDI) sampai tahun 1980.



Sanusi Hardjadinata

Selama karir politiknya yang begitu panjang, telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran politik terhadap kemajuan Indonesia, bersendikan pada nilai-nilai budaya Sunda. Diantaranya ketika beliau menjadi Gubernur Jawa Barat, beliau membuat tafsiran SILAS, menjadi : silih asih ku pangarti, silih asah ku pangabisa, silih asuh ku pangaweruh. Jargon ini dipraktekkan selama beliau menjadi Gubernur Jawa Barat.

L. R. Emma Bratakusumah

R. Emma Bratakusumah, yang dikenal Gan Ema, lahir 12 Agustus 1901, seorang tokoh Sunda dan Pejuang Pergerakan Nasional di Jawa Barat. Gan Ema merupakan pejuang kemajuan kesundaan dan pergerakan nasional pada masanya. Dikenal sebagai budayawan yang memiliki keahlian pencak silat, politisi, penggerak budaya Sunda,

pembina generasi muda serta pendiri surat kabar. Tahun 1918, bergabung dengan Paguyuban Pasundan untuk menambah energi politiknya, dan tahun 1921, membuat surat kabar Paguyuban Siliwangi. Paska 1945, mendirikan Laskar Rakyat yang berfungsi untuk mengatur pengungsian pemerintahan dan masyarakat Bandung pada peristiwa Bandung lautan api. Gan Ema adalah tokoh heroik pada peristiwa Bandung lautan api dengan memimpin Barisan Banteng bersama adiknya Ukar Bratakusumah. Pada tahun 1949-1950 berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, dan juga mendirikan Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) atau yang lebih dikenal sebagai Kebun Binatang Bandung.



R. Emma Bratakusumah

Pandangan politiknya, ingin memajukan bangsanya karena cinta akan tanah air yang dimulai dan diutamakan dari tingkat bawah berdasarkan kebudayaan Sunda, ingin memerdekakan bangsanya dari belenggu penjajahan melalui persiapan rakyat harus berani bertarung secara individual dan atau kelompok, bentuk negara yang sesuai bagi Indonesia merdeka adalah federasi atau otonomi yang luas, karena sesuai dengan kodrat masyarakat dan geografi Indonesia.

M. Tjetje Hidayat Padmadinata

Dr. (HC) Tjetje Hidayat Padmadinata, lahir 22 Juni 1935, adalah seorang akademisi, aktivis, dan politisi Indonesia lintas zaman : Orde Lama, Orde baru, dan Reformasi. Perjalanan politiknya adalah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia empat periode mewakili daerah pemilihan Jawa Barat. Selama di DPR-RI ia duduk di Komisi I dan Komisi II (1999–2004). Sampai akhir hayatnya masih berkecimpung dalam aktifitas politik dan menulis di berbagai surat khabar.



Tjetje Hidayat Padmadinata

Aktifitas Kang Cece : ”Ia terus bersuara untuk meluruskan berbagai ketimpangan kekuasaan dan aktivis mahiwal (unik, aneh, lain dari yang lain), karena pernah menjadi tahanan politik baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Konsepsi politik Tjetje ialah perlunya diselenggarakan musyawarah nasional tentang kepartaian sehingga terbentuk dua partai politik besar (”Partai Indonesia” dan ”Partai Nusantara”) yang cocok dengan sistem kabinet presidensial dalam UUD 1945. Berbagai fakta tentang kehidupan politik di Indonesia, selain banyak komprador, banyak pula peselancar politik yang telah membajak reformasi dengan melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Tjetje, dalam perikehidupan bernegara-bangsa (nation states) tak perlu diubah-ubah lagi, tinggal perbaikan dalam pelaksanaannya.

Rajin ”memungut” ilmu dari banyak tokoh besar pada masa pergerakan, seperti Raden Adipati Arya Wiranatakusumah, Ema Bratakusumah, Sukanda Bratamanggala, Mayjen Suwarto, dan Zulkifli

Lubis. Kalangan elite Indonesia mengenal Tjetje sebagai pengkaji ilmu politik, politisi multitalenta, sekaligus politiSI yang teguh dalam memelihara integritas atas dasar moralitas dan budaya adiluhung.

N. Ali Sadikin

Ali Sadikin kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927, purnawirawan Letnan Jenderal KKO-AL. Karir sipilnya adalah pada 1963-1966, menjadi Menteri Perhubungan Laut sekaligus Menteri Koordinator Kompartemen Maritim. Gubernur DKI Jakarta, setelah ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada 1966-1977.



Ali Sadikin

Kontribusi pemikiran politik Ali Sadikin adalah: *Pertama*, berperan dalam menciptakan Jakarta sebagai kota metropolitan, Gubernur DKI Jakarta paling legendaris, serta pemimpin Ibu Kota yang dikenal berwatak keras dan kontroversial, Soekarno menyebutnya *"a koppige vent, koppig." Kedua*, pejuang kemerdekaan melalui BKR Laut, cikal bakal TNI AL melawan penjajah, dikenal sebagai yang gagah berani maju ke garis depan sambil memberondong senapan mesin. *Ketiga*, Jakarta mengalami perkembangan pembangunan kota, ini termasuk berdirinya Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek

Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, kota satelit Pluit di Jakarta Utara, dan pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet. Selain itu, Ali menjadi pencetus dirayakan hari jadi Kota Jakarta setiap 22 Juni.

O. Ahmad Heryawan

Ahmad Heryawan, lahir 19 Juni 1966, seorang akademisi dan politisi. Melalui persinggungannya dengan pergerakan tarbiyah, ia menunjukan perhatiannya dalam politik. Ia Bergabung dengan Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera). Perjalanan karir politiknya adalah : Pernah menduduki kursi legislatif sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pada 2002, kandidat calon Gubernur DKI Jakarta, menjadi Gubernur Jawa Barat selama dua periode sejak kemenangan pertama pada 2008. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, pernah menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera sementara.



Ahmad Heryawan

Kontribusi pemikiran politik Ahmad Heryawan yang lebih ketara adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin melalui kebijakan “one day one juz” da nada kewajiban bagi siapapun yang memjadi pejabat di Jawa Barat harus mampu menuturkan Bahasa Sunda. Kepemimpinannya mendapat sejumlah penghargaan, sedikitnya 150 penghargaan dari pemerintah yang diraih pemerintah provinsi Jawa

Barat. Pada tahun 2015, Jawa Barat di bawah pemerintahan Ahmad Heryawan berhasil meraih penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara untuk yang kelima kalinya.

P. Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi, lahir di Subang, 11 April 1971, seorang aktivis dan politisi dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030. Karir Politiknya diawali menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada 1999 hingga pengunduran dirinya seusai terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta (2004). Wakil Bupati Purwakarta (2004-2008), Bupati Purwakarta selama dua periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018. Selanjutnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan Jawa Barat VII dan duduk di Komisi VI dari 2019 hingga 2023.



Dedi Mulyadi

Kontribusi pemikiran politik Dedi Mulyadi adalah menerapkan model kepemimpinan Sunda dalam aktifitas politik modern, melalui terobosan kebijakan yang pro-rakyat kecil, sehingga keberterimaan masyarakat akan gaya kepemimpinannya cukup besar. Semenjak menjadi Bupati Purwakarta, mampu bersikap sebagai seorang pemimpin yang mampu menjadi panutan bagi rakyatnya, dan mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin dengan karater nyunda. Dedi Mulyadi memiliki

keinginan setiap daerah yang dipimpinnya, memiliki karakter/pembeda dari daerah lainnya, terutama di warnai oleh kearifan lokal Sunda.

BAB 14 PENUTUP

Politik merupakan aspek penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, karena politik merupakan ruh dari pada kehidupan berbangsa dan bernegara.Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba memaparkan hal :

Pertama, Pemikiran politik yang merupakan kajian tentang ide, konsep, dan teori yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antar-individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Pemikiran politik dapat mencakup berbagai aspek, seperti ideologi, hak asasi manusia, keadilan, kebebasan dan partisipasi politik. Secara historis, pemikiran politik telah berkembang melalui berbagai zaman, mulai dari filsafat politik klasik hingga pemikiran politik modern dan kontemporer. Pemikiran politik adalah upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang: *Satu*, Kekuasaan, berkaitan dengan, siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. *Dua*, Legitimasi, berkenaan dengan dasar sahnya kekuasaan atau pemerintahan. *Tiga*, Keadilan, seputar bagaimana tatanan politik dapat memastikan keadilan sosial, ekonomi, dan hukum, serta *Empat*, Kebebasan dan Kewajiban, tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan individu dengan kebutuhan kolektif masyarakat.

Kedua, Pemikiran Politik merujuk kepada gagasan, teori, dan konsep yang membentuk cara manusia memahami, mengorganisir, dan menjalankan pemerintahan serta kehidupan politik. Pemikiran politik mencakup berbagai ideologi, filsafat, serta pemikiran para tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Pemikiran politik terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, teknologi, dan tantangan global.

Ketiga, Nilai-nilai Budaya Sunda dalam Politik. Sunda memiliki sejumlah budaya yang khas seperti: Kesopanan (handap asor), rendah hati terhadap sesama; Penghormatan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih kecil (*hormat ka nu luhur, nyaah kanu leutik)*; dan membantu orang lain yang membutuhkan dan yang dalam kesusahan (nulung kanu butuh, nalang ka nu susah). Secara umum, masyarakat Jawa Barat dan Banten atau Tatar Sunda, sering dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya religius. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo “silih

asih, silih asuh, silih asah" (saling mengasihi, saling mempertajam diri, saling memelihara dan melindungi).

Keempat, Pengaruh Agama dalam Politik. Sebagian besar masyarakat Sunda beragama Islam. Kehidupan keagamaan dalam masyarakat Sunda tampak di dalam upacara-upacara selamatan yang berhubungan dengan tahap-tahap lingkaran hidup seseorang, mulai dari: upacara salametan yang sering dilaksanakan merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan YME atas segala karunianya.

Kelima, Budaya Politik Sunda. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. (Sumartono, 2018) Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik. Sunda sebagai sebuah entitas budaya lokal terbesar kedua di Indonesia setelah budaya Jawa mempunyai seperangkat nilai-nilai atau norma-norma dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari mulai norma agama, politik, hukum, sosial, dan ekonomi hingga pada persoalan kehidupan lainnya. Khusus bidang politik, Sunda pun mempunyai norma-norma sebagai warisan dari budaya leluhurnya. Banyak tokoh-tokoh sunda yang menjadi politisi dan berhasil menjadikan rakyat aman dan sejahtera. Contohnya: Raja-raja Sunda pada zaman Salakanagara, Tarumanagara, Padjajaran dan sebagainya, juga Pangeran Kornel, Otto Iskandar Dinata, dan lain-lain. Mereka telah menjadikan norma budaya lokal sebagai dasar bagi perjuangannya. Warisan kebudayaan lokal yang sarat dengan nilai dan norma dalam budaya Sunda terdapat serentetan norma yang bisa dijadikan landasan bagi aktivitas politik. Silih asih, silih asuh, dan silih asah, merupakan ungkapan sunda yang menjadi warisan budaya dalam menata kehidupan supaya hidup damai, tentram, dan aman serta *pamali tarung jeung dulur, pamali bengkah jeung dulur*, merupakan ungkapan yang menata keakraban sosial antara saudara.

Keenam, Kerajaan Sunda memiliki sistem politik monarki yang terstruktur, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, didukung oleh dewan penasihat, pejabat daerah, dan pasukan militer. Sistem hukum berbasis adat dan agama, sementara diplomasi dengan kerajaan lain bersifat dinamis. Namun, pengaruh Islam yang semakin kuat serta

melemahnya kekuatan ekonomi dan militer menyebabkan kerajaan ini akhirnya runtuh pada abad ke-16 dan digantikan oleh Kesultanan Cirebon serta Banten. Sistem politik Kerajaan Sunda menunjukkan kombinasi antara pemerintahan monarki yang kuat, penghormatan terhadap adat dan hukum, serta unsur musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terstruktur, kerajaan ini mampu bertahan selama berabad-abad sebelum akhirnya runtuh akibat ekspansi Islam pada abad ke-16. Sistem Politik Kerajaan Sunda: Struktur, Hukum, dan Dinamika Pemerintahan. Sistem politik Kerajaan Sunda menunjukkan keseimbangan antara pemerintahan pusat yang kuat dan otonomi daerah yang cukup luas. Meskipun menganut monarki absolut, sistem musyawarah tetap diterapkan dalam pengambilan keputusan.

Ketujuh, Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekadar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain. Dalam dunia yang terus berkembang ini, pemimpin yang efektif adalah aset berharga bagi setiap organisasi. Kepemimpinan dalam masyarakat Sunda mengacu kepada naskah kuno Sanghiyang Siksa Kandang Karesian (1518 M) nu di nyutat perilaku Prabu Jayadewata/Siliwangi, nu pupusna tahun 1512, ngeunaan tuduh laku tatakrama pikeun jadi pamingpin di masyarakat jaman harita. Eta palanggeran teh disebut Parigeuing a Parigeuing. Parigeuing mah ngarana: bisa nitah bisa miwarang, ja sabda arum wawangi, nya mana henteu surah di piwarang. (Nu di sebat parigeuing teh nyaeta bisa marentah bisa miwarang ku caritaan nu pikageunaheun tepi ka teu matak jengkel nu di parentahna). Disamping dalam naskah diatas, konsepsi kepemimpinan terdapat juga dalam naskah Sanghyang Hayu yang merupakan naskah berbahan nipah abad XVI Masehi. Dalam naskah itu, dipaparkan lima belas unsur penting yang harus dimiliki pemimpin, yaitu: Budi-guna-pradana (bijak-arif-saleh); Kaya-wak-cita (sehat/kuat-bersabda-hati); Pratiwi-akasa-antara (bumi- angkasa-antara; Mata-tutuk talinga (penglihatan-ucapan-pendengaran, dan Bayu-sabda-hedap (energi-ucapan/sabdaitikad/kalbu dan pikiran). Semuanya berhubungan satu sama lain yang membangun sikap dan karakter pemimpin ideal.

Kedelapan, Budaya Sunda mengedepankan pendekatan ngariung, yaitu berkumpul untuk bermusyawarah demi mencapai mufakat. Tradisi ini menjadi dasar bagi pengembangan demokrasi partisipatif, di mana semua suara dalam masyarakat dihormati. Tradisi musyawarah (rembug) merupakan praktik politik Sunda yang mengutamakan dialog untuk mencapai mufakat. Nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda yang selalu mengedepankan harmoni dan kerja sama dalam pengambilan Keputusa.

Kesembilan, Politik Sunda dalam konsep Sunda Wiwitan berfokus pada keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Politik dalam sistem ini tidak hanya berorientasi pada kekuasaan semata, tetapi juga pada kepemimpinan moral, keadilan sosial, musyawarah, serta keberlanjutan lingkungan. Konsep Tri Tangtu di Buana menunjukkan bahwa politik Sunda bersifat terstruktur dan kolektif, di mana raja tidak bisa bertindak sendiri tanpa bimbingan spiritual dan dukungan rakyat. Strategi politiknya pun lebih mengedepankan aliansi diplomatik, pertahanan berbasis ekologi, serta kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesepuluh, Masyarakat Sunda memiliki sebuah konsep berfikir Sunda, dikenal dengan opat kalima tunggal, yaitu mengacu pada pandangan, manusia terbentuk dari acining : seuneu (sebagian orang menyebutnya panon poe), yang disimbolkan dengan warna merah berupa energi kahayang atau keinginan; taneuh, disimbolkan dengan warna hitam, berupa dorongan sensasi pancaindera; cai disimbolkan dengan warna bodas (putih), berupa emosi atau perasaan, dan angin atawa hawa disimbolkan dengan warna kuning berupa fikiran. Keempat hal diatas dimaknai sebagai kurung. Kurung nyaeta raga badag atawa fisik manusa, nu ngalampahkeun kahayang kuring. Sementara makna Tunggal atau dalam konsepsi Jawa disebut pancer adalah puseur atau pusat, atau dalam bahasa sederhananya ruhani atau Ruh dalam bahasa tasauf Sunda dimaknai dengan kuring. Menyatunya antara kurung dan kuring, itulah yang dimaknai manunggal atau Tunggal.

Kesebelas, Falsafah hidup dan kearifan orang Sunda Silih Asih, Silih Asuh, Silih Asah mempunyai arti dan makna yang istimewa karena ia mengajarkan satu kesatuan sikap yang jika terjiwai dengan baik oleh suatu masyarakat berpotensi besar untuk membuat masyarakat tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang kuat, bersatu dan sejahtera. Prinsip ini mencerminkan harmoni dan keharmonisan sebagai dasar dalam pengelolaan hubungan sosial dan politik. Filsafat Silas yang

merupakan kearifan lokal berasal dari abad ke 14 dari Prabu Siliwangi yang namanya ini diserap dari kata silih-wangikeun agar rakyatnya bisa menjadi manusia unggulan atau manusa sunda nu-nyunda. Prabu Wangi sendiri merupakan julukan yang diberikan kepada Prabu Maharaja setelah "mewangikan" kebanggaan rakyat tatar Sunda dengan prestasi dan kemasyhurannya.

Keduabelas, Filosopis kaulinan Sunda Catur dan Gapleh. Kaulinan Catur nyaéta olah raga méntal nu ngalibetkeun dua pamaén kalawan tujuan utama pikeun meunangkeun kaulinan ngaliwatan skakmat ngalawan raja lawan. Kaulinan catur kaya akan strategi, taktik dan perencanaan.

Kaulinan ieu, beunghar ku unsur strategi, taktik sareng rarancang. Catur bukan hanya sekedar permainan, namun juga merupakan seni, olahraga serta pendidikan, karena banyak manfaatnya: *Pertama*, meningkatkan kognisi (melatih logika, memori serta menyelesaikan (ngarengsekeun) masalah. *me*, ningkatkan fokus (memerlukan konsentrasi untuk memenangkan pertandingan). Ketiga, mengembangkan emosi (melatih kasabaran dan kemampuan untuk mengatur rencana tatalaku). Oleh sebab itu, catur mengajarkan pentingnya perencanaan, analisis dan mengendalikan emosi untuk menghadapi tantangan. Sementara kaulinan lain, adalah gapleh. Gapleh bukan hanya merupakan permainan biasa, tetapi banyak mengandung unsur filosofis yang mendalam tentang strategi, kepemimpinan, diplomasi dan persaingan yang sehat dalam permainan politik. Seorang pemimpin seperti pemain Gapleh yang cerdas : Harus bisa membaca situasi, merancang strategi, membanguna aliansi dan menentukan waktu yang tepat untuk bertindak. Kompetisi dalam politik harus dilakukan dengan sportifitas, seperti dalam permainan kartu gapleh, meskipun ada pesaing,t etapi tetap harus menjungjung tinggi etika dan keadilan. Dengan pemahaman filosopis gapleh, kita bisa belajar bagaimana politik yang sehat dan beretika dapat dijalankan dengan lebih bijaksana dan strategis demi kesejahtraan Masyarakat.

Ketigabelas, Masyarakat Sunda memliki warisan pemikiran politik yang kaya, yang tercermin dalam nilai nilai demokrasi, keadilan, musyawarah dan kesejahtraan rakyat. Banyak tokoh tokoh Sunda yang telah memberikan kantribusi dalam pengembangan politik di Indonesia, baik dalam kontek yang tradisional, kolonial maupun modern. Salah satu contoh dalam kaitan dengan hal ini, kita dapat melihat dari pemikiran politik tokoh legendaris Sunda yaitu Prabu Silihwangi. Sering dikaitkan dengan kepemimpinan yang bijaksana, adil dan penuh perhatian bagi kehidupan rakyatnya. Pemikiran

politiknya menekankan pada pentingnya kesatuan, keadilan dan keseimbangan dalam mengatur negaranya/Kerajaan. Pada akhirnya, Pemikiran politik Sunda merupakan bentuk filsafat politik lokal yang mengedepankan kemanusiaan, moralitas, spiritualitas, dan keseimbangan. Meskipun tidak disusun secara formal seperti teori politik Barat, namun ia menawarkan konsep-konsep penting mengenai kepemimpinan, kekuasaan, dan tata kelola masyarakat yang bisa menjadi alternatif etis dan kultural dalam membangun sistem politik yang sehat dan berkeadaban. Secara historis Pemikiran politik Sunda berkembang dari warisan kerajaan-kerajaan kuno di wilayah Tatar Sunda. Dalam kerajaan-kerajaan tersebut, kepemimpinan dijalankan dengan menekankan keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan moralitas, serta bersumber dari nilai-nilai budaya dan spiritualitas lokal. Pemimpin diharapkan menjadi pangagung (pemimpin agung) yang adil dan bijaksana, bukan sekadar penguasa. Meskipun pemikiran dan Falsafah politik Sunda tidak tertulis dalam buku buku atau bentuk doktrin formal, namun tersirat dalam pepatah, kawih, wawacan, dan tradisi lisan, yang sarat makna etika politik. Diantaranya falsafah falsapah Sunda tersebut paling tidak bisa disebutkan, antara lain: *“Silih asih, silih asuh, silih asah”.* Politik dipahami sebagai proses saling menyayangi, mendidik, dan membimbing demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, Sean; Morioka, Noreen; Stone, Terry Lee. 2006. *Color Design Workbook: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design. Gloucester, Mass*. Rockport Publishers.

Adams, Ian. 2001. *Political Ideology Today (Politics Today).* Manchester: Manchester University Press.

Adams, Ian. 1998. *Ideology and Politics in Britain Today*. Manchester University Press.

Ajip Rosidi. 2011. “Urang Sunda di Lingkungan Indonesia.”Orasi ilmiah pada pengukuhan Gelar Doctor Honoris Causa bidang Ilmu Budaya Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.31 Januari 2011.

Alterman, Eric. 2008. *Why We're Liberals. New York: Viking Adult*.

Amin, Samir. 2004. *The liberal virus: permanent war and the americanization of the world*. New York: Monthly Review Press.

Anne Ahira. 2011. *Perempuan dalam Budaya Suku Sunda*. 27 Januari 2011.

Anthony Giddens.1998. *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. 1998 edition. Cambridge, England, UK: Polity Press.

Arthur M. Schlesinger Jr. 1956. *Liberalism in America: A Note for Europeans*. Boston: Riverside Press.

Arnold, Scott. 1994. *The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study*. Oxford University Press.

Bevir, Mark. 2010. *Encyclopedia of Political Theory: A–E, Volume 1*. SAGE Publications.

Beauchamp, Zack. 2019. *"The anti-liberal moment". Vox* (dalam bahasa Inggris).

Bockman, Johanna. 2011. *Markets in the name of Socialism: The Left-Wing origins of Neoliberalism.* Stanford University Press.

Brooks, Frank H. 1994. *The Individualist Anarchists: An Anthology of Liberty (1881–1908)*. Transaction Publishers.

Brown, L. Susan. 2002. *"Anarchism as a Political Philosophy of Existential Individualism: Implications for Feminism". The Politics of Individualism: Liberalism, Liberal Feminism and Anarchism.* Black Rose Books Ltd. Publishing.

Busky, Donald F. 2000. *"Democratic Socialism: A Global Survey". Westport. Connecticut, USA: Greenwood Publishing Group, Inc.*

Cassel-Picot, Muriel. 2013. "The Liberal Democrats and the Green Cause: From Yellow to Green" in Leydier, Gilles and Martin,

Alexia (2013) Environmental Issues in Political Discourse in Britain and Ireland. Cambridge Scholars Publishing.
Carson, Kevin. 2007. *Preface*. Studies in Mutualist Political Economy. BookSurge Publishing.
Colin Moynihan. 2007. *Book Fair Unites Anarchists In Spirit Anyway*. New York Times.
Conway, Martin. 2014. "The Limits of an Anti-liberal Europe". Dalam Gosewinkel, Dieter. Anti-liberal Europe: A Neglected Story of Europeanization. Berghahn Books.
Cornell, Andrew. 2016. *Unruly Equality: U.S. Anarchism in the Twentieth Century*. University of California Press.
David Cayla, ed. 2021. *Populism and Neoliberalism*. Routledge.
David Graeber and Andrej Grubacic. 2008. *Anarchism, Or The Revolutionary Movement Of The Twenty-first Century*. ZNet.
Delaney, Tim. 2005. *The march of unreason: science, democracy, and the new fundamentalism*. New York: Oxford University Press.
Dewi Kurniasih. 2010. *Kepemimpinan Politik Orang Sunda*. Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 5.
Diamond, Larry. 2008. *The Spirit of Democracy*. New York: Macmillan.
E.T. Rustanto. *Potensi Budaya Politik Sunda dalam Lingkup Dinamika Politik Nasional*. Blog Aom Vanriest.
Eatwell, Roger; Wright, Anthony. 1999. *Contemporary political ideologies*. Continuum International Publishing Group.
Eddy D. Iskandar. 2006. *Gagade Bari Nyarande, Falsafah Kepemimpinan (Keluarga) Sunda*. Pikiran Rakyat, 4 Agustus 2006.
Eddy, Matthew Daniel. 2017. *The Politics of Cognition: Liberalism and the Evolutionary Origins of Victorian Education*. British Journal for the History of Science. 50 (4).
Emil J. Kirchner. 1988. *Liberal Parties in Western Europe*. Cambridge : University Press.
Ellman, Michael. 2007. *"The Rise and Fall of Socialist Planning". Dalam Estrin, Saul; Kołodko, Grzegorz W.; Uvalić, Milica. Transition and Beyond: Essays in Honour of Mario Nuti.* New York: Palgrave Macmillan.
Elis Suryani N.S. 2010. *Pemimpin Ideal Dalam Naskah Sunda*. Harian Umum Pikiran Rakyat. 2 Februari 2010.
Engkoswara. 2002. *Lembaga Pendidikan Sebagai Pusat Pembudayaan: Hidup Harmoni di Keluarga, Sekolah dan di Masyarakat*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
Evan; PDAT. 2015. *Sanusi Hardjadinata, Tuan Rumah Hajatan KAA 1955*. Tempo.co.

Franklin, Robert Michael. 1990. *Liberating Visions: Human Fulfillment and Social Justice in African-American Thought*. Fortress Press.
Gasper, Phillip. 2005. *The Communist Manifesto: a road map to history's most important political document*. Haymarket Books.
Gage, Beverly. 2018. *America Can Never Sort Out Whether 'Socialism' Is Marginal or Rising*. The New York Times.
Gerald F. Gaus, Chandran Kukathas. 2004. *Handbook of political theory*. London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE Publications.
Gurniwan Kamil Pasya. 2010. *Peranan Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik*. Makalah. Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
Hakim, Zaenal. 2010. *Pribadi Dipati Ukur Pahlawan Tatar Sunda*. Jurnal Sawo Manila Universitas Nasional. 1 (4).
Hans Slomp, ed. 2011. Europe, *A Political Profile: An American Companion to European Politics*. Volume 1. ABC-CLIO.
Hastings, Mason and Pyper, Adrian, Alistair and Hugh. 2000. *The Oxford Companion to Christian Thought*. Oxford University Press.
Ian McLean and Alistair McMillan. 2009. *Concise Oxford Dictionary of Politics*. Iain McLean and Alistair McMillan, Third edition.
Jakob Sumardjo. 2007. *Paham Kekuasaan Sunda*. Harian Umum Pikiran Rakyat. 1 Januari 2007.
Jacob Sumardjo. 2004. *Trias Politika Sunda*. Pikiran Rakyat, 29 Pebruari 2004.
James Risen. 2000. *Secrets of History: The C.I.A. in Iran*. The New York Times.
Jaume, Lucien. 2000. *Coppet, creuset de l'esprit libéral: Les idées politiques et constitutionnelles du Groupe de Madame de Staël*. Presses Universitaires d'Aix-Marseille.
John Dunn.1993. *Western Political Theory in the Face of the Future*. Cambridge University Press.
Judith Suissa. 2006. *Anarchism and Education: a Philosophical Perspective*. Routledge. New York.
Kahn, Joseph. 2000. *Anarchism, the Creed That Won't Stay Dead; The Spread of World Capitalism Resurrects a Long-Dormant Movement*. The New York Times.
Kanazawa. 2010. defines liberalism (as opposed to conservatism).
Karl Marx, Friedrich Engels. 2002-2006. *Keluarga Suci*. University Press of the Pacific.
Kolb, Robert. 2007. *Encyclopedia of Business Ethics and Society*. First Edition. SAGE Publications, Inc.

Kotz, David M. 2011. *Socialism and Capitalism: Are They Qualitatively Different Socioeconomic Systems?* (PDF). University of Massachusetts.

Koerner, Kirk F. 1985. *Liberalism and Its Critics*. London: Routledge.

Kropotkin, Peter. 2002. *Anarchism: A Collection of Revolutionary Writings.* Courier Dover Publications.

Kumar, Rohit Vishal; Joshi, Radhika. 2006. *Colour, Colour Everywhere: In Marketing Too*. SCMS Journal of Indian Management. 3 (4).

Larry Diamond. 2008. *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. Henry Holt.

Lasmiyati, Lasmiyati. 2016. *Dipati Ukur dan Jejak Peninggalannya di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (1627-1633)*. E-jurnal Patanjala-Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya. 8 (3).

Lenin, Vladimir. 2008. *On Culture and Cultural Revolution*. Wildside Press LLC.

Lefevere, Andre. 2016. *Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame*. Taylor & Francis.

Levy, Carl. 2004. *Anarchism, Internationalism and Nationalism in Europe, 1860–1939*. Australian Journal of Politics and History. 50 (3).

Levy, Carl; Newman, Saul, eds. 2019. *The Anarchist Imagination: Anarchism Encounters the Humanities and the Social Sciences*. Interventions. Routledge.

Levy, Carl. 2010. *Social Histories of Anarchism*. Journal for the Study of Radicalism. 4 (2).

Lubis, Nina H.; Hardjasaputra, A. Sobana; Marlina, Ietje. 2000. *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Luthfiyani, Lulu. 2017. *Kamus Genggam Bahasa Sunda*. Yogyakarta: Frasa Lingua.

Lynch, Derek; Davies, Peter J. 2002. *The Routledge Companion to Fascism and the Far Right*. United Kingdom.

Mark Bevir (ed). 2010. *Encyclopedia of Political Theory*. SAGE. Los Angeles.

Malatesta, Errico. 2006. *Towards Anarchism*. Encyclopædia Britannica Premium Service.

Malcolm Hamilton. 1989. *Democratic Socialism in Britain and Sweden.* St Martin's Press.

Martin Upchurch, Graham John Taylor, Andy Mathers. 2009. *The crisis of social democratic trade unionism in Western Europe: the search for alternatives*. Surrey, England, UK; Burlington, Vermont, USA: Ashgate Publishing.

McGrath, Alister. 1998. *Historical Theology, An Introduction to the History of Christian Thought*. Oxford: Blackwell Publishers.

Milan Zafirovski. 2007. *Liberal Modernity and Its Adversaries: Freedom, Liberalism and Anti-Liberalism in the 21st Century*. Brill.

Michael Newman. 2005. *Socialism: A Very Short Introduction*. Cornwall, England, UK: Oxford University Press.

Moya, Jose C. 2015. *Transference, culture, and critique The Circulation of Anarchist Ideas and Practices*. In De Laforcade, Geoffroy; Shaffer, Kirwin, R., ed. In Defiance of Boundaries: Anarchism in Latin American History. University Press of Florida.

Naila Soima Kamila. 2022. *Penyebab Kuatnya Nilai Islam Dalam Mayarakat Tatar Sunda*. Jurnal Priangan, Volume 1(2) 2022.

Nik Brandal, Øivind Bratberg, Dag Einar Thorsen. 2013. *The Nordic Model of Social Democracy*. Pallgrave MacMillan.

O'Hara, Phillip. 2003. *Encyclopedia of Political Economy*. Volume 2. Routledge.

O'Reilly, David. 2007. *The New Progressive Dilemma: Australia and Tony Blair's Legacy* (dalam bahasa Inggris). Springer.

Palley, Thomas I. 2004. *From Keynesianism to Neoliberalism: Shifting Paradigms in Economics*. Foreign Policy in Focus.

Peter Kropotkin. 2005. *Anarchism from the Encyclopædia Britannica Anarchism.* The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy.

Peter Dreier. 2014. *Martin Luther King Was a Radical Not a Saint*. Truthout.

Pierson, Chris. 2005. *Lost property: What the Third Way lacks*. Journal of Political Ideologies. 10 (2).

Pierson, Christopher. 1995. *Socialism After Communism: The New Market Socialism*. Pennsylvania State Univ Press.

Pressman, Steven. 1999. *Fifty Great Economists*. London: London: routledge.

Prychito, David L. 2002. *Markets, Planning, and Democracy: Essays After the Collapse of Communism*. Edward Elgar Publishing.

Puddington. 2006. After a dozen years of centre-left Liberal Party rule, the Conservative Party emerged from the 2006 parliamentary elections with a plurality and established a fragile minority government.

Pusat Bahasa Depdiknas. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.

R.B. Fowler. 1972. *The Anarchist Tradition of Political Thought*. Western Political Quarterly. University of Utah.

Raza, Syed Ali. *Social Democratic System* (dalam bahasa Inggris). Global Peace Trust.

Rd. Sugara Mochamad Haddad dan Muhamad Hijran. 2017. *Model Kepemimpinan Politik Sunda dalam Konteks Pendidikan Politik*. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Rothbard. 2020. *The Libertarian Heritage: The American Revolution and Classical Liberalism*. Parties and Elections in Europe.

Rosser, Mariana V. and J Barkley Jr. 2003. *Comparative Economics in a Transforming World Economy*. MIT Press.

Russell, Bertrand. 1932. *In Praise of Idleness*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-08-22.

Schweickart, David. 2006. *Democratic Socialism*. Encyclopedia of Activism and Social Justice.

Slevin, Carl. 2003. *Anarchism*. The Concise Oxford Dictionary of Politics. Ed. Iain McLean and Alistair McMillan. Oxford University Press.

Steven Pincus. 2009. The First Modern Revolution. Yale University Press.

Stewart, Ross E.1984. *Sismondi's Forgotten Ethical Critique of Early Capitalism*. Journal of Business Ethics. 3 (3).

Spiegel, Henry William. 1991. The Growth of Economic Thought. Duke University Press.

Stedman Jones, Gareth. 2006. *Saint-Simon and the Liberal origins of the Socialist critique of Political Economy*. Dalam Aprile, Sylvie; Bensimon, Fabrice. La France et l'Angleterre au XIXe siècle. Échanges, représentations, comparaisons. Créaphis.

Sternhell, Zeev, Mario Sznajder and Maia Ashéri. 1994. *The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Steele, David Ramsay. 1999. *From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation*. Open Court.

Stanislao G. Pugliese. 1999. *Carlo Rosselli: socialist heretic and antifascist exile*. Harvard University Press.

Sumartono. 2018. *Budaya Politik dalam Masyarakat Pragmatis*. LUGAS Jurnal Komunikasi (dalam bahasa Inggris). 2 (1).

Tenenbaum, Susan. 1980. *The Coppet Circle. Literary Criticism as Political Discourse*. History of Political Thought. 1 (2).

Thomas Meyer. 2007. *The Theory of Social Democracy*. Cambridge, England, UK: Polity Press.

Thomas Meyer, Lewis P. Hinchman. 2007. *The theory of social democracy*. Cambridge, England, UK; Malden, Massachusetts, USA: Polity Press.

Tucker, Benjamin R.1889. *On Picket Duty*, Liberty (Not the Daughter but the Mother of Order) (1881–1908). APS Online.

Vincent, Andrew. 2009*. Modern Political Ideologies*. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell.

Ward, Colin. 1966. *Anarchism as a Theory of Organization*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 March 2010.

Wittrock, Bjorn. 2001. *Sejarah Pemikiran Politik*. Dalam International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Reference Work.

Yohana Reni Anggraeni. 2020. Sunda Wiwitan: Hidup karena Alam dan Izin Leluhur. Kompasiana.com

Zakaria, Mumuh Muhsin. 2008. *Sumedang pada Masa Pengaruh Kesultanan Mataram (1601-1706)* (PDF). Diskusi Penulisan Buku Sejarah Sumedang dari Masa ke Masa. Bandung.

Zakaria, Mumuh Muhsin. 2008. *Terbentuknya Keresidenan Priangan* (PDF). Diskusi Program Pascasarjana Fakultas Sastra BKU Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran Bandung.

Hade Gogog Hade Tagog, Tina Peurih jadi Peurah

Prof. Dr. H. M. Budiana, S.IP.,M.Si



ISBN 978-634-96108-0-3

9 786349 610803